



LKj

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2022





TANAH LAUT
BERINTERAKSI

The poster features a central image of a police officer in a tan uniform and yellow cap, smiling. The background is a stylized red and white graphic. At the top left, there are cartoon illustrations of a man and a woman in uniform. The top right corner includes the 'panrb' logo and the 'TANAH LAUT' logo. The acronym 'BERAKHLAK' is prominently displayed in large, bold letters, with each letter representing a value: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, and Kolaboratif. These values are also listed vertically on the sides of the poster. The bottom section contains the text 'Saya ASN KAB.TANAH LAUT > BerAKHLAK' and a list of the values. Contact information and social media handles are provided at the bottom.

panrb
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SARUNG BERTAMBAH BERKUALITAS

TANAH LAUT

BERAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**Saya ASN
KAB.TANAH LAUT >
BerAKHLAK**

#BanggaMelayaniBangsa

0852 4529 2385

organisasi.kala

**bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kinerja yang diukur dalam laporan ini didasarkan atas Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022 capaian kinerja dan keuangan Sekretariat Daerah adalah **93 %** dengan kategori **Sangat Berhasil**, yang di dukung dengan **40** (empat puluh) Sasaran Strategis dan **50** (lima puluh) Indikator Sasaran serta didukung oleh **3** (tiga) Program, **18** (delapan belas) Kegiatan dan **50** (lima puluh) Sub Kegiatan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang disusun ini tentunya masih jauh dari sempurna, perlu adanya masukan, saran, atau kritikan sehingga kedepan akan dapat disusun Laporan Kinerja yang lebih berkualitas, komprehensif dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi Aparatur lingkup Sekretariat Daerah dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang.

Pelaihari, 20 Januari 2023

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyajikan dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Penetapan Kinerja, serta Pengukuran Pencapaian Sasaran yang dilengkapi dengan identifikasi faktor - faktor yang mendukung keberhasilan dan atau kegagalan.

Di samping itu LKj ini juga melaporkan tingkat pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKj ini berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang mana dalam Renstra tersebut tercantum Visi "**Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)**". Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Sekretariat Daerah mengampu Misi ke- :

1. **Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;**
2. **Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;**
3. **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);**
5. **Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Keempat Misi yang di ampu oleh Sekretariat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mana masing- masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Untuk Tahun 2022 Sekretariat Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar **Rp 76.807.742.632,00,00,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 71.688.787.342,00,- (93%)**.

Berikut anggaran dan capaian realisasi di masing-masing bagian lingkup
 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 :

No	Bagian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	Rp. 1.630.548.804,00	Rp. 1.241.748.772,00	76%
2	Hukum	Rp. 1.483.907.058,00	Rp. 1.038.558.036,00	70%
3	Organisasi	Rp. 357.827.454,00	Rp. 272.899.875,00	76%
4	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Rp. 609.115.558,00	Rp. 553.292.900,00	91%
5	Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 1.027.842.586,00	Rp. 902.460.388,00	88%
6	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.780.351.961,00	Rp. 30.009.265.192,00	97%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.056.615.974,00	Rp. 986.485.397,00	93%
8	Umum	Rp. 17.340.073.924,00	Rp. 16.196.351.636,00	93%
9	Perencanaan dan Keuangan	Rp. 22.521.459.313,00	Rp. 20.487.725.146,00	91%
	Jumlah	Rp. 76.807.742.632,00	Rp. 71.688.787.342,00	93%

**Sumber/Pengolah Data Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Diharapkan LKj ini telah mempresentasikan kinerja nyata Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sekaligus sebagai perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dapat memberikan informasi pengambilan keputusan Pimpinan guna peningkatan kinerja organisasi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	11
D. Produk Layanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	22
E. Sistematika Penyajian	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi	27
B. Misi	30
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	31
D. Indikator Kinerja Utama	42
E. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022	43
F. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	53
1. Sasaran RPJMD	53
2. Eselon II	68
2.1 Eselon II (Sekretaris Daerah)	68
2.2 Eselon II (Staf Ahli)	120
2.3 Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah)	123
3. Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kasubbag)	132
3.1 Bagian Umum	132
3.2 Bagian Pemerintahan	173
3.3 Bagian Organisasi	211
3.4 Bagian Perencanaan dan Keuangan	235
3.5 Bagian Pengadaan Barang/Jasa	306



3.6 Bagian Hukum	329
3.7 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	345
3.8 Bagian Kesejahteraan Rakyat	363
3.9 Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA.....	402
4. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	417
5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.....	421
6. Tabel Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2022	430
 B. Akuntabilitas Keuangan	430
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022	430
2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	431
3. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	439
4. Realisasi Persentase Keuangan, Realisasi Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis Tahun 2022	446
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	452
B. Strategi Peningkatan Kinerja	456
C. Penghargaan dan Inovasi	459

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU Sekretariat Daerah Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Tahun 2022
2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ber tanda tangan
4. Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022



5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022
6. Monev Renstra
7. Matriks Keselarasan Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mencapai rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Disamping itu Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Sekretariat Daerah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban instansi serta tekad seluruh PNS Sekretariat Daerah untuk mencapai Misi tujuan organisasi yang transparan guna mendukung tercapainya *Good Governance*.

Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values ASN BerAKHLAK* (**B**erorientasi Pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, dan **K**olaboratif) dan *Employer Branding Bangsa Melayani Bangsa*, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi Dasar penguatan budaya kerja

guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sesuai dengan Misi yang di emban Sekretariat Daerah.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Bupati dan didampingi seorang Wakil Bupati, **Bupati Tanah Laut dipimpin oleh H. Sukamta dengan Wakilnya Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 19 September 2018**. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut NOMOR 114 TAHUN 2021 Pasal 4, Ayat 3 susunan Organisasi terdiri atas :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- d. Asisten Administrasi Umum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Asisten Administrasi Umum, membawahi:

- a. Bagian Umum, yang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
-
- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas Sub Bagian Protokol;
 - c. Bagian Organisasi; dan
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan Administratif. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Pengadaan Barang/Jasa;

- e. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui:

- 1) **Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.
- 2) **Bagian Hukum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum.
- 3) **Bagian Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan budaya serta kesejahteraan masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian administrasi pembangunan dan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa melalui:

- 1) **Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;

- 2) **Bagian Pengadaan Barang/Jasa** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, dan perencanaan dan keuangan melalui:

- 1) **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Aset Perlengkapan Serta Umum dan Rumah Tangga;
- 2) **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 3) **Bagian Organisasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 4) **Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(4) Asisten Kelompok Jabatan Fungsional

- Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah

Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

a. Aspek Strategis Organisasi

1) Sumber Daya SKPD

Susunan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir Tahun 2022 berdasarkan jabatan struktural dan non struktural berjumlah 104 orang, dan 143 orang Non PNS, yang meliputi :

1.	Sekretaris Daerah	:	1	Orang
2.	Asisten	:	3	Orang
3.	Staf Ahli Bupati	:	3	Orang
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	:	1	Orang
5.	Kepala Bagian Hukum	:	1	Orang
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1	Orang
7.	Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	:	1	Orang
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
9.	Kepala Bagian Umum	:	1	Orang

10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	1	Orang
11.	Kepala Bagian Organisasi	:	1	Orang
12.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	1	Orang
27.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
28.	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	:	1	Orang
29.	Kepala Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	:	1	Orang
30.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	:	1	Orang
33.	Kepala Sub Bagian Protokol	:	1	Orang
37.	JFU/ JFT/Pelaksana		83	Orang
38.	Non PNS		143	Orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan
per 31 Desember 2022

NO	BAGIAN	GOLONGAN																
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																1
2	Asisten		3															3
3	Staf Ahli		2	1														3
4	Pemerintahan			1		3		1		2								7
5	Hukum			1		2	1	1	2									7
6	Kesejahteraan Rakyat				1	2		1	2	1								7
7	Pengadaan Barang/Jasa				3	8	2	3	2	4								22
8	Perekonomian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Alam				1	2	1		1									5
9	Umum				1	2	1	3	3	6	2	1	2	1	1			23
10	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1		1	2	3	2	2							11
11	Organisasi			1		2		1	2									6
12	Perencanaan dan Keuangan			1		3			2	3								9
JUMLAH		1	5	5	7	24	6	13	17	18	4	1	2	1	1	-	-	104

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

b. Aspek SDM Sekretariat Daerah

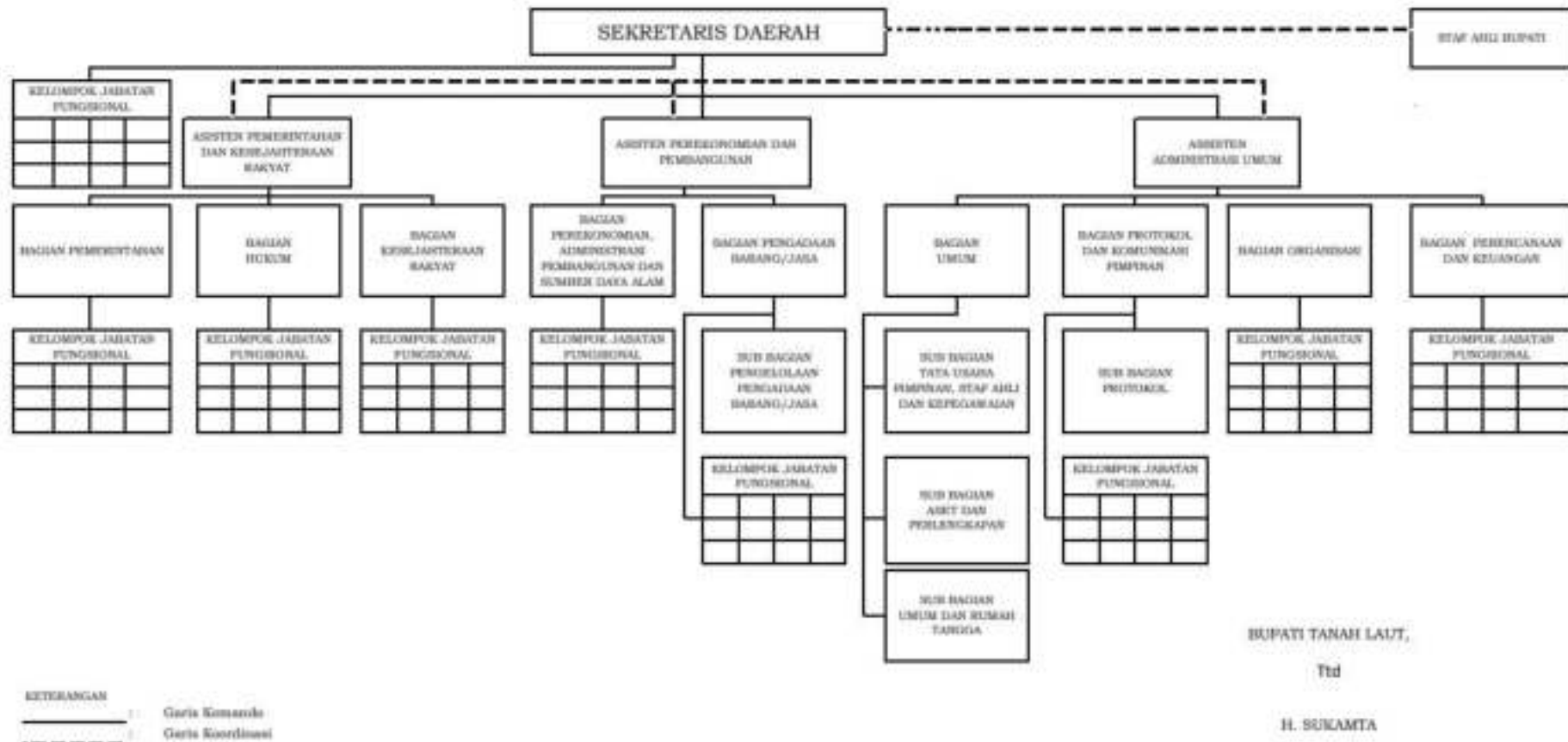
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah		1								1
2	Asisten Sekda	1	2								3
3	Staf Ahli		1	2							3
4	Pemerintahan		2	3		1		1			7
5	Hukum		1	5		1					7
6	Organisasi			6							6
7	Pengadaan Barang Jasa		2	15		4		1			22
8	Perekonomian Adm Pembangunan SDA		3	1		1					5
9	Kesejahteraan Rakyat		1	3		2		1			7
10	Umum			5		2		12	1	3	23
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1	5			1	4			11
JUMLAH		1	14	50	-	12	1	22	1	3	104

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 114 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 Desember 2021



C. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

i. Belum Belumlah maksimalnya pemanfaatan sistem pengadaan guna mendapatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara Dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) disebutkan bahwa ITKP minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. *E-Tendering/E-Seleksi*;
 - c. *E-Purchasing*;
 - d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Nilai ITKP minimal BAIK ini akan berpengaruh terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penilaian dengan **bobot 77.9** dengan predikat **BAIK**. Adapun nilai pembobotan per *item* penilaian yaitu :

NO	PENILAIAN INDIKATOR	NILAI BOBOT
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	
a.	SiRUP	10.00
b.	<i>E-Tendering/E-Seleksi</i>	4.80
c.	<i>E-Purchasing</i>	0.00
d.	<i>Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing</i>	4.80
e.	E-Kontrak	2.20
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	16.20
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00
	TOTAL	77.90

Dari tabel di atas maka diketahui bahwa salah satu **isu strategis Bagian PBJ** adalah pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku pengadaan guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut di Tahun 2023 yaitu :

- Membuat Surat Edaran untuk disebarkan ke SKPD guna pemenuhan Data ITKP;
- Melaksanakan pendampingan ke SKPD untuk pemanfaatan sistem pengadaan;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan sistem pengadaan di SKPD (setiap triwulan).

ii. **Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP**

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah organisasi lembaga dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi lembaga akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan Jumlah eksisting, ketersediaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini adalah :

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JF PPBJ Pertama	4 orang
2.	JF PPBJ Muda	9 orang
3.	JF PPBJ Madya	2 orang
	Total	15 orang

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022*

Berdasarkan surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 10197/D.3.1/05/2021 Perihal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, disampaikan bahwa Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut yg disampaikan LKPP RI terkait usulan perhitungan kebutuhan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, yaitu :

NO	Nama Jabatan	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	14
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3
	TOTAL	26

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022*

Dari paparan kedua tabel di atas maka diketahui bahwa masih terdapat kekurangan formasi JF PPBJ sebanyak 11 orang.

Untuk itu maka, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berusaha mengusulkan kepada Bupati Tanah Laut untuk dapat memenuhi formasi JF PPBJ tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara pembukaan formasi pada penerimaan CPNS untuk Kabupaten Tanah Laut atau memfasilitasi melalui perpindahan dari jabatan lain ke JF PPBJ.

iii. Belum Maksimalnya Kinerja BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dalam Memberikan Kontribusi PAD kepada Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam hal ini mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh kewenangan yang luas dalam mengembangkan dan mengelola kekayaan daerahnya dan dituntut kemandiriannya terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan mendasar dalam sistem pemerintah daerah.

Untuk menciptakan penerimaan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah. Pada sisi lain BUMD juga diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya BUMD menjadi penopang yang cukup besar dalam meningkatkan PAD.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998). Tujuan

dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa BUMD antara lain Perseroda PDAM Tanah Laut, PD Baratala, PT. BPR Tanah Laut, dan PT. Tanah Laut Manuntung.

Kontribusi penerimaan masing-masing BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut selama dua tahun terakhir mulai terlihat walaupun masih minim, kontribusi tersebut diberikan oleh PT. BPR Tanah Laut dan PD. Baratala Tuntung Pandang. Minimnya penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan BUMD disebabkan permasalahan – permasalahan antara lain :

- A. Kinerja masing-masing BUMD masih perlu ditingkatkan dengan menetapkan target yang wajar berdasarkan potensi riil dari masing-masing jasa usaha yang dikelola oleh masing-masing BUMD.
- B. Salah satu kendala yang terjadi dalam pengelolaan BUMD, antara lain jumlah pegawai yang terlalu banyak di setiap BUMD sehingga biaya umum dan administrasi setiap bulannya cukup besar (PDAM Tanah Laut).
- C. Belum optimalnya pengelolaan core bisnis dari masing-masing BUMD sehingga berdampak pada kurangnya pendapatan yang diperoleh, target pendapatan yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada (PT. BPR Tanah Laut).
- D. Rendahnya kualitas BUMD juga mengakibatkan BUMD belum siap menghadapi persaingan yang cukup ketat pada tataran nasional, regional, maupun internasional.
- E. Belum dikelolanya BUMD dengan baik berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG)
- F. Masih terdapat satu BUMD yang belum dapat melaksanakan operasional karena terkendala permodalan dan belum adanya organ kepengurusan yang definitif.

No	Nama BUMD	Jumlah PAD (Rp)		
		2020	2021	2022
1	PDAM Tanah Laut	-	-	-
2	PD. Baratala Tuntung pandang	379.934.000	479.277.000	650.000.000
3	PT. BPR Tanah Laut	-	106.000.000	462.000.000

Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA dalam menyikapi permasalahan dalam pengelolaan BUMD antara lain :

- 1) Bekerjasama dengan pihak akademisi untuk melakukan diagnosis kemampuan organisasi BUMD tersebut dan bagaimana mengoperasikan organisasi tersebut secara efektif.
- 2) Mengkaji kekuatan atau kelemahan manajemen BUMD sebagai langkah awal dalam mendiagnosis organisasi, untuk mengetahui sejauh mana resources yang dimiliki BUMD tersebut untuk mendukung efektivitas strategi dan sejauh mana kelemahan-kelemahan yang dimiliki yang potensial menghambat kinerja BUMD.
- 3) Menambah jumlah investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal berupa uang dan barang
- 4) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala
- 5) Memberikan pertimbangan kepada pihak manajemen, agar merekrut tenaga profesional yang kalau perlu bersifat part time atau kontrak guna mengatasi masalah SDM yang crucial, harus diakui bahwa kualitas SDM BUMD saat ini kebanyakan berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah.
- 6) Penetapan kembali core bisnis masing – masing BUMD, likuidasi unit usaha yang selalu merugi. Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efisien dan efektif.

Memberikan saran untuk melakukan perbaikan koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir, memaksimalkan peluang eksternal berupa upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan, Bentuk kerja sama bisa berupa joint venture atau bentuk kerja sama lainnya.

iv. Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Gapura Karomah

Pelaksanaan program permodalan bagi pelaku usaha mikro berbiaya rendah Gapura Karomah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2019 tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente untuk Ekonomi Lemah sudah memasuki tahap ke IV dengan total dana investasi yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. BPR Tanah Laut berjumlah Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Dari jumlah tersebut

sebanyak Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) telah di salurkan kepada 1.908 pelaku usaha mikro yang telah di verifikasi yang terbagi dalam 5 bidang usaha yaitu Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Perikanan dan Perindustrian.

NO	NAMA	JMLH	ORG	PLAFOND
1	PERTANIAN (1001)	938	ORG	9.457.690.000
2	PETERNAKAN (1001)	248	ORG	3.910.000.000
3	PERDAGANGAN (1007)	661	ORG	4.248.500.000
4	PERIKANAN (1002)	34	ORG	210.000.000
5	PERINDUSTRIAN (1004)	27	ORG	145.000.000
	JUMLAH	1908	ORG	17.971.190.000

Dalam pelaksanaannya banyak pelaku usaha mikro yang menggunakan fasilitas permodalan Gapura Karomah ini. Namun dalam proses pemberian kredit kepada debitur menemui banyak kendala dan permasalahan antara lain:

- Pihak penyalur yaitu Bank BPR Tanah Laut menerapkan ketentuan – ketentuan kredit perbankan sehingga cukup memakan waktu
- Para pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD Teknis
- Tingginya minat membuat daftar tunggu permohonan sangat panjang bahkan sampai satu tahun
- Keterbatasan anggaran investasi yang di salurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Pada tahun kedua pelaksanaan program kredit Gapura Karomah di Tahun 2020 terjadi bencana pandemi Covid 19 yang melanda Dunia tidak terkecuali di Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut membuat tekanan yang negatif terhadap perekonomian Dunia, perekonomian Indonesia dan tentunya perekonomian di Tanah Laut dan berimbas terhadap perekonomian pelaku usaha mikro di Tanah Laut. Adanya pandemi Covid ini membuat para debitur Gapura Karomah mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan terjadinya kemacetan pengembalian dana kredit.

LAPORAN KOLEKTIBILITAS KREDIT GAPURA KAROMAH 0%
 (nol persen)
POSISI 30 DESEMBER 2022

No	Kolektibilitas		Baki Debet Posisi	
			30 DESEMBER 2022	
1		2	3	4
1	768	Lancar	5.867.211.600	96,10%
2	-	Dalam Perhatian khusus		0,00%
3	-	Kurang Lancar		0,00%
4	-	Diragukan		0,00%
5	62	Macet	238.027.400	3,90%
	830	JUMLAH	6.105.239.000	3,90%

Dalam rangka antisipasi semakin banyaknya tingkat kemacetan akibat adanya pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA mengusulkan untuk Peraturan Bupati tentang fasilitas restrukturisasi untuk debitur Gapura Karomah yang mengalami penurunan ekonomi akibat adanya .pandemi Covid 19. Jumlah debitur yang mengikuti program restrukturisasi kredit hingga 30 Desember 2022 berjumlah 42 orang dengan nilai Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Tim Investasi Daerah terus mengawal progam ini dan berupaya agar pelaksanaan program ini sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian para pelaku usaha mikro.

v. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

Tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi belum tuntas untuk terus dilaksanakan sebagai langkah telah melaksanakan sebagian agenda reformasi birokrasi, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023.

Reformasi Birokrasi yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), sistem pengelolaan keuangan, manajemen kepegawaian, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengendalian

internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan terbatasnya kompetensi SDM untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi tersebut.

Sampai saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah belum dilaksanakan secara optimal, ada beberapa komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

- 1) Manajemen Perubahan; sosialisasi dan internalisasi RB belum dilaksanakan secara terus menerus
- 2) Regulasi Kebijakan; Identifikasi dan analisis pemutkhiran pemetaan seluruh peraturan perundang undangan yang tidak harmonis/sinkron belum dilaksanakan secara berkelanjutan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; Tindak lanjut evaluasi penyesuaian beban kerja SKPD belum maksimal
- 4) Penataan Tata Laksana; Belum disusunnya Peta Proses Bisnis Setda, SOP belum sesuai dengan Peta Proses Bisnis
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; Belum adanya review terhadap standar kompetensi jabatan PNS Setda dan kinerja individu belum dilakukan monev secara berkala
- 6) Penguatan Akuntabilitas; Belum terlibatnya pimpinan secara menyeluruh dalam penyusunan dokumen perencanaan
- 7) Penguatan Pengawasan;
 - Penerapan SPIP belum optimal
 - Monev pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara berkala
 - Belum optimalnya penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Belum maksimalnya pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi
 - Belum maksimalnya penerapan budaya pelayanan prima

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, perlu adanya rencana tindak lanjut untuk menjamin perbaikan program Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah guna mendukung pelaksanaan Reformasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, rencana tindak lanjut dimaksud adalah sebagai berikut :

NO.	AREA PERUBAHAN RB	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Manajemen Perubahan	a. Telah membuat Keputusan terkait Tim RB sesuai Area pada LKE b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kinerja kearah yang lebih baik
2.	Regulasi Kebijakan	a. Melakukan Indintifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron secara berkelanjutan; b. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan indentifikasi, analisa dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron yang terbaru dengan melibatkan Tokoh Masyarakat.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Penataan kelembagaan berbasis kinerja; b. Evaluasi kelembagaan kesesuaian beban kerja organisasi
4.	Penataan Tatalaksana	a. Melakukan reviu terhadap SOP; b. Penyusunan Draft Keputusan Peta Proses Bisnis; c. Penyusunan SOP sesuai Peta Proses Bisnis; d. Melakukan Evaluasi Peta Proses dan Penerapan SOP; e. Melakukan pemuktahiran data dan informasi publik.
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Reviu terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; b. Melakukan Riviu kebutuhan pegawai sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; c. Pemberian reward dan punishment terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi; d. Reviu terhadap standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; e. Pemanfaatan system informasi kepegawaian; f. Melakukan monev kinerja individu secara berkala.
6.	Penguatan Akuntabilitas	a. Memaksimalkan Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Dokumen perencanaan ; b. Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan SKPD dengan Kabupaten c. Melakukan revisi Indikator Kinerja Utama Pejabat Eselon II d. Evaluasi Internal Terhadap Capaian Kinerja SKPD e. Pemenuhan dokumen data dukung capaian target kinerja SKPD f. Memaksimalkan Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN dalam Implementasi SAKIP
7.	Penguatan Pengawasan	a. Membangun komitmen anti Gratifikasi disetiap pelayanan; b. Melakukan identifikasi Risiko SKPD; c. Melakukan peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Aplikasi WBS; d. Meningkatkan Penanganan Pelaporan Benturan Kepentingan; e. Melakukan peningkatan pembangunan Zona Integritas untuk meraih WBK
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Evaluasi atas Pengembangan system informasi layanan masyarakat; b. Meningkatkan informassi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c. Meningkatkan nilai atas persepsi Kualitas Pelayanan Publik. d. Pengembangan Aplikasi Layanan untuk mempermudah pelayanan

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/161-LHE/Irban IV/Insp/2022 tanggal 10 Juni 2022 Hal Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nilai 33,61 (92,59%) dengan kategori AA (Istimewa), berikut ini disajikan tabel hasil penilaian mandiri Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL EVALUASI	
		Nilai	%
1	2	3	4
A	Aspek Pemenuhan		
1	Manajemen perubahan	1,96	98,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	100,00
4	Penataan Tatalaksana	0,83	83,00
5	Penataan Manajemen SDM	1,32	94,29
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	100,00
7	Penguatan Pengawasan	2,03	92,27
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,95	78,00
Jumlah		13,59	93,08
B	REFORM		
1	Manajemen Perubahan	3,00	100,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	100,00
4	Penataan Tatalaksana	3,26	86,93
5	Penataan Manajemen Sdm	1,25	62,50
6	Penguatan Akuntabilitas	3,41	90,93
7	Penguatan Pengawasan	1,85	94,87
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	100,00
	JUMLAH	20,02	92,26
Total Jumlah Komponen Pengungkit		33,61	92,59

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan *clean governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah daerah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Dalam rangka upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat, maka diperlukan komitmen bersama antara Pimpinan dan jajarannya untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN.

Disamping itu, selain komitmen bersama, pimpinan sebagai *role model* dapat menjadi panutan bagi PNS di Lingkup Sekretariat Daerah dengan membangun Nilai Budaya bagi seluruh Aparatur Sekretariat Daerah dalam bentuk slogan Budaya yaitu:

- **INTEGRITAS** dengan konsisten dalam setiap tindakan
- **PROFESIONAL** dalam melaksanakan tugas
- **AKUNTABEL** dengan sikap yang mampu mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan melaksanakan tugas

D. Produk Layanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu Bupati antara lain dalam melaksanakan

pelayanan administratif melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Adapun jenis pelayanan sebagaimana maksud tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
1.	Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1) Memfasilitas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 2) Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 4) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; 5) Memfasilitasi layanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; 6) Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil UKPBJ; 7) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota; 8) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, E-Katalog, E-Monev, SIKaP; dan 9) Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
2.	Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat	1) Pemberian bantuan hibah bagi tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 2) Sosialisasi kelengkapan administrasi dan tata cara penyaluran dana; hibah daerah kepada pengurus tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hibah daerah untuk tempat ibadah dan lembaga/ organisasi keagamaan; 4) Fasilitas kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan; 5) Pemberian insentif bagi guru-guru TPA, Madrasah Diniyah (MADIN), Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama; 6) Fasilitas pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan bagi Penyuluh Agama; 7) Fasilitas penyelenggaraan Ibadah Haji; 8) Fasilitas pemberian bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama); 9) Fasilitas kegiatan keagamaan (MTQ, Betamat Al Qur'an, Wisuda Santri, Hari Santri Nasional, MQK, PORSADIN, FASI dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama) bagi organisasi/lembaga keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 10) Pembinaan bagi lembaga/organisasi keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 11) Fasilitas Tausiyah Keagamaan lingkup Sekretariat Daerah;



NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		12) Fasilitas pelaksanaan seleksi dan Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut; dan 13) Fasilitas Penetapan Kepengurusan LPTQ, PHBI, Masjid Agung Syuhada dan PESPAWARI Kabupaten Tanah Laut.
3.	Pelayanan Bagian Pemerintahan	1) Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; 2) Fasilitas Kerjasama Daerah; 3) Sosialisasi Penyusunan IKK LPPD; 4) Fasilitas Kegiatan <i>Coffe Morning</i> ; 5) Fasilitas Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Kabupaten; 6) Fasilitas Penyusunan LKPJ/LPPD; 7) Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; dan 8) Fasilitas Administrasi Pimpinan dan PAW Anggota DPRD.
4.	Pelayanan Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	1) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BUMD dengan Pemerintah Daerah; 2) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BLUD dengan Pemerintah Daerah; 3) Fasilitas kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD; 4) Fasilitas kegiatan penyusunan Kajian/Analisa Investasi Pemerintah Daerah; 5) Mengkoordinasikan kegiatan promosi produk unggulan daerah; 6) Mengkoordinasikan kegiatan penyaluran Kredit Modal Kerja Tanpa Bunga Program Gapura Karomah; 7) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait UMKM; 8) Fasilitas dan koordinasi kegiatan pengembangan perekonomian lintas sektoral; 9) Memfasilitasi kegiatan koordinasi dan pelaporan Administrasi Pembangunan; 10) Memfasilitasi kegiatan koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain-lain); 11) Fasilitas kegiatan pengendalian distribusi gas bersubsidi; dan 12) Memfasilitasi kegiatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
5.	Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1) Memfasilitasi Protokol Kegiatan Pimpinan; 2) Memfasilitasi Protokol Tamu Daerah; 3) Memfasilitasi Pembuatan Video Pimpinan; 4) Dokumentasi Kegiatan Pimpinan; 5) Memfasilitasi Pemberitaan Kegiatan Pimpinan; dan 6) Memfasilitasi Pembuatan Naskah Pidato.
6.	Pelayanan Bagian Hukum	1) Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah; 2) Memfasilitasi Bantuan Hukum dan HAM; 3) Konsultasi dan Pengkajian Hukum; dan 4) Koreksi draft MoU, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Keperdataan lainnya.
7.	Pelayanan Bagian Umum	1) Memfasilitasi Penyewaan Gedung; 2) Memfasilitasi Penyewaan Bus; 3) Pelayanan Tamu Daerah; 4) Memberikan Pelayanan Surat Menyurat; 5) Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		6) Memberikan Pelayanan dan Penyimpanan Arsip di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.	Pelayanan Bagian Organisasi	1) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja; 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3) Pendampingan Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab; 4) Pendampingan Penyusunan SOTK dan Tupoksi/Uraian Tugas Jabatan SKPD; 5) Pembuatan ID Card Pegawai; 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 7) Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 8) Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP).
9.	Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan	1) Fasilitasi Pembayaran Pendapatan/Gaji dan Tunjangan Operasional Pimpinan; 2) Fasilitasi Pembayaran Pendapatan/Gaji dan TPP ASN Sekretariat Daerah; 3) Fasilitasi Penyusunan Renja Sekretariat Daerah; 4) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Keuangan; 5) Fasilitasi Penyusunan Manajemen Risiko; dan 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

Diharapkan dengan layanan yang telah dilaksanakan oleh Bagian-bagian dapat memberikan pelayanan secara maksimal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut baik bagi masyarakat, instansi vertikal maupun untuk layanan Perangkat Daerah.

E. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian sasaran strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program).

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 sekaligus menjadi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang **“BERINTERAKSI”**

- **Berkarya**
- **Inovasi**
- **Tertata**
- **Religius**
- **Aktual**
- **Sinergi**

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Sekretariat Daerah diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Oleh karena itu, sebuah Visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian Misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah;

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan

seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahtraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi,

dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Misi

1. **Berkarya** meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
2. Menciptakan **inovasi** di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
3. Membangun **tata** kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas **religiusitas** dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun **sinergitas** yang baik antartingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke:

1. **Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;**
2. **Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;**
3. **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);**

5. **Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Penetapan tujuan strategis ini dapat menjadi sarana bagi Sekretariat daerah untuk secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh segenap jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Sekretaris Daerah kepada Bupati Tanah Laut atas capaian kinerja untuk indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diharapkan dapat dijadikan sarana bagi Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah memberikan akses terhadap pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan Tujuan Strategis yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga;
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga;
3. Meningkatkan inovasi dalam Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik;
5. Meningkatnya Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaran pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan,

Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;

11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi;
12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spritual, Kesejahteraan social dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat;
13. Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi;
14. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam.

Sasaran Strategis yang telah dirumuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra sebanyak 40 (Empat Puluh) Sasaran adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	BAIK (85)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	81	81.5	82	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	100%	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi



Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	BAIK (75)	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	ST 3,075	ST 3,100	ST 3,125	ST 3,150	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	75	80	85	90	100	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	85	90	95	100	100	
	Meningkatnya Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	BB (85)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
					Nilai ZI Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	
	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta Administrasi Kewilayahan	Persentase kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
					Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan



				Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	70%	80%	90%	100%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	10%	20%	30%	40%	50%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
					Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi



				Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n, pemanatauan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Persentase kualitas penyelenggaraan, pemanatauan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100%	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Peresentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	-	-	-	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum



	Perengkapan serta Umum dan Rumah Tangga			Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92-	Bagian Umum
					Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	65%	75%	85%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa



			Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	-	-	100%	5%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	100%	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
			Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
			Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
			Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 76	Bagian Hukum
Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraa n pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebaran informasi/pemberit aan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



					Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKP D/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	100%	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat



Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi	Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	100%	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahna terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	60%	75%	75%	75%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	60%	75%	75%	75%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	-	-	80%	80%	85%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu, indikator kinerja utama digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum
2.	Inovasi Publik yang diciptakan SKPD	Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan	Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan dalam kompetisi Inovasi	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
3.	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	Skor yang diperoleh dari hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri	Sekretaris Daerah dan Kabag Pemerintahan
4.	Meningkatkannya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Presentase SKPD dengan nilai RB minimal B	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan Nilai RB Minimal B}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Presentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris Daerah dan Kabag Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian SPIP oleh BPKP Prov. KAL-SEL dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris Daerah dan Kabag Perencanaan dan Keuangan
7.	Meningkatnya tata kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
8.	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	$\frac{\sum \text{kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dihasilkan}} \times 100\%$	Sekretaris Daerah dan Kabag Perekonomian, Administrasi Pembangunan Sumber Daya Alam

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

untuk Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Tahun 2022 (data terlampir)

E. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudkan komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 yang telah disepakati baik oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dan Pelaksana Lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II dalam hal ini Sekretaris Daerah dapat dilihat dibawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP

Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bupati Tanah Laut

H. SUKAMTA

Pelaihari, 03 Januari 2022
Sekretaris Daerah

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 19640425 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5
2.	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1
3.	Meningkatnya Skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,125
	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	90
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	95
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	84
4.	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.656.895,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 20.880.184.065,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 107.000.000,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.799.537.217,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 426.925.104,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.608.864.964,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.605.734.616,-
		8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 1.135.372.676,-
		9. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 2.362.800.000,-
		10. Penataan Organisasi	Rp 345.032.464,-
		11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	Rp 564.999.206,-



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

		Pimpinan	
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 1.506.408.647,-
		2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 29.062.490.932,-
		3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 600.704.402,-
		4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 99.974.265,-
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 199.775.476,-
		2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 117.240.082,-
		3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 813.284.110,-

Bupati Tanah Laut

H. SUKAMTA

Pelaihari, 03 Januari 2022
Sekretaris Daerah

Des. H. DAHMAL KIFLI, M.AP
NIP. 19640425 198703 1 012

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Eselon II Asisten, Eselon III Kepala Bagian, Eselon IV Kasubbag, dan Pelaksana lingkup Sekretariat Daerah (Data Terlampir).

F. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.307.185	10.039.362	7.917.500 (79%)	Perencanaan dan Keuangan
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.349.710	10.349.710	8.168.400 (79%)	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	20.871.184.320	21.671.184.320	19.697.014.310 (91%)	Perencanaan dan Keuangan
		- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	8.999.745	8.999.745	8.141.300 (90%)	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Umum
		- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	25.000.000	0%	Umum
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.000.000	82.000.000	3.850.000 (5%)	Umum
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Umum
		- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	119.125.462	119.123.795	111.428.500 (94%)	Umum



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.879.941	157.879.941	136.285.050 (86%)	Umum
		- Penyedia Bahan Logistik Kantor	308.202.608	336.037.877	274.139.580 (82%)	Umum
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	84.759.206	96.363.449	90.657.000 (94%)	Umum
		- Penyedia Bahan/Material	30.000.000	39.980.000	18.000.000 (45%)	Umum
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	74.970.000	74.970.000	17.650.000 (24%)	Umum
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.024.600.000	2.951.250.000	2.914.160.260 (99%)	Umum
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Umum
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.925.104	828.019.412	756.491.358 (91%)	Umum
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.627.124.564	1.687.079.048	1.403.273.421 (83%)	Umum
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.280.000	528.530.500	441.292.000 (83%)	Umum
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.460.400	3.613.460.400	3.540.470.512 (98%)	Umum
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.930.347	233.930.347	232.944.765 (100%)	Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.546.656.019	1.806.241.019	1.801.801.915 (100%)	Umum
		- Pemelihara Mabel	20.000.000	20.000.000	17.910.000 (90%)	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	518.623.050	1.231.106.436	1.215.970.648 (99%)	Umum



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	286.525.200	374.525.200	348.396.500 (93%)	Umum
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	820.886.176	820.886.176	766.483.636 (93%)	Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.486.500	94.486.500	93.300.000 (99%)	Umum
		- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000	220.000.000	0%	Umum
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	753.290.000	860.375.000	828.412.500 (96%)	Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	560.675.000	657.555.000	655.336.000 (100%)	Umum
		- Penyedia Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.048.835.000	1.302.160.000	1.294.581.627 (99%)	Umum
		Kegiatan Penataan Organisasi				Organisasi
		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	117.231.862	117.226.852	78.260.873 (67%)	Organisasi
		- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	117.325.689	117.325.689	97.524.800 83%	Organisasi
		- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	110.474.913	123.274.913	97.114.202 (79%)	Organisasi
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Keprotokolan	189.708.730	299.706.344	283.644.476 (95%)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	169.757.800	319.752.800	293.624.956 (92%)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	205.532.676	437.156.830	409.215.965 (94%)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan				Pemerintahan
		- Penataan Administrasi Pemerintahan	1.156.823.947	1.053.422.440	712.494.262 (68%)	Pemerintahan
		- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	229.980.000	290.131.000	264.455.080 (91%)	Pemerintahan
		- Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	119.604.700	164.097.124	160.288.780 (98%)	Pemerintahan
		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah				Pemerintahan
		- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	99.974.256	122.898.240	104.510.650 (85%)	Pemerintahan
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Kesejahteraan Rakyat
		- Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	7.042.116.816	7.042.116.816	7.015.702.900 (100%)	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	19.932.789.409	20.439.843.565	20.036.513.850 (98%)	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.087.584.707	3.298.391.580	2.957.048.442 (90%)	Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum				Hukum
		- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	239.989.353	939.963.285	688.762.976 (73%)	Hukum
		- Fasilitas Bantuan Hukum	203.924.241	289.424.241	135.148.400 (47%)	Hukum
		- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	156.790.808	254.519.532	214.646.660 (84%)	Hukum
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	99.839.150	241.839.150	199.106.900 (82%)	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	99.936.326	204.436.326	202.957.000 (99%)	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	117.240.082	162.840.082	151.229.000 (93%)	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	299.708.039	360.007.634	323.443.651 (90%)	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	227.412.584	281.683.800	261.865.500 (93%)	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	286.163.487	386.151.152	317.151.237 (82%)	Pengadaan Barang/Jasa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban selama Tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas sasaran - sasaran kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022. Selain itu, realisasi keuangan yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2022.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

1.1 . Sasaran RPJMD akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan instansi Pemerintah. Dimana Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2022 mengampu Misi Ke-1, Misi Ke-2, Misi Ke-3 dan Misi Ke-5 RPJMD sebagai berikut :

Tabel Sasaran RPJMD Sekretariat Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	90	100	111,11	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB	100	100	100	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	92.98	114%	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum
4	Inovasi Publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	10	1000%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
5	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	Sekretaris Daerah dan Kabag Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022

1. SASARAN Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai RB Minimal B

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
1.	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	90	100	111,11	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima; dan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) telah dilaksanakan terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi yaitu manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan quick wins.

Atas penerapan Reformasi Birokrasi tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh SKPD sebanyak 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan 1 (satu) UPTD RSUD. H. Boedjasin Pelaihari yang dimulai sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022. Hasil evaluasi untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interpretasi
AA	8	12,5	Istimewa
A	9	20	Sangat Baik
BB	12	25	Baik
B	12	10	Cukup Baik

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh SKPD (40 SKPD) telah mendapatkan nilai RB minimal B (Cukup Baik) atau sebesar 100%. Di dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut telah ditargetkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi adalah 73 (Baik). Ini merupakan Tahun ke-4 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan evaluasi oleh KemenpanRB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk Hasil evaluasi Tahun 2022 sampai saat ini belum disampaikan oleh KemenpanRB kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 adalah 60,06 dengan kategori Cukup Baik.

Terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu pada Tahun 2021 terdapat 27 SKPD dengan nilai RB minimal B (Cukup Baik) atau sebesar 67,5% dari seluruh SKPD (40 SKPD). Berikut disajikan rekapitulasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

Tabel Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interpretasi
AA	5	12,5	Istimewa
A	8	20	Sangat Baik
BB	10	25	Baik
B	4	10	Cukup Baik
CC	3	7,5	Cukup
C	7	17,5	Buruk
D	3	7,5	Sangat Buruk

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2021*

2. SASARAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB	100	100	100%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya maksimal dari tahun ke tahun dalam menerapkan SAKIP. Ini dapat dilihat dari terus meningkatnya SKPD dengan hasil evaluasi SAKIP minimal BB. Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interprestasi
A	6	15	Memuaskan
BB	34	85	Sangat Baik

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2022 seluruh SKPD atau sebesar 100% telah mendapatkan nilai SAKIP minimal BB atau dengan nilai di atas 70. Terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2021 dimana pada Tahun 2021 terdapat 37 SKPD atau sebesar 92,5% dengan nilai SAKIP minimal BB, 3 SKPD dengan nilai SAKIP Baik dan

tidak ada lagi SKPD yang memiliki nilai SAKIP dibawah Baik. Ringkasan evaluasi SAKIP Tahun 2021 sebagai berikut

Rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2021

oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interprestasi
A	7	17,5	Memuaskan
BB	30	75	Sangat Baik
B	3	7,5	Baik

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2022*

Di dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut telah ditargetkan untuk NILAI SAKIP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah A (81), ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi seluruh SKPD terutama bagi Tim SAKIP Kabupaten untuk merealisasikannya. Dengan melihat hasil evaluasi SAKIP di atas semoga saja nilai SAKIP Kabupaten dapat terealisasi sesuai target. Sampai saat ini LHE hasil evaluasi SAKIP dari KemenpanRB belum disampaikan oleh KemenpanRB kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia.

Indikator ini juga merupakan indikator Sekretaris Daerah, dimana Sekretariat Daerah merupakan fasilitator pelaksanaan SAKIP Kabupaten dan Sekretariat Tim SAKIP Kabupaten.

3. SASARAN Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya						
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	92.98	92.98	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dengan tersedianya data penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan hasilnya dapat bermanfaat sebagai :

1. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya pemenuhan kinerja pelayanan.
2. Diketuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Diketuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
5. Diketuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun sebelumnya.
7. Diketuinya Survey Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada unit kerja yang telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan responden menurut tugas dan fungsi Bagian tersebut, hasil Survey tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel. SKM Sekretariat Daerah Triwulan I

NO	BAGIAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NILAI
1	ORGANISASI	91	90	82	100	89	89	90	87	93	90,02
2	PENGADAAN BARANG/JASA	92	97	87	107	91	96	95	94	107	89,01
3	PEMERINTAHAN	83	94	78	99	96	81	93	80	98	89,02
4	PEREKOMIAN, ADM. PEMBANGUNAN & SDA	75	75	75	76	75	75	75	75	77	75,26
5	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	102	107	108	110	104	107	10	106	108	88,80
6	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	105	103	100	112	105	103	10	104	109	90,52
7	UMUM	37	38	38	40	36	38	39	38	40	95,46
8	HUKUM	67	65	65	68	67	66	66	67	67	97,61
9	KESEJAHTERAAN RAKYAT	81	77	75	97	81	81	78	70	90	81,03
	JUMLAH	733	746	708	809	744	736	74 6	724	789	87,74

KETERANGAN	NILAI HASIL PELAYANAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
2. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
3. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
4. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
5. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
6. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
7. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
8. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
9. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
10. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
11. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
12. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
13. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
14. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
15. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
16. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
17. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
18. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
19. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
20. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
21. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
22. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
23. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
24. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
25. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
26. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
27. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
28. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
29. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
30. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
31. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
32. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
33. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
34. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
35. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
36. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
37. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
38. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
39. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
40. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
41. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
42. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
43. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
44. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
45. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
46. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
47. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
48. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
49. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
50. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
51. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
52. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
53. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
54. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
55. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
56. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
57. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
58. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
59. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
60. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
61. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
62. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
63. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
64. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
65. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
66. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
67. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
68. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
69. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
70. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
71. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
72. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
73. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
74. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
75. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
76. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
77. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
78. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
79. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
80. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
81. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
82. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
83. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
84. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
85. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
86. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
87. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
88. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
89. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
90. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
91. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
92. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
93. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
94. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
95. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
96. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
97. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
98. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
99. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
100. Skor Per Lokasi	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10

Tabel. SKM Sekretariat Daerah Triwulan II

NO	BAGIAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NILAI
1	ORGANISASI	354	355	337	406	345	345	345	338	408	87,96
2	PENGADAAN BARANG/JASA	34	34	33	40	33	33	32	32	40	86,30
3	PEMERINTAHAN	54	56	53	67	55	55	56	54	68	84,56
4	PEREKOMIAN, ADM. PEMBANGUNAN & SDA	32	31	32	35	30	29	29	30	36	87,57
5	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	86	86	85	104	87	86	86	82	104	86,03

6	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	179	178	171	198	175	174	174	186	200	90,74
7	UMUM	283	290	344	334	287	344	290	344	294	90,67
8	HUKUM	37	35	32	40	34	34	36	32	40	88,80
9	KESEJAHTERAAN RAKYAT	98	93	92	116	93	93	97	95	120	82,97
	JUMLAH	1157	1158	1179	1340	1139	1193	1145	1193	1310	88,26



Tabel. SKM Sekretariat Daerah Triwulan III

NO	BAGIAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NILAI
1	ORGANISASI	106	111	111	119	108	106	106	105	113	91,11
2	PENGADAAN BARANG/JASA	116	114	115	119	115	117	116	113	118	96,48
3	PEMERINTAHAN	111	109	109	118	109	109	110	105	106	91,21
4	PEREKOMIAN, ADM. PEMBANGUNAN & SDA	118	118	118	120	118	118	118	117	120	98,51
5	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	94	94	91	107	92	91	90	90	103	87,57
6	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	113	113	112	120	112	111	112	111	120	94,72
7	UMUM	99	97	96	117	98	95	97	91	103	82,51
8	HUKUM	116	115	115	120	116	116	115	113	120	96,76
9	KESEJAHTERAAN RAKYAT	115	113	112	120	114	114	116	113	119	95,83
	JUMLAH	988	984	978	1060	982	977	980	958	1022	92,80



Tabel. SKM Sekretariat Daerah Triwulan IV

NO	BAGIAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NILAI
1	SEKRETARIAT DAERAH	483	489	491	501	494	482	502	490	491	92,98
	JUMLAH	483	489	491	501	494	482	502	490	491	92,98



Gambaran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 pada Triwulan I dengan nilai 87,74, Triwulan II dengan nilai 88,26, Triwulan III dengan Nilai 92,80 sedangkan Triwulan IV dengan nilai 92,98. Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I s.d II masuk dalam kategori **“BAIK”** sedangkan Triwulan II s.d IV meningkat dengan kategori **SANGAT BAIK**. Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Triwulan I masih dilaksanakn secara

manual dengan menyebarkan lembar kuisioner kepada para responden kemudian diisi. Kemudian Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Triwulan II s.d Triwulan IV sudah menggunakan fitur *google formulir*, dimana link dari *google formulir* tersebut akan disebarakan kepada para responden. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien, karna responden dapat mengisi kuisioner lebih fleksibel dan hasil akan langsung terhubung dengan *google drive* sehingga dapat menghemat kertas.

4. SASARAN Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD

Indikator : Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-2 : Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif						
1	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	10	1000%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada Tujuan dari Inovasi Pelayanan Publik, yaitu:

- 1) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik;
- 2) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- 4) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Target kinerja inovasi yang didaftarkan untuk Tahun 2022 adalah 1 inovasi, dengan realisasi 10 inovasi yang diikutsertakan pada Innovative Government Award (IGA) 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Serta 2 inovasi yang

diikutsertakan pada KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan yang lolos seleksi administrasi Sinovik Kemenpan RB Tahun 2022 adalah 1 inovasi yaitu Silakas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapaun 2 inovasi yang diikutsertakan pada KIPP adalah termasuk juga inovasi yang diikutsertakan pada IGA Tahun 2022. Untuk capaiannya adalah 1000%.

Berikut adalah perbandingan jumlah inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2020-2022.

Tabel Perbandingan Jumlah Inovasi dari Tahun 2020-2022

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Inovasi SKPD	13	40	17

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dari Tahun 2020 s.d 2022, yaitu dengan total jumlah inovasi 70 inovasi. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Bupati Tanah Laut yang meminta kepada SKPD dan jajarannya agar terus dapat menciptakan inovasi-inovasi pada SKPD yang nantinya mempermudah dalam pelayanan publik.

Inovasi merupakan salah satu indikator sasaran dalam RPJMD dan penghargaan yang diterima adalah indikator tujuannya. Pada Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut telah meraih predikat Pelayanan Prima (A) dengan nilai 4,53. Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2022 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori B (kualitas tinggi) dengan nilai kepatuhan 86,61 zonasi HIJAU.

5. SASARAN Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan

Indikator : Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan

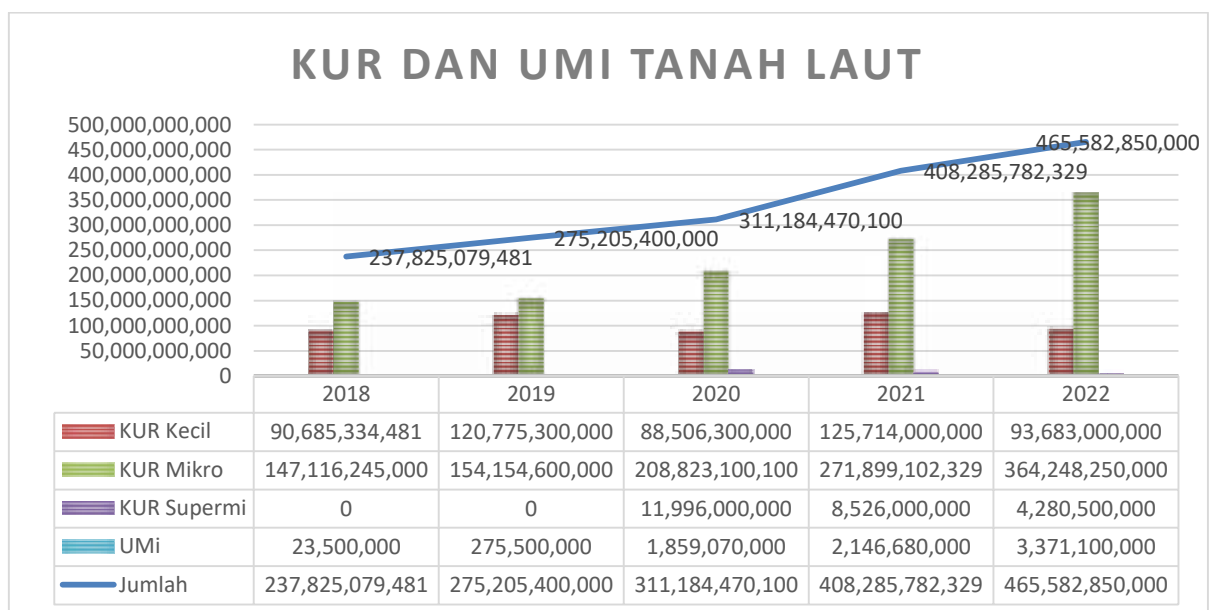
NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-5 : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
1	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	Sekretaris Daerah dan Kabag Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

Pada akhir Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut berhasil pulih dan tumbuh 3,47% di tengah gelombang kedua Covid 19 akibat adanya varian Delta, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan nasional sebesar 3,69%. Akselerasi pemulihan ekonomi di Tahun 2022 utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi di Kabupaten Tanah Laut yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong *confidence* masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi. Namun ada permasalahan lain yang harus disikapi dengan kebijakan dari Pemerintah daerah agar Perekonomian Daerah tetap tumbuh. Tingginya angka kredit bermasalah (NPL) program Gapura Karomah dampak dan lainnya akibat dari pembatasan perlu untuk disikapi dengan teliti, cepat, dan serius. Dalam hal terkait perekonomian. Oleh karena itu terdapat beberapa kebijakan yang dirancang untuk menjaga perekonomian tetap berjalan. Kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah antara lain melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian relaksasi kredit kepada debitur Gapura Karomah, evaluasi dan monitoring dan pendampingan kepada debitur program Gapura Karomah yang masih bermasalah, tindak lanjut rencana penambahan investasi Pemerintah Daerah Kepada BUMD PT. BPD Kalimantan Selatan, PT. BPR Tanah Laut dan PDAM Tanah Laut, evaluasi kinerja manajemen BUMD secara berkala, sosialisasi dalam rangka peningkatan penyaluran program permodalan berbiaya rendah (KUR dan UMi) dan kebijakan lainnya dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dalam rangka partisipasi menjaga tingkat inflasi daerah provinsi Kalimantan Selatan.



NO	NAMA	JMLH	ORG	PLAFOND
1	PERTANIAN (1001)	938	ORG	9.457.690.000
2	PETERNAKAN (1001)	248	ORG	3.910.000.000
3	PERDAGANGAN (1007)	661	ORG	4.248.500.000
4	PERIKANAN (1002)	34	ORG	210.000.000
5	PERINDUSTRIAN (1004)	27	ORG	145.000.000
	JUMLAH	1908	ORG	17.971.190.000

Tabel Realisasi Program Gapura Karomah s.d. 30 Desember Tahun 2022





PERBANDINGAN ANTARA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN/RPJMD DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022



NO	IKU KABUPATEN			IKU SEKRETARIAT DAERAH			IKU			KETERANGAN	
	SASARAN	INDUKTOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SASARAN	INDUKTOR	TARGET	REALISASI		
1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,5	85,65 (BAIK)	110,51%	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	92,98	110%	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah dilaksanakan sesuai Tim <i>group formal</i> SKPD. Survei dilakukan secara berkala dan untuk tahun 2022 hasil SKD Sekretariat Daerah kategori: SANGAT BAIK, namun survei yang dilaksanakan belum optimal serta target yang diharapkan dilaksanakan pada survei berkala 1 dan Triwulan II target <i>Assessment</i> untuk perbaikan.
2	Meningkatkan inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterbitkan	2	10	500%	Inovasi publik yang diadopsikan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang diadopsikan	1	10	1000%	Inovasi yang diterbitkan pada aspek <i>INOVASI</i> (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik) adalah 2 inovasi yaitu <i>SI.AKAS</i> dan <i>DIKAS</i> . Dari 2 inovasi tersebut yang telah lolos <i>assessment</i> adalah <i>SI.AKAS</i> .
3	-	-	-	-	-	Meningkatkan skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	81 8,125	Nilai belum terbit dari Kemendagri	Nilai belum terbit dari Kemendagri	Selengkapnya dengan belum terbitnya Nilai LPPD Kabupaten Tahun Last dan Konsekuensi untuk LPPD Kabupaten Tahun Last tidak ada nilai.
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik	Nilai Skor Akuntabilitas Kinerja Daerah (Kategori)	81 (A)	(B)	Nilai belum terbit dari Kemendagri	Meningkatkan Persentase RRI Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RRI minimal B	90%	100%	111,11%	Hasil evaluasi RRI tahun SKPD pada tahun 2021 adalah: 1. 8 SKPD dengan kategori A; 2. 9 SKPD dengan kategori B; 3. 12 SKPD dengan kategori BB; 4. Dan 11 SKPD dengan kategori D. Selengkapnya dengan SKPD yang mendapatkan nilai BB minimal 3.
5						Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	100%	100%	Hasil evaluasi SAKIP tahun SKPD pada tahun 2021 adalah: 1. 4 SKPD dengan kategori A; 2. 14 SKPD dengan kategori BB.



											Salah satu SKPD telah melaksanakan nilai SASIP sesuai BB.
6	-	-				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SASIP Sekretariat Daerah	83	84.2	101.44%	<p>Berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/251-LIB/ AKIP/Insip/2022 hal. Laporan Hasil Evaluasi AKIP, Nilai SASIP Sekretariat Daerah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 24.99% dari Bobot 50% 2. Pelaksanaan Kinerja 24.99% dari Bobot 50% 3. Pelaporan Kinerja 12.495% dari Bobot 15% 4. Evaluasi Internal 21.675% dari Bobot 25% <p>Dengan demikian Capaian skor SASIP tahun ini sesuai dengan bobot masing-masing komponen SASIP meliputi SASIP Sekretariat Daerah dengan kategori A (Memuaskan)</p>
	-	-					Nilai SPDP Sekretariat Daerah	3.6	TAHAP BASELINE SPDP	TAHAP BASELINE SPDP	<p>Untuk Tahun 2022 masih dalam Tahap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Baseline SPDP Terintegrasi 2. Evaluasi Akurasi SPDP 3. Pengukuran Data Awal terkait Tatanan dan Sistem serta Program dan Kegiatan 4. Pengisian Kertas Kerja mengenai Aplikasi SPDP Terintegrasi 5. Penilaian Mandiri Matriks SPDP Terintegrasi Sekretariat Daerah 6. Penyeleksiapan Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2022 oleh RPKP Perencanaan PRR

											Ketel dan Inspektur Kab. Tanah Laut Dengan demikian Tahun 2022 belum dilakukan penilaian Level Matriks SPDP Terintegrasi terhadap SKPD
7	-	-				Meningkatnya Tata Kelola Karyawan/staf yang baik meliputi Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	91	92.59	101.7%	<p>Berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/141-LIB/Insip/2022 hal. Laporan Hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPBR), Nilai RB Sekretariat Daerah, ada beberapa Area Perubahan yang belum Optimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Tata Laksana dengan hasil 0.0% dari target bobot 100% 2. Peningkatan Kualitas pelayanan publik dengan hasil 10% dari bobot 100% <p>Untuk Area Reformasi RB yang belum optimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Tata Laksana dengan hasil 55.95% dari target bobot 50% 2. Penataan sistem manajemen SDM dengan hasil 62.5% dari bobot 100% <p>Dengan demikian Capaian Hasil RB Sekretariat Daerah Tahun 2022 belum Optimal karena ada beberapa area yang belum tercapai dengan maksimal sehingga hasil dari Area Perubahan RB meliputi RB Sekretariat Daerah dalam kategori A (Memuaskan)</p>
	-	-					Nilai ZI Sekretariat Daerah	84	87.74	104.4%	<p>Berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/185-LIB/Insip/2022 period Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Zona Integarasi, Nilai ZI Sekretariat Daerah, ada beberapa Rekomendasi</p>



												<p>Pemenuhan yang telah Optimal :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manajemen Perolehan dengan hasil 3.17 dan bobot 4.2. Pemenuhan tita Lektur dengan hasil 3.29 dan bobot 3.3.3. Pemenuhan Sistem Manajemen ISOI dengan hasil 3.44 dan bobot 1.4. Pemenuhan Pengawasan dengan hasil 3.48 dan bobot 7.5.5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik dengan Hasil 3.32 dan bobot 1. <p>Untuk Komponen Reform 23 yang telah optimal :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan Sistem Manajemen ISOI dengan hasil 3 dan bobot 1.2. Pemenuhan Kualitas pelayanan publik dengan hasil 3.17 dan bobot 1. <p>Dengan demikian Capaian Hasil 23 Sekretariat Daerah Tahun 2022 telah mencapai skor rata-rata sebagai Ajar Komponen 23 yang telah tercapai dengan maksimal bobotnya baik untuk Komponen Pemenuhan maupun Komponen Reform 23 sehingga 23 Sekretariat Daerah dengan nilai 87.74%</p>
II	Meningkatnya Kinerja unit kerja sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor pertanian	3.52	1.81	58.42%	Meningkatnya Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan	Persentase kebijakan perencanaan dan pembangunan yang ditargetkan	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas Pelaksanaan Program Gapsa Kermah untuk sektor Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, Perikanan dan Industri Pengolahan2. Meningkatkan Prasyarat KUR bidang LU Pertanian, LU Perikanan, LU Akomodasi, Penyediaan Saluran dan sarana dan LU Industri Pengolahan	
	Pertumbuhan sektor industri olahan	7.58	5.01	66.09%								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3.50	3.47	99.14%							
												<ol style="list-style-type: none">3. Telah dilaksanakan kegiatan promosi produk unggulan daerah pada event regional kabupaten selama dua minggu sebanyak 3 kali

2.1 Eselon II (Sekretaris Daerah)

Dari target Indikator Kinerja Utama Eselon II (Sekretaris Daerah) yang telah selaras dengan **Sasaran RPJMD**, maka uraian dan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	92.98	114%
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	10	1000%
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,125	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	90	100	111,11%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	100	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	101.44%

		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	91	92.59	101.7%
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	84	87.74	104.4%
8	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	92.98	114%

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memberikan amanat kepada seluruh penyelenggara pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Sebuah instansi dalam pelayanan publik sangat tergantung dengan sejauh mana sumber daya manusia yang terdapat dalam instansi tersebut dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya mengikuti perkembangan dan berupaya selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

NILAI SKM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021		NILAI SKM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022	
SEMESTER I	SEMESTER I	SEMESTER I	SEMESTER II
86.73	87.12	88	92.98

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut secara umum dikategorikan baik hal tersebut dapat dilihat dari hasil SKM pada Semester I Tahun 2021 dengan nilai 86,73 dengan kategori baik, sedangkan pada Semester II Tahun 2021 nilai Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut 87,12 dengan kategori Baik, hal tersebut ada peningkatan sebesar 1,0% , meskipun peningkatan tersebut tidak signifikan.

Pada Tahun 2022 kembali Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Semester I dengan nilai 88 dengan kategori Baik, kemudian pada Semester II Tahun 2022 nilai survei kepuasan masyarakat meningkat dengan nilai 92,98 dengan kategori Sangat Baik.

Kedepannya Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut selalu berupaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap apa yang menjadi kelemahan-kelemahan atas survei kepuasan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut secara umum dapat berjalan dengan lancar, Adapun Kendala, solusi dan Rencana Aksi dapat dilihat pada table dibawah ini ;

Tabel : Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Survei Kepuasan Masyarakat

No	Kendala	Solusi	Rencana Aksi
1	Kurang pahamnya masyarakat terhadap maksud dan tujuan dilakukannya Survei Kepuasan masyarakat	Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Petugas membantu dan mengarahkan tentang tata cara pengisian kuisioner

2	Masing-masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang respon terhadap pelaksanaan SKM	Memberikan pemahaman kepada bagian-bagian pentingnya maksud dan tujuan dilakukannya SKM	Melakukan koordinasi secara intens kepada masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
---	--	---	---

SASARAN 2 Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD

Indikator : Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	10	1000%

Pada Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut telah meraih predikat Pelayanan Prima (A) dengan nilai 4,53. Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2022 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori B (kualitas tinggi) dengan nilai kepatuhan 86,61 zonasi Hijau.

Jumlah inovasi yang didaftarkan di Tahun 2022 pada KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada 2 (dua) Inovasi, yaitu sebagai berikut :

No	SKPD	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Silakas (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone)	2020	Layanan dokumen kependudukan melalui media digital berbasis android yang dapat didownload di playstore.
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Detak (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	2020	Layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke desa-desa untuk memberikan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga setiap warga desa tersebut memiliki dokumen kependudukan yang komplit untuk mewujudkan desa yang tertib administrasi kependudukan.

Pada tahun yang sama juga ada 10 (sepuluh) inovasi yang diikutsertakan pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Inovasi yang didaftarkan itu adalah sebagai berikut :

No	SKPD		Nama Inovasi	Nilai Kematangan	Keterangan
1	Bagian PBJ Sekretariat Daerah		SOSIALITA (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut)	102.00	Sosialita adalah sistem order semua instansi lingkup Tanah laut untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD.
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	SIMFONI (Sistem Informasi Layanan Online)	93.00	Aplikasi yang dirancang sebagai solusi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
		2	SIDIKA (Sistem Informasi Dokumen Kepegawaian)	97.00	Aplikasi yang dibuat dalam rangka mewujudkan tertibnya penatalaksanaan arsip kepegawaian sehingga memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pencarian arsip kepegawaian bagi ASN di Kab. Tala
3	Dinas Kesehatan		SIP OK (Survei Indikator PHBS Online oleh Kader)	97.00	Aplikasi berbasis <i>handphone</i> yang dapat digunakan baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses survei PHBS rumah tangga.
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup melalui nomor WA Pos Pengaduan DPRKPLH	66.00	Memberikan keleluasaan penyampaian pengaduan Lingkungan sebagai informasi awal melalui media Sosial Whatsap, IG, dan seluler Pengaduan DPRKPLH.
		2	LAMPU PJU (Layanan Masyarakat Pengaduan Lampu Penerangan Jalan Umum)	68.00	Sistem teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp yg sdh terdapat di smartphone dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam pelaporan kerusakan dan gangguan pada lampu penerangan jalan umum.
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	SILAKAS (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone)	102.00	Layanan dokumen kependudukan melalui media digital berbasis android yang dapat didownload di playstore.
		2	DETA (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	86.00	Layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke desa-desa untuk memberikan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga setiap warga desa tersebut memiliki dokumen kependudukan yang komplit untuk mewujudkan desa yang tertib administrasi kependudukan.
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		PUSPAGA (Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga)	57.00	Puspaga sebagai wadah untuk penyelesaian permasalahan keluarga termasuk tempat konsultasi terkait anak dengan lebih komprehensif dan dengan mengoptimalkan kehadiran Puspaga diharapkan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut bisa mempunyai ketahanan keluarga yang kuat dan utuh.

7	RSUD H. Boejasin		BISA (Boejasin Information System & Applications)	72.00	Aplikasi ini untuk mengakses informasi maupun layanan kesehatan di RSUD H. Boejasin Pelaihari. Aplikasi BISA dapat didownload di google playstore dengan menu pencarian "BISA BOEJASIN"
---	------------------	--	---	-------	---

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen akan terus meningkatkan inovasi-inovasi di segala sendi kehidupan terutama inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Timbulnya kesadaran dari ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
- 3) Mempersingkat panjangnya birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Setiap SKPD membuat inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut atau Keputusan Bupati Tanah Laut.

Dengan adanya inovasi SKPD, hal ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja perangkat daerah pada Tahun 2023, dimana ke depannya bagi SKPD yang telah memiliki inovasi maka akan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah itu sendiri dan akan mendapatkan *reward* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- 2) Melakukan pembinaan inovasi dalam kompetisi sehingga akan mendorong SKPD untuk memunculkan inovasinya lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan berkualitas.
- 3) Menginventarisir inovasi-inovasi yang ada di SKPD, inovasi pada SKPD mana saja yang sudah memasuki 2 tahun pengimplementasiannya untuk diikutsertakan pada ajang KIPP Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

SASARAN 3.1 Meningkatnya Skor LPPD Kabupaten

Indikator : Skor LPPD Kabupaten

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,100	Nilai Belum Terbit Dari KEMENDAGRI	Nilai Belum Terbit Dari KEMENDAGRI

Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berupa pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk pembentukan Tim Penyusun LPPD, sosialisasi penyusunan, hingga evaluasi yang dilaksanakan ke masing-masing SKPD. Rapat koordinasi terlaksana dengan baik dengan didukung oleh perhatian dan peran aktif dari seluruh stake holder dan SKPD terkait terutama untuk tingkat kehadiran yang tinggi di setiap rapat koordinasi walaupun terdapat beberapa kekurangan di kelengkapan dokumen serta validasi data yang dikumpulkan.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Pemerintahan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pedangan anggaran sebesar Rp 164.097.124,- dan realisasi sebesar Rp 160.288.780,- (97,68%).

Adapun untuk penilaian / skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2021 nilai / skor dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah belum terbit.

Capaian Skor LPPD Kabupaten Tanah Laut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Skor LPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 s/d 2022

NO	2020	2021	2022
	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Bobot nilai IKK LPPD masih banyak yang capaiannya rendah karena realisasi capaian kinerja di masing-masing IKK dari SKPD yang rendah, kegiatannya tidak ada pelaksanaannya atau belum terakomodir.
- Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Peningkatan kualitas pengumpulan data IKK LPPD dan evaluasi internal seluruh SKPD.
- Memprioritaskan perencanaan usulan kegiatan-kegiatan SKPD yang termasuk pada IKK LPPD untuk dianggarkan di SKPD terkait.
- Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk sosialisasi LPPD kedepannya
- Memprioritaskan perencanaan usulan kegiatan-kegiatan SKPD yang termasuk pada IKK LPPD untuk dianggarkan di SKPD terkait.
- Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD.
- Untuk format LPPD SKPD disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Laporan Kinerja SKPD disusun menjadi satu dengan LPPD SKPD.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan LPPD SKPD Tahun 2022

SASARAN 3.2 Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai RB Minimal B

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
3.2	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	90	100%	111,11%

Persentase SKPD dengan nilai RB minimal Cukup Baik terealisasi sebesar 100% (40 SKPD dari 40 SKPD) dari target 90% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 111,11%. Persentase ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar 70% (28 SKPD dari 40 SKPD). Untuk realisasi Tahun 2022, jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra adalah tercapai sebesar 100% dengan target 100%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase SKPD dengan nilai RB minimal Cukup Baik patelah dilaksanakan kegiatan :

1. Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
2. Penetapan Kepala Perangkat Daerah sebagai Role Model (teladan) dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada seluruh Agen Perubahan dengan tujuan meningkatkan kualitas kemampuan dan integritas individu Agen Perubahan sehingga mampu melaksanakan perannya dengan baik dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Setelah dilakukan bimbingan teknis seluruh Agen Perubahan menyusun Rencana Aksi Perubahan yang akan di implementasikan di seluruh SKPD masing-masing Agen Perubahan.



4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Mengadakan sosialisasi Peraturan Bupati, internalisasi melalui pemasangan papan budaya malu di seluruh Perangkat Daerah, melaksanakan sosialisasi core values dan employer branding Bangga Melayani Bangsa ke seluruh Perangkat Daerah agar dapat di internalisasikan kepada seluruh ASN dan PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

5. Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja

Pelaksanaan evaluasi pengembangan Budaya Kerja dilakukan setiap tahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah.

6. Sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi kepada seluruh SKPD melalui infografis dan program Rabu ReBo (Rabu Reformasi Birokrasi) yaitu program internalisasi RB dengan konten-konten informasi terkait RB yang dirilis setiap 1 minggu sekali.

7. Pelaksanaan PMPRB kepada 40 SKPD

Berikut disajikan nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap 40 SKPD di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan 1 RSUD H. Boejas Pelaihari Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah.

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	SKPD	NILAI PEMENUHAN (14,6)	NILAI REFORM (21,7)	NILAI TOTAL (36,30)	RANKING	PERSENTASE %	KATEGORI
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.30	20.86	35.16	1	96.86	AA
2	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	14.57	19.60	34.17	2	94.13	AA
3	DINAS PARIWISATA	12.69	21.28	33.97	3	93.58	AA
4	SEKRETARIAT DAERAH	13.59	20.02	33.61	4	92.59	AA
5	INSPEKTORAT	13.04	20.56	33.60	5	92.56	AA
6	DPRKPLH	13.46	19.87	33.33	6	91.82	AA
7	BKPSDM	13.73	19.54	33.27	7	91.65	AA
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.74	19.97	32.71	8	90.11	AA
9	KECAMATAN KINTAP	12.42	20.20	32.62	9	89.86	A
10	DPMPTSP	12.70	19.33	32.03	10	88.24	A
11	DP2KBP3A	12.41	19.40	31.81	11	87.63	A
12	DPUPRP	12.49	19.04	31.53	12	86.86	A
13	KECAMATAN PANYIPATAN	12.29	18.63	30.92	13	85.18	A
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.95	19.70	30.65	14	84.44	A
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	11.87	18.69	30.56	15	84.19	A
16	DINAS PERHUBUNGAN	9.95	19.60	29.55	16	81.40	A
17	KECAMATAN TAMBANG ULANG	12.46	16.86	29.32	17	80.77	A
18	BPKAD	9.79	19.03	28.82	18	79.39	BB
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10.51	18.06	28.57	19	78.71	BB
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.70	17.30	28.00	20	77.13	BB
20	DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	9.48	18.43	27.91	21	76.89	BB
21	DINAS KESEHATAN	10.17	17.44	27.61	22	76.06	BB
22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	10.92	16.61	27.53	23	75.84	BB
24	KECAMATAN JORONG	10.19	16.90	27.09	24	74.64	BB
25	KECAMATAN BAJUIN	9.52	17.56	27.08	25	74.60	BB
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.03	17.56	26.59	26	73.25	BB

27	DPMPD	9.43	16.66	26.09	27	71.87	BB
28	KECAMATAN TAKISUNG	10.22	15.83	26.05	28	71.76	BB
29	SEKRETARIAT DEWAN	9.89	15.93	25.82	29	71.13	BB
30	KECAMATAN BATI-BATI	10.29	14.79	25.08	30	69.08	B
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.43	14.93	24.36	31	67.11	B
32	KECAMATAN KURAU	9.26	14.80	24.06	32	66.28	B
33	SATPOL PP	9.87	13.94	23.81	33	65.59	B
34	DINAS SOSIAL	8.72	14.70	23.42	34	64.51	B
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.44	15.85	23.29	35	64.15	B
36	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.99	14.24	23.23	36	63.99	B
37	RSUD H. BOEJASIN	8.98	14.11	23.09	37	63.61	B
38	KECAMATAN BUMI MAKMUR	8.43	14.32	22.75	38	62.67	B
39	KECAMATAN PELAIHARI	7.17	15.58	22.75	39	62.67	B
40	KECAMATAN BATU AMPAR	12.49	10.05	22.54	40	62.09	B
41	DINAS PENDIDIKAN	8.81	13.47	22.28	41	61.37	B

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2022*

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk nilai Reformasi Birokrasi seluruh SKPD telah mendapatkan nilai di atas 60 dengan **Kategori B dengan predikat Cukup Baik.**

Pada Tahun 2022 telah dilakukan PMPRB oleh Inspektorat dengan bantuan aplikasi SiKrebo (yang disediakan oleh Kemenpan dan RB sehingga memudahkan penilaian pelaksanaan RB seluruh SKPD

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum tertanamannya ke seluruh ASN budaya kerja organisasi yang berbudaya kinerja
- Kurangnya memahami dan kurangnya komitmen dari seluruh ASN terhadap penerapan Refromasi Birokrasi.

- Kurangnya peran Agen Perubahan sehingga belum bisa menjadi Role Model atau panutan dalam penerapan reformasi birokrasi di lingkungan pekerjaan sehari-hari.
- Kurangnya peran Tim pelaksana Reformasi Birokrasi dalam rangka internalisasi 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Melibatkan seluruh aparatur Negara terutama Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama pada perubahan pola pikir (*Mind Set*) dan budaya dalam bekerja agar lebih berbudaya kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena inti dari perubahan adalah manusia itu sendiri dalam hal ini adalah aparatur Negara.
- Optimalisasi internalisasi seluruh program Reformasi Birokrasi sampai dengan level organisasi terendah
- Mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk membangun Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman penilaian kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Optimalisasi internalisasi seluruh program Reformasi Birokrasi sampai dengan level organisasi terendah
- Dilaksanakan kembali bimbingan teknis kepada seluruh Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan melalui Kegiatan Penataan Organisasi Sub kegiatan peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar

Rp 123.274.913 dan terealisasi sebesar Rp 97.114.202 atau 78,78% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Tabel Kegiatan Penunjang Kinerja Sub Kinerja dan Reformasi Birokrasi

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	123.274.913	97.114.202	78,78

SASARAN 3.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	100	100%

Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB terealisasi sebesar 100% (40 SKPD dari 40 SKPD) dari target 100% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Mengalami peningkatan sebesar 35 % jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 65% (37 SKPD dari 40 SKPD). Untuk realisasi Tahun 2022, jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra adalah sebesar 100% dengan target 100%. Jadi target akhir Renstra telah tercapai pada Tahun 2022.

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP di Tahun 2022 antara lain :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD yang ditetapkan telah memuat penjabaran kinerja (*cascade down*) hingga level pelaksana.
2. Asistensi Laporan Kinerja seluruh SKPD.



3. Efektifitas program dan kegiatan melalui refocusing program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah berorientasi pada *outcome* bukan sebatas *output*. Terdapat efektifitas program sebesar 30,95% dan kegiatan sebesar 21,78%. Perbandingan jumlah program dan kegiatan antara APBD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :

APBD TAHUN 2021	RKPD TAHUN 2022
Program 223	Program 154
Kegiatan 551	Kegiatan 431
Sub Kegiatan 1.385	Sub Kegiatan 1.222

Sumber: Bappeda Kabupaten Tanah Laut

4. Inspektorat Kabupaten melakukan reviu dan evaluasi SAKIP terhadap 40 SKPD dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

JUMLAH SKPD	KATAGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
6	A	15	Memuaskan
34	BB	85	Sangat Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2022 terdapat 6 SKPD atau sebesar 15% dengan nilai SAKIP kategori A (memuaskan) dan 34 SKPD dengan nilai SAKIP BB (Sangat Baik) atau sebesar 85%.

Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui bantuan aplikasi SAKUNTALA (Sistem AKuntabilitas Kinerja Tanah Laut) yang merupakan inovasi dari Inspektorat Kabupaten.

Berikut table data hasil evaluasi SAKIP seluruh SKPD Tahun 2022 masing-masing komponen.

Tabel 3.3.4
Rekapitulasi Nilasi SAKIP SKPD per komponen Tahun 2022 hasil evaluasi
Inspektorat Kabupaten

NO	NAMA SKPD	KLASTER	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI TOTAL	KATEGORI
1	SEKRETARIAT DAERAH	Tambahan	24.99	24.99	12.495	21.675	84.2	A
2	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Utama	24.00	24.99	12.495	21.675	83.2	A
3	DINAS KESEHATAN	Utama	24.99	24.00	11.505	20.825	81.3	A
4	INSPEKTORAT KABUPATEN	Utama	24.99	24.00	12.000	20.000	81	A
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tambahan	24.99	24.00	11.505	20.000	80.5	A
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Utama	24.99	24.00	11.505	20.000	80.5	A
7	DINAS PARIWISATA	Utama	24.00	24.99	11.505	19.175	79.7	BB
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pendukung	24.99	23.01	11.505	20.000	79.5	BB
9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	Utama	24.99	23.01	11.505	20.00	79.5	BB
10	SEKRETARIAT DPRD	Tambahan	24.00	24.00	11.505	20.000	79.5	BB
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Utama	24.00	23.01	12.000	20.000	79	BB
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Utama	24.00	22.50	11.600	20.000	78.1	BB
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Utama	24.99	23.01	12.000	17.500	77.5	BB
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Utama	23.10	23.70	11.600	18.800	77.2	BB
15	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tambahan	26.01	23.01	11.505	16.675	77.2	BB
16	KECAMATAN TAKISUNG	Tambahan	24.99	24.00	11.505	16.675	77.2	BB
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tambahan	24.00	23.01	11.505	18.325	76.8	BB

18	KECAMATAN BAJUIN	Tambahan	24.99	23.01	10.500	18.325	76.8	BB
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tambahan	23.01	21.99	11.505	20.000	76.5	BB
20	KECAMATAN PELAIHARI	Tambahan	24.00	23.01	10.995	18.325	76.3	BB
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pendukung	24.00	21.99	10.995	17.500	74.5	BB
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pendukung	23.01	23.01	10.500	17.500	74	BB
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pendukung	24.00	21.00	10.500	18.325	73.8	BB
24	KECAMATAN TAMBANG ULANG	Tambahan	24.00	21.00	10.995	17.500	73.5	BB
25	DINAS SOSIAL	Utama	23.01	23.01	10.500	16.675	73.2	BB
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tambahan	22.20	21.00	11.100	18.800	73.1	BB
27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pendukung	21.60	21.90	10.800	18.800	73.1	BB
28	KECAMATAN PANYIPATAN	Tambahan	21.99	23.01	10.500	17.500	73	BB
29	KECAMATAN JORONG	Tambahan	20.40	22.50	11.100	18.800	72.8	BB
30	KECAMATAN BUMI MAKMUR	Tambahan	21.60	21.90	11.000	18.300	72.8	BB
31	DINAS PERHUBUNGAN	Pendukung	23.10	21.60	10.100	18.000	72.8	BB
32	KECAMATAN KURAU	Tambahan	23.01	21.00	10.995	17.500	72.5	BB
33	KECAMATAN BATU AMPAR	Tambahan	21.90	21.60	10.800	18.800	72.3	BB
34	KECAMATAN KINTAP	Tambahan	22.50	21.90	10.800	17.000	72,2	BB
35	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Pendukung	19.50	23.40	11.700	17.500	72.1	BB
36	KECAMATAN BATI-BATI	Tambahan	22.50	20.01	11.600	17.500	71.7	BB
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Utama	21.60	21.00	10.500	17.500	70.6	BB
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pendukung	23.10	21.00	10.400	16.000	70.5	BB
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pendukung	20.01	21.99	10.005	18.325	70.3	BB
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Utama	23.40	23.40	9.500	13.800	70.1	BB

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan reward dan punishment kepada SKPD agar dapat meningkatkan kinerja seluruh SKPD. Dari hasil penilaian tersebut, secara ringkas dapat dilihat pada table di bawah ini:

No	Jumlah Perangkat Daerah	Kategori	Predikat	Persentase
1	4	A	Sangat Baik	10%
2	7	BB	Baik	17,5%
3	10	B	Cukup Baik	25%
4	9	CC	Cukup	22,5%
5	8	C	Buruk	20%
6	2	D	Sangat Buruk	5%

Daftar 3 (tiga) Perangkat Daerah yang memiliki predikat penilaian kinerja terbaik, adalah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	AKUMULASI PENILAIAN KINERJA	KATEGORI	PREDIKAT
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Daerah	87	A	Sangat Baik
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86	A	Sangat Baik

Daftar Perangkat Daerah yang memiliki predikat penilaian kinerja buruk dan sangat buruk, adalah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	AKUMULASI PENILAIAN KINERJA	KATEGORI	PREDIKAT
1	Kecamatan Panyipatan	49	C	Buruk
2	Kecamatan Batu Ampar	48	C	Buruk
3	Kecamatan Pelaihari	47	C	Buruk

4	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	40	C	Buruk
5	Kecamatan Bati-Bati	40	C	Buruk
6	Kecamatan Kintap	40	C	Buruk
7	Kecamatan Bumi Makmur	40	C	Buruk
8	Kecamatan Tambang Ulang	40	C	Buruk
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	28	D	Sangat Buruk
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23	D	Sangat Buruk



Beberapa hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP antara lain:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan dan seluruh Aparatur SKPD dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja.
2. Sasaran kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Kualitas pengukuran kinerja SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada pencapaian kinerja program, masih ada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

4. Masih kurangnya kualitas laporan kinerja SKPD, dimana masih banyak laporan kinerja yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program serta belum mampu menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
5. Evaluasi atas program belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas program yang diemban oleh setiap SKPD disebabkan belum berorientasi kepada kinerja program, dan hanya pelaksanaan program atau kegiatan serta penyerapan anggaran.
6. Masih kurangnya capaian kinerja Kabupaten dan SKPD dikarenakan masih kurangnya kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah :

1. Internalisasi BerAKhlak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar bekerja lebih berorientasi kepada Capaian Kinerja yang menunjang Visi Misi Kabupaten.
2. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*Cascade Down*), mulai dari level Kepala SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
3. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;
4. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerjanya;
5. Memastikan kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten mendapatkan anggaran yang sesuai dengan porsinya, sehingga dapat mencapai target indikatornya.
6. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja (tujuan dan sasaran) organisasi;
7. Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai;

8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerjanya;
9. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
10. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, sehingga menciptakan pemahaman yang merata antar SKPD, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;

Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu:

1. Implementasi penggunaan aplikasi Siperjaka (Sistem Informasi Perjanjian Kinerja) yang menyajikan data perjanjian kinerja mulai dari eselon II sampai dengan JFT dan JFU sehingga dapat menggambarkan keselarasan kinerja dari eselon II hingga JFT dan JFU.
2. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 123.274.913 dan terealisasi sebesar Rp 97.114.202 atau 78,78% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.



Dokumentasi Kegiatan Asistensi SAKIP sekaligus reviu SAKIP SKPD

SASARAN 3.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	101.44%

Indikator Sasaran ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah ini selaras dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut.

Disamping itu dalam melaksanakan IKU di atas Sekretariat Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1/KEP-SEKDA/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja 2023. Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- b. Mengadakan rapat koordinasi antar anggota Tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. Menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- d. Mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- e. Mendiskusikan dengan Bagian-Bagian sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
- f. Mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan penetapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut melibatkan Pimpinan dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Daerah sebagai Pengarah
- 2) Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja pimpinan selalu terlibat dan memberikan arahan terkait bahan atau data Laporan Kinerja (LKj) serta dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Laporan Kinerja selalu melibatkan pimpinan.

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/261//LHE-AKIP/Insp/2022, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **84,2** dengan kategori **A (Memuaskan)**, sedangkan hasil evaluasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang dievaluasi pada Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **86,81** dengan kategori **A (Memuaskan)**. Hasil penilaian SAKIP

Sekretariat Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya sebesar 2,61%, hal ini dikarenakan adanya perubahan aturan dari PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan memuat 5 (Lima) Komponen, yaitu :

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal
- Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Ke PERMENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan 4 (Empat) Komponen, yaitu :

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Disamping itu penurunan nilai tersebut dikarenakan penilaian SAKIP telah menggunakan Aplikasi SAKUNTALA dengan sistem penilaian berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih menggunakan cara penilaian manual, dan perbandingan nilai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Hasil Penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	KOMPONEN 2021	KOMPONEN 2022	BOBOT	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
				Y/T	NILAI	BOBOT	NILAI
A	PERENCANAAN KINERJA	PERENCANAAN KINERJA	30.00	96.00%	28.80	30.00	24.99
B	PENGUKURAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	25.00	87.50%	21.88	30.00	24.99
C	PELAPORAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	15.00	88.07%	13.21	15.00	12.495
D	EVALUASI INTERNAL	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	10.00	69.22%	6.92	25.00	21.675
E	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI	-	20.00	76.19%	16.00	-	-
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA			100.00	100.00	86.81	100.00	84.20

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pimpinan rapat menyampaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2021 dari Inspektorat

Kabupaten Tanah Laut, dari hasil evaluasi tersebut ada beberapa catatan rekomendasi pada Komponen Evaluasi Internal yang harus ditindaklanjuti oleh Bagian pengampu IKU nya untuk peningkatan kualitas evaluasi internal.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kurang optimalnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan sebagian pejabat struktural dalam kegiatan penyusunan Akuntabilitas Kinerja
- Proses upload data pada aplikasi SAKUNTALA belum sepenuhnya optimal;
- Fitur yang belum sempurna pada aplikasi SAKUNTALA;
- Kurangnya kompetensi aparatur penyusun laporan terhadap kemampuan menganalisa

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melibatkan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi penyusunan laporan kinerja
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi per Triwulan terhadap laporan kinerja Bagian – Bagian lingkup Sekretariat Daerah
- Peningkatan kompetensi aparatur dalam hal menganalisa masalah terkait penyusunan laporan kinerja

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Capaian kinerja lebih ditingkatkan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang bermanfaat
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan *reward* dan *punishment*
- Peningkatan kompetensi aparatur penyusun laporan kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta FGD



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah

Indikator 2 : Nilai SPIP Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya Akuntabilitas Sekretariat Daerah	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6	Masih Tahap <i>Baseline</i> SPIP Terintegrasi	Masih Tahap <i>Baseline</i> SPIP Terintegrasi

Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretariat Daerah telah menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut dengan melaksanakan 5 (lima) Unsur SPIP yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi agar menimbulkan perilaku positif untuk mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi dengan melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan ini membantu memastikan arahan pimpinan sudah dilaksanakan atau belum, dan kegiatan ini harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang relevan dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan, informasi disajikan dalam bentuk komunikasi yang efektif dan saran dengan tepat waktu sehingga pimpinan dapat melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam melaksanakan Indikator ini Sekretariat Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5/Kep-Sekda/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Mengatur agenda kegiatan Satgas, menyempurnakan dan menjabarkannya kedalam kegiatan detail;

- 2) Menghadiri rapat dan pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 3) Melakukan Konsultasi dengan Inspektorat;
- 4) Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
- 5) Membantu Ketua Satgas dalam koodinasi penyusunan rencana kerja;
- 6) Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- 7) Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 8) Meningkatkan pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 9) Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Bagian/Sub Bagian masing-masing ;
- 10) Menyusun instrument penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Bagian/Sub Bagian masing-masing; dan
- 11) Melakukan survey dan evaluasi penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengendalian intern Lingkup Sekretariat Daerah sudah terlaksana dengan tertib dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan terbukti dengan hasil penilaian Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dari Itwil Kabupaten Tanah Laut dengan nilai 3,777, kemudian setelah dilakukan penilaian *Quality Assurance* dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai 3,16 dengan tingkat Maturitas level 3 sedangkan untuk Tahun 2021 masih dalam tahapan Kertas Kerja Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Pada Tahun 2022 pelaksanaan Maturitas SPIP diawali dengan pembentukan Tim Asesor dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/948-KUM/2022 Tentang Pembentukan Tim Asesor Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, Keputusan Bupati Tanah Laut tersebut memuat keanggotaan Tim Asesor Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Tim Asesor sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Laut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan penilaian dengan melakukan hal-hal berikut :
 - a. Melakukan proses penilaian terhadap 3 (tiga) komponen yang meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan sub unsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan SKPD.
 - b. Memberikan nilai sesuai aturan.
 - c. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian, dan
 - d. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.
2. Membuat Laporan Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan.
3. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bahan untuk pelaksanaan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Setelah ditetapkannya Tim Asesor Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilanjutkan dengan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 005/626-Insp/2022 pada Tanggal 3 Agustus 2022. Pada kegiatan sosialisasi ini disampaikan materi terkait Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2022

Setelah Kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2022 dilaksanakan internalisasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkup Sekretariat Daerah yang dilaksanakan pada Tanggal 04 Agustus 2022 sesuai dengan

surat Sekretaris Daerah Nomor 900/1918/VIII/Perenc & Keu yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV.



Dokumentasi Kegiatan internalisasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkup Sekretariat Daerah

Kemudian pada Tanggal 10 Agustus 2022 dilaksanakan Input data awal SPIP Terintegrasi Tahun 2022 sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 005/645/Insp/VIII/2022, dalam kegiatan ini dilakukan input data terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD/Kabupaten untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022, yang meliputi Sasaran SKPD, Indikator Kinerja Sasaran, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Sub Kegiatan, Nama Program dan Nama Kegiatan. Input data tersebut diatas tersaji dalam bentuk aplikasi excel dibawah ini :

[illegible]

Input Data IKU SKPD Tahun 2021

[illegible]

Input Data IKU SKPD Tahun 2022



Dokumentasi Kegiatan Input data awal SPIP Terintegrasi Tahun 2022

Bahwa Penyusunan Laporan SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut melibatkan Pimpinan dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab
2. Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Ketua
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sebagai Asesor SKPD

Dalam proses penyusunan Laporan SPIP Sekretariat Daerah pimpinan selalu terlibat dan memberikan arahan terkait bahan atau data Laporan Sekretariat Daerah serta dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Laporan SPIP Sekretariat Daerah selalu melibatkan pimpinan.

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan Rencana Tindak Pengendalian terhadap analisa risiko pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan pendampingan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah dilaksanakannya pendampingan penyusunan Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2022 dilakukan perbaikan terkait Uraian Risiko, Sebab Risiko, dan Dampak Risiko terhadap Manajemen Risiko Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kompetensi Sumber Daya Manusia belum memadai
- Kurang optimalnya dalam menyusun uraian risiko antara sebab risiko dan dampak risiko
- Belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan unsur-unsur SPIP
- Adanya kegiatan yang belum didukung oleh SOP

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan pemahaman tentang unsur-unsur SPIP
- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
- Adanya SOP untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menerbitkan surat edaran tentang sanksi terhadap pelanggaran kepatuhan
- Adanya punishment bagi instansi yang terlambat menyampaikan dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan melalui pemotongan TPP sebesar 2,5%

- Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
- SOP Kegiatan selaras dengan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi SPIP Sekretariat Daerah

SASARAN 3.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Nilai RB Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	91	92.59	101.7%

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan oleh TPI (Inspektorat) yang dilakukan melalui proses evaluasi dokumen penilaian dalam LKE yang terintegrasi dengan Aplikasi Si KReBo mendapatkan nilai 33,61 (92,59 %) dari yang ditargetkan 91 dengan prosentasi 101,74 persen dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek Pemenuhan

a. Manajemen Perubahan

Penilaian pemenuhan pada Area Manajemen Perubahan diukur dari 4 (empat) indikator, yaitu TIM Reformasi Birokrasi, Road Map Reformasi Birokrasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja. Hasil Penilaian Mandiri pada Area Perubahan ini adalah sebesar 1,96 (98,00%).

b. Deregulasi Kebijakan

Penilaian pemenuhan pada Area Deregulasi Kebijakan diukur dari 1 (satu) indikator, yaitu Harmonisasi. Hasil Penilaian Mandiri pada Area Perubahan ini adalah sebesar 1,00 (100 %).

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penilaian pemenuhan pada area Penataan dan Penguatan diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu Evaluasi Kelembagaan dan Tindak Lanjut Evaluasi. Hasil Penilaian Mandiri pada Area Perubahan ini adalah sebesar 2,00 (100 %).

d. Penataan Tata Laksana

Penilaian pemenuhan pada Area Penataan Tata Laksana diukur dari 2 (dua) indikator yaitu Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) dan Keterbukaan Informasi Publik. Hasil Penilaian Mandiri pada Area Perubahan ini adalah sebesar 0,83 (83,00).

e. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penilaian pemenuhan pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM diukur dari 6 (enam) indikator, yaitu Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, Pelaksanaan Evaluasi Jabatan dan Sistem Informasi Kepegawaian. Hasil Penilaian Mandiri pada Area Perubahan ini adalah sebesar 1,32 (94,29%).

f. Penguatan Akuntabilitas

Penilaian pada Area Penguatan Akuntabilitas diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu Keterlibatan Pimpinan dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Hasil penilaian mandiri pada Area Perubahan ini adalah sebesar 2,50 (100%).

g. Penguatan Pengawasan

Penilaian pada Area Penguatan Pengawasan diukur dari 6 (enam) indikator, yaitu Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, *Whistle-Blowing System*, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas. Hasil penilaian mandiri pada Area Perubahan ini adalah sebesar 2,03 (92,27%).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penilaian pada Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diukur dari 5 (lima) indikator, yaitu Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima,

Pengelolaan Pengaduan, Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hasil penilaian mandiri pada Area Perubahan ini adalah sebesar 1,95 (78,00%).

2. Aspek Reform

a. Manajemen Perubahan

Penilaian pada Area Manajemen Perubahan diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu Komitmen Dalam Perubahan, Komitmen Pimpinan dan Pembangunan Budaya Kerja. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut adalah sebesar 3,00 (100%).

b. Deregulasi Kebijakan

Penilaian pada Area Deregulasi Kebijakan diukur dari 1 (satu) indikator, yaitu peran Kebijakan. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut adalah sebesar 2,00 (100%).

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penilaian pada Area Penataan dan Penguatan Organisasi diukur dari 1 (satu) indikator, yaitu Organisasi Berbasis Kinerja. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut adalah sebesar 1,50 (100%).

d. Penataan Tatalaksana

Penilaian pada Area Penataan Tatalaksana diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu Peta Proses Bisnis Yang Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang terintegrasi dan Transformasi Digital Yang Memberikan Nilai Manfaat. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut adalah sebesar 3,26 (86,93%).

e. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penilaian pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu Kinerja Individu, Assessment Pegawai dan Pelanggaran Disiplin Pegawai. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut adalah sebesar 1,25 (62,50%).

f. Penguatan Akuntabilitas

Penilaian pada Area Penguatan Akuntabilitas diukur dari 4 (empat) indikator, yaitu Efektifitas dan Efisiensi Anggaran, Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja, Pemberian *Reward and Punishment*, dan Kerangka Logis Kinerja. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut adalah sebesar 3,41 (90,93%).

g. Penguatan Pengawasan

Penilaian pada Area Penguatan Pengawasan diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut adalah sebesar 1,85 (94,87%).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penilaian pada Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut adalah sebesar 37,75 (100%).

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan *clean governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah daerah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegrasi tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Adapun prinsip-prinsip *good governance* adalah :

1. Partisipasi masyarakat, yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.

2. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.
4. Peduli pada stakeholder yaitu lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada konsensus yaitu tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13/KEP-SEKDA/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka tugas Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempunyai tugas :

1. Merumuskan Rencana Kerja/Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi delapan area perubahan Reformasi Birokrasi;
3. Melakukan Pengawasan terhadap Proses Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
5. Mengumpulkan bukti-bukti (*evidence*) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
6. Mengisi Lembar Kerja (LKE) Reformasi Birokrasi untuk masing-masing area perubahan;
7. Mengkoordinasikan Tugas Kelompok Kerja Area Perubahan I sampai dengan VIII;

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700/492/Insp/2022 tanggal 22 Juni 2021, Perihal Laporan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dimana Sekretariat Daerah kabupaten Tanah Laut mendapat nilai 92,59 dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	HASIL PENILAIAN TAHUN 2021		HASIL PENILAIAN TAHUN 2022	
		Nilai	%	Nilai	%
A	Komponen Pengungkit/Proses				
1	Manajemen Perubahan (2%)	2	100	1.96	98
2	Deregulasi Kebijakan (1%)	1	100	1	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (2%)	2	100	2	100
4	Penataa Tatalaksana (1%)	0.97	97	0.83	83
5	Penataan Sistem Manajemen SDM (1.4%)	1.35	96.43	1.32	94.29
6	Penguatan Akuntabilitas (2.5%)	2.45	98	2.50	100
7	Penguatan Pengawasan (2.2%)	2.03	92.27	2.03	92.27
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2.5%)	1.95	78	1.95	78
	Jumlah			13.59	93.08
	Reform (21.70)				
1	Manajemen Perubahan (3%)	8.17	72.33	3	100
2	Deregulasi Kebijakan (2%)	22	100	2	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (1.5%)	1.5	100	1.50	100
4	Penataa Tatalaksana (3.75%)	3.42	91.2	3.26	86.93
5	Penataan Sistem Manajemen SDM (2%)	1	50	1.25	62.50
6	Penguatan Akuntabilitas (3.75%)	3.75	100	3.41	90.93
7	Penguatan Pengawasan (1.95%)	1.95	1.591	1.85	94.87
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3.75%)	3.75	100	3.75	100
	Jumlah			20.02	92.26
	TOTAL JUMLAH	33.29	91.71	33.61	92.59

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

Berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupate Tanah Laut Tahun 2022 menunjukan hasil dengan nilai (92,59), sedangkan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 dapat diperoleh nilai 91,71 %, dengan peningkatan 0,47 persen dari tahun sebelumnya,.

Berdasarkan evaluasi atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut maka perlu dilakukan perbaikan pada masing-masing area perubahan antara lain yaitu ;

1. Komponen Pemenuhan

a. Manajemen Perubahan

- 1) Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi agar lebih meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai rencana kerja;
- 2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut;
- 3) Melakukan penyimpanan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan lebih rapi sehingga pada saat pelaksanaan penilaian tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi dokumen penilaian.

b. Deregulasi Kebijakan

- 1) Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Menindaklanjuti hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dengan melakukan revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut dengan tetap memperharikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penataan Tatalaksana

- 1) Menyusun peta proses bisnis agar Seluruh peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi, selaras dengan Kinerja Organisasi, sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala.

d. Penataan Sistem Manajemen SDM

- 1) Kembali mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh pegawai dan melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- 2) Mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- 3) Melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ.

e. Penguatan Pengawasan

- 1) Meningkatkan *public campaign* terkait pengendalian gratifikasi;
- 2) Melakukan evaluasi atas penanganan gratifikasi;

- 3) Melakukan evaluasi dan penanganan pengaduan masyarakat secara berkala;
 - 4) Melakukan evaluasi atas seluruh penanganan pengaduan masyarakat;
 - 5) Melakukan sosialisasi *Wisthel Blowing System* dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
 - 6) Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Memaklumkan seluruh standar pelayanan dan mempublikasikannya minimal di dalam website;
 - 2) Melakukan evaluasi dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, serta memanfaatkan masukan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan pengaduan masyarakat;
 - 3) Menetapkan dan mengimplementasikan sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan;
 - 4) Meningkatkan inovasi pelayanan sehingga mendapatkan pengakuan secara nasional dan/atau internasional;
 - 5) Meningkatkan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat minimal 4 kali dalam setahun terhadap pelayanan yang diberikan;
 - 6) Meningkatkan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi dan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut menerapkan Nilai Budaya Kerja dengan menerapkan 10 (sepuluh) Budaya Malu yaitu ;

1. Malu datang terlambat dan pulang lebih awal;
2. Malu tidak mengikuti apel / upacara;
3. Malu sering izin tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas;
4. Malu sering meninggalkan kantor di jam kerja tanpa keterangan;

5. Malu tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dan tidak mencapai target;
6. Malu menerima apalagi meminta gratifikasi dan korupsi, kolusi, dan nepotisme
7. Malu berseragam tidak sesuai aturan;
8. Malu tidak bertatakrama dan sopan santun;
9. Malu tidak ikut memelihara lingkungan kantor; dan
10. Malu hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya kerja serta 10 (sepuluh) budaya malu, maka ASN Sekretariat Daerah diharapkan menjadi ASN yang “BAIMAN,BAUNTUNG,BATUAH”.

1. Istilah Baiman, Bauntung, dan Batuah merupakan gambaran tentang konsepsi manusia yang diharapkan oleh masyarakat Banjar, yang bermakna:
 - a. Baiman, maknanya adalah orang yang beriman dan bertaqwa dalam perilaku, yakni percaya dan yakin kepada Rasul, memegang dengan kuat iman sebagai pegangan hidup, dan percaya bahwa segala perbuatan mendapatkan balasan dari Tuhan. ASN harus memiliki iman yang kuat karena iman menjadi fondasi bagi kehidupan orang Banjar;
 - b. Bauntung, maknanya adalah bernasib baik dan bermanfaat untuk orang lain. ASN harus bekerja dengan niat mencari berkah, berlandaskan kehalalan dengan proses memudahkan, cepat, dan lancar. Mengharapkan hasil yang bagus, baik, bermanfaat dan bernilai positif untuk kebaikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat menuju sukses di dunia dan di akhirat; dan
 - c. Batuah, maknanya adalah menjadi manusia yang mempunyai harkat dan martabat bahkan dalam taraf tertentu bisa menjadi karamah.

ASN harus memiliki martabat yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Menjalani pekerjaan dengan mempunyai kelebihan berupa bakat, keistimewaan atau keahlian khusus yang tidak dimiliki orang lain yang berbasis iman, digunakan untuk menolong dan menjadi berkah bagi orang lain, sehingga disukai bahkan dicintai orang, karena menjadi contoh yang baik, patut ditiru kelakuaanya, terhormat hidupnya di masyarakat, memiliki harkat dan martabat, seperti menghias diri dengan akhlak mulia.

Motto Budaya Kerja Pemerintah Daerah adalah “ KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKLAS’.

Motto budaya kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kerja Keras adalah merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan secara sungguh tanpa mengenal Lelah, atau berhenti sebelum mencapai target yang diinginkan dengan mengutamakan kepuasan hati pada setiap aktivitas yang dilakukan;
- b. Kerja Cerdas adalah berkerja sebaik mungkin dengan hasil yang lebih besar untuk usaha yang sama atau hasil yang sama dengan usaha yang sedikit dengan menggunakan apa yang dimaksud dengan daya ungkit. Pengungkit disini merupakan alat yang memungkinkan kita bisa menghasilkan kerja dengan usaha yang sekecil mungkin dengan prinsip efektif dan efesien;
- c. Kerja Tuntas adalah bahwa di dalam bekerja kita mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usaha sampai selesai dengan hasil maksimal;
- d. Kerja Berkualitas adalah bekerja dengan hasil yang hasil semaksimal mungkin, bermutu baik sesuai tingkat, baik, berupa taraf atau derajat sesuatu; dan
- e. Kerja Iklas adalah dalam bekerja selalu dengan niat perbuatan/bekerja amal saleh secara tulus ikhlas tanpa pamrih manusia, melaikan hanya mengharapkan ridho Allah SWT semata.



*Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Oleh KEMENPAN RB
Tahun 2022*

Indikator 2 : Nilai ZI Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai ZI Sekretariat Daerah	84	87.74	104.4%

Pembangunan Zona Integritas berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 dan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Tujuan utama dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700/180/LHE-ZI/Insp/2022 tanggal 0 Juni 2022 perihal hasil evaluasi pembangunan zona integritas bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nilai 87,74 seperti pada table dibawah ini ;

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai ZI Sekretariat Daerah	84	87.74	104.4%

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajaranya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK/ dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut diperoleh nilai sebai berikut :

Tabel Hasil Penilaian Zona Integritas pada Sekretariat Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	Bobot 2021	Hasil Penilaian 2021	%	Bobot 2022	Hasil Penilaian 2022	%
A	KOMPONEN PENGUNGKIT	60%	53.49	89.15	60%	-	-
I	Komponen Pemenuhan	-	-	-	30%	-	-
1	Manajemen Perubahan	8%	5	62.5	4%	3.17	79.17
2	Penataan Tata Laksana	7%	5.78	82.57	3.5%	2.29	65.48
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	9.30	93	5%	3.98	79.66
4	Penguatan Akuntabilitas	10%	10.0	100	5%	4.48	96.88
5	Penguatan Pengawasan	15%	13.81	92	7.5%	5.68	75.69
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	9.60	96	5%	4.32	86.42
	Total 1	-	-	-	-	24.28	80.94
II	Komponen Reform	-	-	-	30%	-	-
1	Manajemen Perubahan	-	-	-	4%	4	100
2	Penataan Tata Laksana	-	-	-	3.5%	3.5	100
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	-	-	-	5%	4	80
4	Penguatan Akuntabilitas	-	-	-	5%	4.64	92.82
5	Penguatan Pengawasan	-	-	-	7.5%	7.5	100
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	5%	4.17	83.33
	Total 2	-	-	-		27.81	92.69
III	Komponen Hasil	-	-	-	40%	-	-
	Birokrasi yang bersih dan Akuntabel (22.50)	-	-	-	-	18.76	83.36
1	Survey Persepsi Anti Korupsi (0-4) (17.50%)	-	-	-	3.43%	15.01	85.69
2	Capaian Kinerja (A,B,C,D,E) (5%)	-	-	-	A	5	
	Pelayanan Publik Yang Prima (17.50%)	-	-	-	-	-	-
1	Survey Persepsi Pelayanan Publik (0-4)	-	-	-	3.575%	15.64	89.38
	Total 3	-	-	-	-	35.65	-
B	UNSUR INDIKATOR HASIL	40%	33.96	84.9	-	-	-
1	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	20%	14.66	73.3	-	-	-
1.1	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey External)	15%	14.66	97.73	-	-	-
1.2	Persentase Temuan hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang di tindaklanjuti	5%	0.0	0.0	-	-	-
2	Kualitas Pelayanan Publik	20%	19.30	96.5	-	-	-
2.1	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	20%	19.30	96.5	-	-	-
	TOTAL PENILAIAN	-	84.64	87.45	-	87.74	-

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022

Pelaksanaan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Penilaian Mandiri pada Tahun 2021 dengan nilai 84,64 sedangkan pada Tahun 2022 87,45 atau meningkat sebesar 0,96 persen, Evaluasi terhadap pemenuhan dokumen dan kualitas pada komponen pengungkit dan reform terhadap 6 (enam) area dengan teknik criteria reference test dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan, yang meliputi ;

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Evaluasi terhadap pemenuhan dokumen 'Unsur Komponen hasil' yang terdiri dari ;

- a. Birikrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator
 - Survey Persepsi Anti Korupsi
 - Capaian Kinerja
- b. Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator ;
 - Survei persepsi pelayanan publik

Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas akan dijadikan bahan evaluasi atas Pelaksanaan Zona Integritas, kemudian hasil tersebut juga untuk ;

- a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan zona integritas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- b. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian zona integritas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
- c. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi atas kelayakan untuk diusulkan ke Tim Penilai Pusat

Dalam melaksanakan Indikator Zona Integritas tersebut di atas ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia kurang memadai
- b. Lingkungan kerja belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan Zona Integritas

- c. Kurangnya Sosialisasi kepada seluruh PNS dan PTT Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah termasuk menjadi SKPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
- d. Belum pahamnya aparaturnya Sekretariat Daerah tentang program Zona Integritas itu sendiri.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring progres pemenuhan dokumen LKE Zona Integritas

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Monev dari Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan pimpinan harus berperan aktif dalam melaksanakan monev
- Manajemen media sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik (*website* setda.tanahlautkab.go.id, *Facebook* @Prokopim Kab. Tanah Laut dan *Instagram* @prokopimtala, ukpbj.tanahlautkab.go.id, lpse.tanahlautkab.go.id).
- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pelaksana Pengembangan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah.



*Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Zona Integritas Sekretariat Daerah Oleh
KEMENPAN RB Tahun 2021*

SASARAN 4 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

Indikator : Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama Eselon II yang melekat pada Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan Sumber Daya Alam adalah Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan. Pada Tahun 2022, semua kegiatan – kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan 100%. Kebijakan yang telah ditindaklanjuti tersebut ada 5 yaitu:

- 1) Mengembalikan pola pengelolaan dana investasi daerah pada masa pandemi menjadi 60 : 40 seperti pada ketentuan awal diluncurkannya program Gapura Karomah
- 2) Pencairan tahap keempat dana investasi daerah pada program Gapura Karomah sebesar 10 Milyar Rupiah untuk disalurkan kepada para pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pengembalian dana investasi daerah tahap kedua yang akan jatuh tempo dan penyelesaian debitur Program Gapura Karomah tahap kedua yang bermasalah (macet);
- 4) Tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT. BPR Tanah Laut;
- 5) Pemetaan distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi; dan
- 6) Menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penting bagi masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi.

Untuk melaksanakan penerapan kebijakan tersebut, adapun tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan di Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan Sumber Daya Alam yaitu :

- 1) Mengembalikan pola pengelolaan dana investasi daerah pada masa pandemi menjadi 60 : 40 seperti pada ketentuan awal diluncurkannya program Gapura Karomah, maka langkah --langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
 - a) Melaksanakan rapat koordinasi tim pelaksana investasi daerah dengan penasehat investasi dari pihak akademisi terkait pengembalian pola pengelolaan dana investasi.
 - b) Menyusun draft revisi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 untuk mengembalikan pola pengelolaan dana investasi menjadi 60% disalurkan dan 40% untuk dikelola oleh PT. BPR Tanah Laut selaku Bank Penyalur.
- 2) Pencairan tahap ke empat dana investasi daerah pada program Gapura Karomah sebesar 10 Milyar Rupiah untuk disalurkan kepada para pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka langkah --langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
 - a) Melaksanakan rapat – rapat koordinasi dan menyusun tahapan administrasi yang diperlukan dalam rangka pencairan dana ke PT. BPR Tala selaku pelaksana Program Gapura Karomah.
 - b) Menyusun Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ -KUM/2022 tentang Pelaksanaan Realisasi Investasi Daerah berupa Penempatan Penyaluran Dana Investasi kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
 - c) Menyusun kajian pembagian risiko terhadap dana investasi daerah yang disalurkan oleh PT. BPR Tanah Laut sesuai rekomendasi dari pihak BPK untuk mengurangi resiko kerugian daerah.
- 3) Pengembalian dana investasi daerah tahap kedua yang akan jatuh tempo dan penyelesaian debitur Program Gapura Karomah tahap pertama yang masih bermasalah (macet), maka langkah --langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
 - a) Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur dalam hal ini PT. BPR Tala terkait besaran jumlah dan jatuh tempo pengembalian dana investasi daerah tahap pertama;
 - b) Menindaklanjuti permasalahan terkait debitur Program Gapura Karomah yang macet dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Tim Teknis yang ada di masing – masing SKPD Teknis;

- c) Mengintruksikan kepada Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA agar melakukan pendampingan kepada Tim Teknis dari SKPD untuk melakukan kunjungan kepada debitur yang menunggak pembayaran / macet.
 - d) Melaksanakan FGD dan evaluasi terkait pengembalian dana investasi daerah yang masih tertunda karena adanya debitur yang belum menyelesaikan pengembalian (macet).
- 4) Tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT. BPR Tanah Laut :
- a) Melakukan rapat – rapat koordinasi dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT. BPR Tanah Laut untuk dapat memberikan masukan yang positif dan gambaran bisnis kepada pihak legislatif.
 - b) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak OJK Regional 9 yang menjadi regulator perbankan di Indonesia dan meminta rekomendasi khususnya untuk PT BPR Tanah Laut agar segera dilakukan penambahan modal untuk menjaga likuiditas permodalan PT. BPR Tanah Laut;
 - c) Mendampingi pihak legislatif melakukan kunjungan dalam rangka konsultasi dan kaji banding dalam rangka Penambahan Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT. BPR Tanah Laut;
- 5) Pemetaan distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi, maka langkah - langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
- a) Melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan PT. Pertamina dan para Agen Penyalur Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut.
 - b) Menyusun pemetaan pangkalan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi berdasarkan tingkat kebutuhan pada tiap – tiap desa dan kelurahan.
 - c) Bersama – sama dengan anggota Tim pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi melakukan monitoring dan penindakan terhadap penyelewengan distribusi Gas Bersubsidi;
 - d) Mengeluarkan Surat Edaran Bupati tentang larangan bagi para PNS Kabupaten Tanah Laut untuk menggunakan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi;
- 6) Menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penting bagi masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi, langkah - langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Melakukan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap akhir semester dan pada saat tertentu yang diperlukan untuk stabilisasi harga bahan pokok;
- b) Melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok di pasar oleh Pimpinan Daerah dan Forkopimda untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan monitoring harga pasar;
- c) Monitoring pelaksanaan kegiatan pasar murah di tiap desa untuk memastikan ketersediaan bahan pokok kepada masyarakat; dan
- d) Melakukan koordinasi dengan dinas teknis lingkup pertanian, peternakan dan ketahanan pangan terkait ketersediaan dan produksi pangan daerah.
- e) Melaksanakan kerjasama antar daerah yaitu dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok di Tanah Laut.

Secara keseluruhan, semua kebijakan dibidang Perekonomian yang dikeluarkan telah ditindaklanjuti dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku usaha mikro yang telah menerima program Gapura Karomah oleh SKPD Teknis khususnya debitur yang mengalami kesulitan perekonomian karena pandemi sehingga pengembalian pinjaman banyak yang macet.
- Pembahasan dalam rangka menyamakan perspektif antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap rancangan peraturan daerah tentang penambahan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT. BPR Tanah Laut membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Data – data pendukung terkait permasalahan debitur yang macet masih kurang detail sehingga sulit untuk membuat pertimbangan kebijakan pimpinan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan koordinasi antar SKPD Teknis yang membidangi pembinaan usaha mikro agar melakukan penyaringan calon debitur yang akan mengajukan pinjaman program Gapura Karomah lebih baik lagi.

- Memerintahkan kepada SKPD Teknis yang terlibat dalam pembinaan usaha mikro agar melakukan pembinaan kepada debitur yang bermasalah dalam pengembalian dana tersebut dan wajib membantu pihak PT. BPR Tanah Laut dalam melakukan penagihan.
- Melaksanakan FGD yang melibatkan *stakeholder* terkait untuk membahas isu – isu strategis pengembangan BUMD

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menyusun kajian analisis evaluasi program Gapura Karomah terutama dampak perkembangan perekonomian pelaku usaha mikro
- Mendorong kerjasama lintas BUMD dan menguatkan komunikasi antar BUMD agar BUMD Tanah Laut memiliki daya saing yang kuat.
- Mengarahkan SKPD Teknis yang membidangi UMKM agar melakukan pendataan pelaku UMKM supaya Tanah Laut memiliki basis data UMKM
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait Perkembangan BUMD dan Perkembangan program Permodalan mikro





Dokumentasi Kegiatan Rakor Pembinaan BUMD Tahun 2022



Dokumentasi Kegiatan Rakor TPID Tahun 2022



Dokumentasi Sidak Pasar Tahun 2022

2.2 Eselon II (Staf Ahli)

1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya kualitas telaahan strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Jumlah telaahan strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	12 Telaahan	100%
		Persentase rekomendasi isu-isu strategis yang disampaikan ke Bupati	100%	100%
		Persentase pemenuhan penugasan khusus	100%	100%

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik bertugas membantu Bupati Tanah Laut terkait Isu - isu Strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Untuk Tahun 2022 capaian untuk 3 (Tiga) Indikator Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik tercapai 100%.

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Menganalisa fakta, data dan informasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik sebagai bahan analisa kebijakan dan pengambilan keputusan Pimpinan.
		Memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik kepada Bupati dalam mengeluarkan Kebijakan yang terkait dengan legalitas Hukum.

		Mengkaji dan menganalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat serta media masa atas kebijakan Bupati di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik.
		Melaksanakan Evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
		Memantau dan Mempelajari perkembangan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik berdasarkan fakta, data dan informasi sebagai bahan analisa kebijakan dan pengambilan Keputusan Pimpinan

2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya kualitas telaahan strategis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Jumlah telaahan strategis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	12 Telaahan	100%
		Persentase telaahan dan pertimbangan terkait aspirasi dari instansi pemerintah dan masyarakat	100%	100%
		Persentase pemenuhan penugasan khusus	100%	100%

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM bertugas membantu Bupati Tanah Laut terkait Isu - isu Strategis Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Untuk Tahun 2022 capaian untuk 3 (Tiga) Indikator Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik tercapai 100%.

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Mengkaji atau menganalisa inovasi Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sebagai Bahan,saran dan masukan kepada Pimpinan.
		Melaksanakan Kerja Sama dengan kepala SKPD terkait rumusan kebijakan pendapat dan pertimbangan dalam bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan pengambilan Keputusan Pimpinan.
		Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait permasalahan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
		Melaksanakan Monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemasyarakatan dan SDM.
		Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di bidang Kemasyarakatan dan SDM.
		Menghimpun data fakta dan informasi pada saat penyusunan perencanaan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan

3) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya kualitas telaahan strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Jumlah telaahan strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	12 Telaahan	100%
		Persentase konseptual terhadap kebijakan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	100%	100%
		Persentase pemenuhan penugasan khusus	100%	100%

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan bertugas membantu Bupati Tanah Laut terkait Isu - isu Strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

Untuk Tahun 2022 capaian untuk 3 (Tiga) Indikator Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan tercapai 100%.

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Menganalisa fakta, data dan informasi Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagai bahan analisa dan pengambilan keputusan pimpinan.
		Membuat telaahan staf dan alternatif pemecahan masalah pada Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah .
		Melaksanakan Pengkajian dan analisa permasalahan di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
		Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
		Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

2.3 Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah)

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah dari hasil capaian kinerja Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini :

Perjanjian Kinerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Target dan Realisasi Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan	100%	171.75%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Hukum	100%	101%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	100%	95.77%

SASARAN 1 Meningkatkan Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan	100%	171.75%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan perumusan kebijakan bidang pemerintahan, melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah serta mengoordinasikan kebijakan di Bidang Pemerintahan dengan instansi vertikal. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan. Untuk Tahun 2022 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 171.75%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Administrasi Pemerintahan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Administrasi Pemerintahan
2	Kerjasama dan Otonomi Daerah	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kerjasama dan Otonomi Daerah
3	Administrasi Kewilayahan	Rumusan dan Pengendalian Bidang Kewilayahan

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Hukum	100%	101%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi perumusan produk hukum dan Daerah serta mengoordinasikan kebijakan di Bidang Hukum dengan instansi vertikal. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Hukum. Untuk Tahun 2022 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 101%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Administrasi Hukum yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	1. Rumusan pra rancangan dan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati 2. Rumusan kebijakan dan pengendalian pembentukan prodeuk hukum pengaturan
2	Bantuan Hukum dan HAM	1. Rumusan kebijakan dan pengendalian bantuan hukum dan pemantauan HAM 2. Rumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bantuan hokum dan HAM
3	Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	1. Rumusan kebijakan dan pengendalian produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum 2. Rumusan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan MoU 3. Rumusan layanan informasi hukum dengan melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui website (JDIH)

Indikator 3 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	100%	95.77%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kebudayaa, pembinaan bidang pendidikan dan agama, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat. Untuk Tahun 2022 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 95.77%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Bina Mental dan Spiritual	1. Rumusan kebijakan dan pengendalian bidang bina mental dan spiritual
2	Kesejahteraan Masyarakat	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Masyarakat
3	Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan sosial dan Budaya

2) Asisten Perekonomi dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah dari hasil capaian kinerja Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasi Asisten

Perekonomian dan Pembangunan, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini :

Perjanjian Kinerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan
Target dan Realisasi Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100%	183.25%

SASARAN 2 Meningkatkan Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA dan Pengadaan Barang/Jasa

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan movev perekonomian pembangunan, merumuskan kebijakan pengembangan potensi perekonomian, dan bina badan usaha milik perusahaan Daerah serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Untuk Tahun 2022 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Perekonomian	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Perekonomian
2	Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD

3	Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
---	---	--

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100%	183.25%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan rumusan kebijakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Untuk Tahun 2022 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 183.25%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Barang/Jasa yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah dari hasil capaian kinerja Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasi Asisten

Administrasi Umum, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Administrasi Umum sesuai Target dan Realisasi Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Umum	100%	101.2%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Organisasi	100%	128.6%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perencanaan dan Keuangan	100%	100%

SASARAN 2 Meningkatkan Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan
Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Umum	100%	101.2%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan urusan umum, dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan penataan asset melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Bidang Pelayanan Umum. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang pelayanan Umum. Untuk Tahun 2022 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 101.2%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Umum yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Umum dan Rumah Tangga	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Umum dan Rumah Tangga

2	Aset dan Perlengkapan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Penataan Aset dan Perlengkapan Kantor
3	Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan terkait penyelenggaraan di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal terkait kegiatan Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Untuk Tahun 2022 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Dokumentasi Pimpinan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Dokumentasi Pimpinan
2	Komunikasi Pimpinan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi Pimpinan
3	Protokol	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Protokol Pimpinan

Indikator 3 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Organisasi	100%	128.6%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Organisasi. Untuk Tahun 2022 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 128.6%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Organisasi yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Rumusan data beban kerja menjadi formasi jabatan 3. Rumusan bahan standar kompetensi jabatan 4. Rumusan bahan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas dan nilai jabatan
2	Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2. Rumusan data standarisasi pedoman kerja 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan pengaturan kerja 4. Rumusan bahan pengukuran indeks kepuasan masyarakat 5. Rumusan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
3	Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Rumusan Kebijakan dan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2. Rumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja 3. Rumusan data pemberdayaan aparatur meliputi pengawasan melekat dan penerapan budaya kerja 4. Rumusan Bahan analisis indikator kinerja dalam rencana strategis dan RPJMD 5. Rumusan laporan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja 6. Rumusan bahan pelaksanaan dan Laporan Penerapan Reformasi Birokrasi

Indikator 4 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
4	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perencanaan dan Keuangan	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, penyusunan perencanaan di Bidang Perencanaan dan Keuangan menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh di Bidang

Perencanaan dan Keuangan. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Keuangan. Untuk Tahun 2022 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Keuangan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Rekonsiliasi Keuangan Triwulan 2. Rumusan dan Penatausahaan secara keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja Daerah 3. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan kas 4. Rumusan Penyampaian SPT Tahunan orang pribadi ASN Sekretariat Daerah 5. Rumusan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Renja Sekretariat Daerah 2. Rumusan RKA Sekretariat Daerah 3. Rumusan Maturitas SPIP Terintegrasi Sekretariat Daerah 4. Rumusan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah 5. Rumusan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
3	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah 2. Rumusan LPPD Sekretariat Daerah 3. Rumusan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

3. Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kasubbag)

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 untuk Sekretariat Daerah mengemban Misi Bupati sebagaimana termuat di dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut, sehubungan hal tersebut

Maka analisa capaian sasaran strategi diuraikan berdasarkan Misi Bupati Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Umum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan,Pemantaua n dan Evalusi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evalusi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	91	92.59	101.7%	
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	84	87.74	104.4%	
ESELON IV						
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	614 Jenis	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.822 Ok	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga



NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2.000 Jenis	81%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
7	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	40 SKPD dan 9 Bagian	40 SKPD dan 9 Bagian	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
8	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	250 Kali	260 Kali	104%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
9	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	270 Kali	108%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
10	Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	3.500 Surat	3.407 Surat	97%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	126 Dokumen	126 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
12	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah	96 Dokumen	112 Dokumen	116%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Umum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Umum
terhadap capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	%	82,33%	80%	100%	100%	100%
2	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	%	86,83%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	%	-	100	100%	100%	100%
4	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	91,24	91,71	91	92.59	101.7%
5	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	84,65	87,45	84	87.74	104.4%
Rata-Rata Capaian							101.22%

❖ Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Capaian kinerja bagian umum dari lima indikator adalah **101.22%** dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik dengan capaian komponen layanan pimpinan dan Bagian-Bagian dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.
2. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/ aset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan baik dengan capaian komponen layanan pencatatan aset dan pendistribusian dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.
3. Persentase pelayanan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian sebesar 104% dari target 100%

4. Nilai komponen area perubahan reformasi birokrasi sekretariat daerah tanah laut Tahun 2022 dari hasil PMPMRB diperoleh 92.59 dari target yang ditetapkan 91 dengan prosentasi pencapaian 101%.
5. Nilai komponen area perubahan zona integritas Sekretariat daerah Tahun 2022 dari hasil PMPMZI diperoleh nilai 87.74 dari target yang ditetapkan 84 dengan persentasi pencapaian 104%.

❖ **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

1. Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik dengan capaian pada Tahun 2021 80% sedangkan Tahun 2022 100%, mengalami kenaikan sebesar 20%.
2. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik pada Tahun 2021 100% masih sama dari Tahun 2022 100%.
3. Persentase pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian Tahun 2021 100% sedangkan tahun 2022 104% atau mengalami kenaikan sebesar 4%.
4. Persentase komponen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022 dari hasil PMPMRB diperoleh 92.59 hal ini ada kenaikan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari tahun sebelumnya (Tahun 2021) dengan nilai 91,71
5. Persentase komponen area perubahan zona integritas Sekretariat daerah Tahun 2022 dari hasil PMPMZI diperoleh nilai 87.74 sedangkan pada Tahun 2021 diperoleh nilai 87.45.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2022)**

1. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 selalu mengalami kenaikan dari setiap tahunnya hanya pada Tahun 2021 yang terjadi penurunan dikarenakan adanya kasus Covid 19.
2. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 selalu mengalami kenaikan.

3. Persentase pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian hanya ada pada Tahun 2021 dan dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 mengalami selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 100% dan Tahun 2022 sebesar 104% atau mengalami kenaikan sebesar 4% dari tahun sebelumnya.
4. Persentase komponen area perubahan reformasi birokrasi Sekretariat Daerah, untuk nilai RB Tahun 2021 sebesar 91.71 sedangkan nilai RB Tahun 2022 sebesar 92.59 atau mengalami kenaikan sebesar 0.88.
5. Persentase komponen area perubahan zona integritas Sekretariat Daerah, untuk Tahun 2021 nilai ZI adalah 87.45 sedangkan Tahun 2022 nilai ZI adalah 87.74 atau mengalami kenaikan sebesar 0.29 dari tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**



NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	86,83 %	86,38 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum
	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	61,3 %	61,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum
	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	-	-	-	100%	86,83%	86,83 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum
	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	-	-	-	100%	92,57%	92,57 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum
	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	-	-	-	-	-	-	100%	80%	80%	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum



	dengan baik																	
	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan,Pe mantauan dan Evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	90	91,71	101.90%	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	83	87,45	105.40%	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum
	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100 %	100%	-	-	Bagian Umum



	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Umum
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	92.59	101.70%	92	-	-	Bagian Umum
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	87.4	104.40%	85	-	-	Bagian Umum

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja****SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan Baik****Indikator : Persentase Layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan Baik**

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.951.250.000,- pada Tahun 2022 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.914.160.260,- atau 98,74%, sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran Rp 1.231.106.436 pada Tahun 2022 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.215.970.648 atau 98,77%, sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 374.525.200 pada Tahun 2022 dengan serapan anggaran sebesar Rp 348.396.500 atau 93.02%, sub kegiatan peyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 233.930.347 dengan serapan anggaran sebesar Rp 232.944.765 atau 99.58% dan sub kegiatan peyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.806.241.019 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.801.801.915 atau 99.75%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut diatas, menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kurang tertibnya usulan RKBK dari Bagian-Bagian sehingga mengakibatkan kurang terakomodir kebutuhan di setiap Bagian.
- Kurangnya kesadaran dalam memelihara asset daerah.

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Memberikan batasan atau tengang waktu dalam membuat RKBU dari bagian-bagian yang diusulkan ke Bagian Umum.
- Perlu adanya sanksi terhadap kelalaian penggunaan asset daerah.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat Nota Dinas mengenai batasan usulan RKBU.
- Membuat Nota Dinas tentang penggunaan asset daerah.



Foto Kegiatan Acara Ramah Tamah Peyambutan Tamu, Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan 17 Agustus

SASARAN 2 Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib

Indikator : Persentase Layanan Pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Terkait Sarana Prasarana/ Aset Milik Sekretariat Daerah Terkelola Dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100	100	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Peningkatan indikator ini ditunjang dengan sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 828.019.412 dengan serapan anggaran sebesar Rp 756.491.358 atau 91,36%. Sub kegiatan peyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 96.363.449 dengan serapan anggaran sebesar Rp 90.657.000 atau 94,08%.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Banyaknya jumlah asset yang tidak ditemukan
- Pencatatan asset yang belum tertib

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan penelusuran terhadap asset yang tidak ditemukan
- Menertibkan pencatatan asset

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat berita acara penelusuran asset yang tidak ditemukan dan diusulkan untuk dihapus atau hibah.
- Membuat berita acara serah terima barang.

SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian

Indikator : Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian ditunjang dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 94.486.500 dengan serapan anggaran Rp 93.300.000 atau 98.74%. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 2.951.250.000 dengan realisasi Rp 2.914.160.260 atau 98.74%. Sedangkan Sub Kegiatan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas dengan pagu anggaran 25.000.000 tetapi tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas pada Tahun 2022, Sub Kegiatan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan anggaran Rp 220.000.000 tetapi juga tidak terealisasi dikarenakan pimpinan daerah dan wakil pimpinan daerah dalam keadaan sehat sehat saja.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

Pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena pada Tahun 2022 kasus *Covid-19* telah mengalami penurunan dan kabupaten tanah laut sudah dalam level hijau, sedangkan untuk sub kegiatan pegawai yang meninggal tidak terealisasi karena tidak ada ASN yang meninggal dunia sedangkan Kegiatan *Medical Chek Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga tidak direalisasi karena kondisi Pimpinan daam keadaan sehat.

Pada indikator kegiatan di atas belum terdapat solusi dikarenakan kendala yang ada dalam pelaksanaannya adalah kendala non teknis sehingga semua sudah berjalan

sebagaimana aturan dalam pelaksanaannya untuk pengadaan pakaian dinas yang terlaksana sesuai dengan kebutuhan pimpinan sedangkan dua kegiatan lainnya seperti pemulangan jenazah pegawai yang meninggal dan *Medical Chek Up* pimpinan tidak dapat terlaksana.



Pengadaan baju PDH dan PDU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

SASARAN 4 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Peningkatan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	91	92.59	101.74	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Pelaksanaan peningkatan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dari target yang ditetapkan 91 berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh TPI Sekretariat Daerah mendapatkan Nilai 92,59 dengan prosentasi pencapaian 101,74% dari target yang telah ditetapkan, kedepannya Sekretariat Daerah terus berupaya meningkatkan pemenuhan

dokumen-dokumen LKE Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan penerapan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut maka rencana tindak lanjut dari LHE RB Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

No	Area Perubahan	Tindak Lanjut
1	Manajemen Perubahan	a. Membuat Keputusan terkait Tim RB sesuai area pada LKE b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja kearah yang lebih baik
2	Regulasi Kebijakan	a. Melakukan identifikasi dan analisis Kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap peraturan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron secara berkelanjutan b. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron yang terbaru dengan melibatkan tokoh masyarakat
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Penataan Kelembagaan berbasis kinerja b. Evaluasi Kelembagaan kesesuaian beban kerja organisasi
4	Penataan Tatalaksana	a. Melakukan reviu terhadap SOP b. Penyusunan draf keputusan peta proses bisnis c. Penyusunan SOP sesuai peta proses bisnis d. Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Reviu terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan b. Melakukan reviu kebutuhan pegawai sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan c. Pemberian reward dan punishment terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi d. Reviu terhadap standar kompetensi jabatan pegawai negeri sipil e. Memanfaatkan system informasi kepegawaian f. Melakukan monitoring kinerja individu secara berkala
6	Penguatan Akuntabilitas	a. Memaksimalkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan b. Melakukan penyalarsan dokumen perencanaan SKPD dengan kabupaten c. Melakukan revisi Indikator Kinerja Utama Pejabat Eselon II d. Evaluasi Internal terhadap capaian kinerja SKPD e. Pemenuhan dokumen data dukung capaian target kinerja SKPD f. Memaksimalkan komitmen Pimpinan dan seluruh ASN dalam Implementasi SAKIP
7		a. Membangun komitmen anti gratifikasi di setiap pelayanan b. Melakukan identifikasi resiko SKPD c. Melakukan peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Aplikasi WBS d. Meningkatkan penanganan pelaporan benturan kepentingan e. Melakukan peningkatan pembangunan zona integritas untuk meraih WBK
8	Peningkatan kualitas pelayanan bisnis	a. Evaluasi atas pengembangan system informasi layanan masyarakat b. Meningkatkan informasi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media c. Meningkatkan nilai atas persepsi kualitas pelayanan publik d. Pengembangan Aplikasi layanan untuk mempermudah pelayanan

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
- Masih adanya dokumen-dokumen pada Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum terpenuhi
- Masih rendahnya penerapan budaya kerja untuk kepemimpinan dan manajemen, Pola Pikir dan Cara Kerja serta Perilaku Bekerja

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Penerapan tata kelola pemerintahan secara efektif
- Dokumen-dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dipenuhi sesuai dengan Area Perubahannya.
- Penerapan Budaya Kerja untuk kepemimpinan dan manajemen, Pola Pikir dan Cara Kerja serta Perilaku Bekerja sesuai dengan Kategori Bagus

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mendorong segera adanya role model di mana pimpinan yang menjadi contoh untuk bawahannya.
- Dokumen-dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi segera di buat di dicatat agar terkoordinasi dengan baik dan cepat.



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi RB

Indikator 2 : Peningkatan komponen area perubahan Zona Integritas Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	84	87.74	104.45%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Penilaian Mandiri pada Tahun 2022 dengan nilai 87,74 dari target yang ditetapkan 84 dengan prosentasi 104,45 persen.

Sekretariat Daerah juga diusulkan menjadi WBK akan tetapi nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Kemenpan dan RB masih belum memenuhi target, sehingga saat ini belum mendapatkan WBK. Dalam Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas tersebut di atas ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- Kompetensi Sumber Daya Manusia kurang memadai
- Lingkungan kerja belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Kurangnya Sosialisasi kepada seluruh PNS dan PTT Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah termasuk menjadi SKPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
- Belum pahamnya aparatur Sekretariat Daerah tentang program Zona Integritas itu sendiri.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.

Melakukan evaluasi dan monitoring progres pemenuhan dokumen LKE Zona Integritas.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Banyak melakukan sosialisasi untuk memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Pembuatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.



Foto foto sarana dan prasarana pendukung dan penandatanganan komitmen bersama

6. Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

1. Untuk mencapai sasaran layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik ditunjang oleh 3 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Kepala Bagian Umum, Kasubbag Umum dan Rumah Tangga dan pelaksana Bagian Umum.
2. Untuk mencapai sasaran persentase layanan pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik ditunjang oleh 3 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Kepala Bagian Umum, Kasubbag Asset dan Perlengkapan dan pelaksana Bagian Umum.
3. Untuk mencapai sasaran persentase layanan kebijakan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, dan kepegawaian ditunjang oleh 3 orang yaitu kepala bagian umum, kasubag TU pimpinan dan staf ahli dan pelaksana bagian umum.
4. Untuk mencapai peningkatan komponen area perubahan reformasi birokrasi lingkup sekretariat daerah ditunjang oleh 3 orang yaitu kepala bagian umum, kasubag TU pimpinan dan staf ahli dan pelaksana bagian umum.



5. Untuk mencapai peningkatan komponen area perubahan zona integritas lingkup sekretariat daerah ditunjang oleh 3 orang yaitu kepala Bagian Umum, kasubag TU pimpinan dan staf ahli dan pelaksana Bagian Umum.



Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase layanan Pimpinan/ Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.775.605.062	3.562.320.390	94.35		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.951.250.000	2.914.160.260	98.74	3 Orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.665.803.002	3.617.023.828	98.67		
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1.231.106.436	1.215.970.648	98.77	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.525.200	348.396.500	93.02	3 Orang	
2	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.775.605.062	3.562.320.390	94.35		
			- Sub Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	119.123.795	111.428.500	93.54	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336.037.877	274.139.580	81.58	3 Orang	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.829.069.948	5.385.035.933	92.38		
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	528.530.500	441.292.000	83.49	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.460.400	3.540.470.512	97.98	3 Orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.665.803.002	3.617.023.828	98.67		
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.930.347	232.944.765	99.58	3 Orang	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.806.241.019	1.801.801.915	99.75	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	17.910.000	89.55	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1.231.106.436	1.215.970.648	98.77	3 Orang	
			- Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.525.200	348.396.500	93.02	3 Orang	
3	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpina, Staff Ahli dan Kepegawaian		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	314.486.500	93.300.000	29.67		
			Sub Kegiatan <i>Medical Check-Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000	0	0	3 Orang	
			Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	94.486.500	93.300.000	98.74	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	107.000.000	3.850.000	3.60		
			- Sub Kegiat Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	0	0		
			- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	82.000.000	3.850.000	4.70	3 Orang	
			Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat daerah	3.775.605.062	3.562.320.390	94.35		
			- Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0		
			- Sub Kegiatan Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.951.250.000	2.914.160.260	98.74	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.879.941	136.285.050	86.32	3 Orang	
4	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.775.605.062	3.562.320.390	94.35		



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
	Sekretariat Daerah							
5	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah		Sub Kegiatan Peyediaan barang cetakan dan Penggandaan	96.363.449	90.657.000	94.08	3 Orang	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	828.019.412	756.491.358	91.36		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	828.019.412	756.491.358	91.36	3 Orang	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.829.069.948	5.385.035.953	92.38		
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.687.079.048	1.403.273.421	83.18	3 Orang	
			Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.820.090.000	2.778.330.127	98.52		
			- Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	860.375.000	828.412.500	96.29	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	657.555.000	655.336.000	99.66	3 Orang	

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga :**

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Umum dan Rumah Tangga dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan pagu Rp 2.820.090.000 terealisasi Rp 2.778.330.127 dengan realisasi keuangan sebesar 98.52% dengan dukungan SDM sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari:

- Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dengan pagu Rp 860.375.000 terealisasi Rp 828.412.500 dengan realisasi keuangan sebesar 96.29%;
- Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah dengan pagu Rp 657.555.000 terealisasi Rp 655.336.000 dengan realisasi keuangan sebesar 99.66%;
- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dengan pagu Rp 1.302.160.000 terealisasi Rp 1.294.581.657 dengan realisasi keuangan sebesar 99.42%;

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan dikelola dengan baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.775.605.062	3.562.320.390	94.35		
2	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	96.363.449	90.657.000	94.08	3 orang	
3	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik		Kegiatan Fasilitasi Kerumah Tangga Setda	2.820.090.000	2.778.330.127	98.52		



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	860.375.000	828.412.500	96.29	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	657.555.000	655.336.000	99.66	3 orang	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.302.160.000	1.294.581.627	99.42	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	828.019.412	756.491.358	91.36		
			- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.019.412	756.491.358	91.36	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.829069.948	5.385.035.933	92.38		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.687.079.048	1.403.273.421	93.18	3 orang	
			- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	614 Jenis	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.822 OK	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100	100	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

SASARAN 1 Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/Aset Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Sarana Dan Prasarana/Aset Milik Sekretariat Daerah yang Terpelihara dan Terkelola dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	614 Jenis	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.231.106.436 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.215.970.648 atau 98.77%. sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 374.525.200 dengan serapan anggaran sebesar Rp 348.396.500 atau 93.02%.

SASARAN 2 Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat**Indikator : Jumlah Layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD dan Masyarakat Terlayani dengan Baik**

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.822 Ok	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 860.375.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 828.412.500 atau 96.29%, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 657.555.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 655.336.000 atau 99.66% dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.302.160.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.294.581.627 atau 99.42%.

SASARAN 3 Melaksanakan Pelayanan Bidang Transportasi, Konsumsi dan Gedung Pertemuan Di Lingkup Sekretariat Daerah**Indikator : Jumlah Layanan Transportasi, Konsumsi dan Gedung Pertemuan Di Lingkup Sekretariat Daerah Terlayani dengan Baik**

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Peningkatan indikator ini dilakukan dengan menyediakan jasa sewa gedung dan layanan penyewaan bus untuk masyarakat umum dan pimpinan. Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa



gedung atau aula yang dapat dimanfaatkan atau disewa oleh Masyarakat/SKPD ataupun dari Lembaga Organisasi lainnya berupa :

- 1) Gedung Balairung Tuntung Pandang
- 2) Gedung Sarantang Saruntung
- 3) Aula Rapat Ruang Barakat Lantai dua Sekretariat Daerah
- 4) Aula Rapat Lantai tiga Sekretariat Daerah

Yang mana gedung dan aula tersebut sering digunakan untuk acara cara resmi seperti pelantikan para pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Selain gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut juga memiliki 4 buah armada bus yang dapat di sewa oleh Masyarakat ataupun SKPD dengan tarif yang terjangkau karena tarif di atur dengan Peraturan Daerah yang mana dana akan masuk ke Kas Daerah. Untuk Tahun 2022 pada sekretariat daerah telah ditetapkan pagu anggaran pendapatan sebesar Rp 100.000.000 dan dari target tersebut telah tercapai melalui jasa sewa gedung dan armada bus sebesar Rp. 107.000.000.

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

Melaksanakan pengelolaan, pencatatan aset dan penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah dan jumlah aset yang terkelola dan tercatat dengan baik, maka untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 3.775.605.062 realisasi sebesar Rp 3.562.320.390 atau 94.35%, sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp 5.829.069.948 realisasi sebesar Rp 5.385.035.933 atau 92.38% dan sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Anggaran sebesar Rp 3.665.803.002 dan terealisasi sebesar Rp 3.617.023.828 atau 98.67%.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
 Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.775.605.062	3.562.320.390	94.35		
2	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik		- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.123.795	111.428.500	93.54	3 orang	
3	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336.037.877	274.139.580	81.58	3 orang	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.829.069.948	5.385.035.933	92.38		
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	528.530.500	441.292.000	83.49	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.460.400	3.540.470.512	97.98	3 orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.665.803.002	3.617.023.828	98.67		
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	233.930.347	232.944.765	99.58	3 orang	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.806.241.019	1.801.801.915	99.75	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	17.910.000	89.55	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.231.106.436	1.215.970.648	98.77	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.525.200	348.396.500	93.02	3 orang	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
2	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2.000 Jenis	81%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
3	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

SASARAN 1 Melaksanakan Pengadaan Aset di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Aset Yang di Distribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengadaan Saranan dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 828.019.412 dengan serapan anggaran sebesar Rp 756.491.358 atau 91.36%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pengadaan barang dan perlengkapan kantor seperti pengadaan komputer, printer dan alat alat penunjang kegiatan kantor lainnya



dimana bukan hanya pengadaaannya saja yang di catat dalam SIMDA BMD tetapi juga pendistribusiannya juga tercatat di laman berita acara serah terima barang, serta pencatatan keadaan barang baik yang rusak berat, ringan atau pun keadaan baik. Serta sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 96.363.449 dengan serapan sebesar Rp 90.657.000 atau 94.08% pada sub kegiatan ini dilakukan untuk cetak dokumen laporan BMD baik belanja modal, belanja habis pakai, serta belanja pemeliharaan.

Berikut disajikan daftar barang yang dimusnahkan dan dihapus pencatatannya dari aset Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Daftar BMD yang Dilakukan Pemusnahan
 (Lampiran Tabel KIB)
 Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Register	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/RB
2	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
3	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	3	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
4	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	4	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
5	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	5	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
6	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	6	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
7	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	7	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
8	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	8	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
9	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	9	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
10	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	10	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/RB
11	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	7	-	-	camp	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	"Handy Talkie - Informasi
12	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	8	-	-	camp	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	



No	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Ket
13	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	9	-	-	camp	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	
14	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	18	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	/RB"
15	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	19	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	"Handy Talkie - Informasi
16	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	20	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	
17	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	21	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	
18	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	22	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,66	/RB"
19	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	23	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	"Handy Talkie - Informasi
20	02.06.03.47.002	Genset	3	-	-	camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	50.800.000,00	
Jumlah														70.145.000,01	

SASARAN 2 Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan Aset di Lingkup Sekretariat daerah

Indikator : Jumlah Aset Sekretariat Daerah Yang Terkelola dan Tercatat Dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2.000 Jenis	81%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 96.363.449 dengan serapan sebesar Rp 90.657.000 atau 94.08%. Kegiatan dilaksanakan berupa pencetakan kartu kendali barang, laporan RKBMD tahunan dan penjilidannya, serta pencetakan kartu inventaris barang.

SASARAN 3 Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 157.879.941 dengan serapan anggaran sebesar Rp 136.285.050 atau 86.32%. indikator ini dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan Alat tulis kantor dan lain lainnya yang mana tiap bagian akan mengajukan RKBMD barang sesuai dengan kebutuhannya.

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian**

Melaksanakan pengelolaan, pencatatan dan pengelolaan arsip, pelayanan administrasi dan kepegawaian pimpinan, melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkup Sekretariat Daerah, maka untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 107.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 3.850.000 atau 3.60%, kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp 3.775.605.062 realisasi anggaran sebesar Rp 3.562.320.390 atau 94.35% dan kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 314.486.500 realisasi anggaran 93.300.000 atau 29.67%

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah SKPD/ Bagian lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.000.000	3.850.000	3.60		
2	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan		- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	25.000.000	100	3 orang	
3	Jumlah pelayanan administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)		- Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	82.000.000	3.850.000	4.70	3 orang	
4	Jumlah arsip yang dikelola sesuai SOP		- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.775.605.062	3.562.320.390	94.35		
5	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0		
6	Jumlah Dokumen Area Perubahan Zona Integritas Lingkup Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.951.250.000	2.914.160.260	98.74	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.879.941	136.285.050	86.32	3 orang	



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	314.486.500	93.300.000	29.67		
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000	220.000.000	0	3 orang	
			- Sub Kegiatan Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.486.500	93.300.000	98.74	3 orang	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	40 SKPD dan 9 Bagian	40 SKPD dan 9 Bagian	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
2	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	250 Kali	260 Kali	104%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
3	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	270 Kali	108%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
4	Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang dikelola sesuai SOP	3.500 Surat	3.407 Surat	97%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
5	Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	126 Dokumen	126 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
6	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah	96 Dokumen	96 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk memberikan pelayanan surat menyurat lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah laut di dukung Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran 157.879.941 dengan realisasi sebesar Rp 136.285.050 dengan persentasi 86.32%. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan arsip di dukung dengan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran Rp 96.363.449 dengan serapan sebesar Rp 90.657.000 atau 94.08%.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi penyimpanan arsip adalah sebagai berikut ;

- a. Belum adanya tenaga arsiparis
- b. Belum adanya anggaran untuk mendukung pengelolaan arsip

Sedangkan untuk mengatasi atas kendala tersebut adalah ;

- a. Menunjuk ASN yang membantu dalam pelaksanaan pengelolaan Arsip
- b. Menganggarkan alokasi biaya untuk pengelolaan arsip dilingkup Sekretariat Daerah

SASARAN 1 Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup Sekretariat Daerah sesuai SOP

Indikator : Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Sekretariat Daerah yang terlayani administrasi surat menyurat

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	40 SKPD dan 9 Bagian	40 SKPD dan 9 Bagian	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 157.879.941 dengan serapan anggaran sebesar Rp 136.285.050 atau 86.32%. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat

SASARAN 2 Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	250 Kali	260 Kali	104%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 157.879.941 dengan serapan anggaran sebesar Rp 136.285.050 atau 86.32%. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat.

SASARAN 3 Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	270 Kali	108%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 157.879.941 dengan serapan anggaran sebesar Rp 136.285.050 atau 86.32%. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat

SASARAN 4 Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase arsip yang terkelola sesuai SOP

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
4	Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	3.500 Surat	3407 Surat	97%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 157.879.941 dengan serapan anggaran sebesar Rp 136.285.050 atau 86.32%, tetapi untuk pengelolaan Arsip sendiri tidak ada anggaran khusus. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat.

SASARAN 5 Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
5	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	126 Dokumen	126 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 157.879.941 dengan serapan anggaran sebesar Rp 136.285.050 atau 86.32%, Pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pengisian LKE Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah dengan 8 (delapan) Area Perubahan.

SASARAN 6 Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
6	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah	96 Dokumen	96 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 157.879.941 dengan serapan anggaran sebesar Rp 136.285.050 atau 86.32%, Pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pengisian LKE Zona Integritas Sekretariat Daerah dengan 6 (enam) Area Perubahan.

Analisa Capaian Sasaran Strategis Kepala Bagian Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	75%	75%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	
3	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	95%	95%	
4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Pemerintahan terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis
Bagian Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2022		
			2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	%	82%	76,5%	100%	76%	76%
2	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	%	70%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	%	100%	100%	-	-	-

4	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	%	100%	100%	100%	95%	95%
5	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	%	175%	416%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							92.75%

1. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Bagian Pemerintahan dari ke lima indikator adalah **92.75%**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti sebesar 76% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 76%.
2. Persentase kegiatan peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
3. Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2022 tidak ada target dan capaian dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur dari yang semula terdapat di Kegiatan Otonomi Daerah menjadi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Sasaran Strategis / Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Indikator Sasaran yaitu Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan dengan target sebesar 100% dan capaian di Tahun 2022 adalah 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
4. Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD sebesar 95% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 95%.
5. Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti sebesar 416% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 416%.

2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

1. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti Tahun 2022 adalah 76% mengalami penurunan sebesar 0,5% dari Tahun 2021 dengan capaian sebesar 76,5%.
2. Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2022 tidak ada target dan capaian dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur dari yang semula terdapat di Kegiatan Otonomi Daerah menjadi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Sasaran Strategis / Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Indikator Sasaran yaitu Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan dengan target sebesar 100% dan capaian di Tahun 2022 adalah 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
3. Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti Tahun 2022 dengan kegiatan penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan adalah 100% sama dengan Tahun 2021 yang juga sebesar 100%.
4. Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD Tahun 2022 adalah 95% mengalami penurunan sebesar 5% dari Tahun 2021 dengan capaian sebesar 100%, hal ini dikarenakan terdapat IKK SKPD yang berdasarkan hasil review Tim Review dari Inspektorat Kabupaten di Aplikasi SILPPD terdapat 6 (enam) IKK yang mendapat kategori “Tidak OK”, sehingga dari 123 IKK Outcome terdapat 117 IKK yg mendapat kategori “OK”.
5. Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti Tahun 2022 adalah 416% sama dengan persentase di Tahun 2021 sebesar 416%. Kegiatan ini melampaui target dikarenakan di Tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat peningkatan yang signifikan terkait penyusunan Dokumen Kerjasama di SKPD karena realisasi kegiatan di Anggaran Perubahan maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

❖ Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)



NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, otonomi daerah dan kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tapem
		Jumlah Pemenuhan IKK	623	623	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tapem
		Jumlah permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	2	2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tapem
		Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	3	3	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tapem
	Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan hari besar Nasional/Kabupaten	2	2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tapem
	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	100%	82%	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Pemerintahan



	Pemerintahan Umum	Umum yang berhasil di tindaklanjuti																
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	-	-	-	100%	70%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Pemerintahan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Pemerintahan
		Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur / Bupati)	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Pemerintahan
	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Pemerintahan
	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Pemerintahan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	76,5 %	76,5 %	100%	75%	75%	100%	-	-	Bagian Pemerintahan



		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Pemerintahan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	Bagian Pemerintahan
	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	-	-	Bagian Pemerintahan
	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	416%	416%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Pemerintahan

3. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Indikator : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	75%	75%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 1.053.422.440,00 dan terealisasi sebesar Rp 712.494.262,00 atau 67,63%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi (*Coffee Morning*) yang ditargetkan pada Tahun 2022 sebanyak 12 Kali namum hanya terealisasi 9 kali (75%) hal ini dikarenakan terbenturnya dengan kegiatan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Penentuan jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) yang menyesuaikan jadwal pimpinan.
- Kehadiran Kepala SKPD yang diwakilkan oleh Sekretaris atau Kepala Bidang atau bahkan Kepala Seksi / Sub coordinator.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang sudah di agendakan agar tidak saling berbenturan, sehingga dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu agenda lainnya.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah

- Mensinkronkan jadwal kegiatan rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) agar tidak terbentur dengan jadwal agenda pimpinan.



Rapat Pejabat Pemerintah Daerah (Coffee Morning) dan Rapat Forkopimda

Indikator 2 : Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan melalui Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub

Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 1.053.422.440,00 dan terealisasi sebesar Rp 712.494.262,00 atau 67,63%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan telah dilaksanakan kegiatan diantaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan membentuk Panitia Pelaksanaan hari besar tersebut. Persentase capaian pada Tahun 2022 sebesar 100% sama dengan Tahun 2021 dengan capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan koordinasi SKPD dan dukungan seluruh stake holder di Kabupaten Tanah Laut terkait pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Nasional/Kabupaten yaitu Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Ke-57 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 terlaksana dengan baik sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat terealisasi sebesar 100%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Terbenturnya jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang khususnya pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut
Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Secepatnya/lebih awal mengkoordinasikan terkait jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Lebih cepat mengkoordinasikan dalam menyinkronkan jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.





Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Ke-57 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

SASARAN 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Indikator 1 : Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	-	-	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Bahwa untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2022 tidak ada target dan capaian dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur dari yang semula terdapat di Kegiatan Otonomi Daerah menjadi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Sasaran Strategis / Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Indikator Sasaran yaitu Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan dengan target sebesar 100% dan capaian di Tahun 2022 adalah 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

Bahwa untuk mendukung Indikator Sasaran Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan:

- Pembentukan Tim Pembinaan Kecamatan
- Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut
- Pengecekan batas desa pemekaran dilapangan dengan berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan instansi/SKPD terkait.
- Melaksanakan rapat koordinasi Kecamatan.
- Melaksanakan rapat koordinasi terkait pemekaran kecamatan.
- Melakukan inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Adanya permasalahan dilapangan diantaranya perbedaan persepsi penentuan titik batas desa pemekaran kecamatan.
- Pengumpulan data dukung pemekaran kecamatan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Mempertemukan Kepala Desa dan Camat yang berbatasan serta instansi terkait agar segera mendapat putusan titik segmen batas yang di sepakati.
- Melaksanakan rapat koordinasi rutin seluruh camat dan SKPD terkait.
- Mengoptimalkan kinerja Tim Batas Desa dan SKPD terkait inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Batas Desa untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemekaran kecamatan
- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.



Rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten Tanah Laut

SASARAN 3 Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD

Indikator : Persentase Pemenuhan IKK SKPD

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	95%	95%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD telah dilaksanakan melalui Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat telah dilaksanakan kegiatan:

- Tim Penyusun LPPD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Laut sekaligus penyampaian format pengisian Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut
- Melakukan pengumpulan Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari IKK Outcome yang berjumlah 123 IKK melalui e-LPPD Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan verifikasi dan validasi Data Dukung IKK LPPD.
- Penyampaian permintaan review IKK LPPD di SILPPD ke Inspektorat Kabupaten Tanah Laut atau Tim Review Kabupaten / APIP .

Berikut disajikan Pelaporan IKK Output dan IKK Outcome LPPD Tahun 2022 untuk TA 2021 Kabupaten Tanah Laut.

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Pemda		Apip			
					Capaian	Keterangan	File Bukti	Diperbarui	Status	Keterangan
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 10069 ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 12527	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau	80,38%	-	ADA	-	OK	-
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 36129 ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 39548	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar. Jumlah anak usia 7- 12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	91,35%	-	ADA	-	OK	-
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 12147 ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 19321	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	62,87%	-	ADA	-	OK	-
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 58327 ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 75354	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan kesetaraan. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	77,40%	-	ADA	-	OK	-
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 377 Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 348505	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	0,108%	-	ADA	-	OK	-



1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 3 Jumlah RS di kabupaten/kota = 4	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi. Jumlah RS di kabupaten/kota	75%	-	ADA	-	OK	-
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5817 Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 6807	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	85,45%	-	ADA	-	OK	-
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 6358 Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 6497	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	97,86%	-	ADA	-	OK	-
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 6332 Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 6367	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	99,45	-	ADA	-	OK	-
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 23371 Jumlah balita di kabupaten/kota = 25392	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah balita di kabupaten/kota	92,04%	-	ADA	-	OK	-
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 36773 Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 47356	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	77,65%	-	ADA	-	OK	-
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 66797 Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 224676	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	29,73%	-	ADA	-	OK	-
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 8498 Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 35918	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	23,66%	-	ADA	-	OK	-



1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 14362 Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 26211	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	54.79%	-	ADA	-	OK	-
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3825 Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 4018	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	95.19%	-	ADA	-	OK	-
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 439 Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 501	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	87.62%	-	ADA	-	OK	-
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 174 Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 5409	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	3.22%	-	ADA	-	OK	-
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 4620 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 7287	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	63.40%	-	ADA	-	OK	-
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 284.389 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 2225.668	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha). Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	12.78%	-	ADA	-	OK	-
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 80.514 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m). Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m).	50.26%	-	ADA	-	OK	-



			kabupaten/kota (m) = 160.172							
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting = 17.111 luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 25.686	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	66.61%	-	ADA	-	OK	-
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 36843 Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 87338	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	42.18%	-	ADA	-	OK	-
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 46533 Jumlah rumah di Kabupaten A = 87338	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD. Jumlah rumah di Kabupaten A	53.28%	-	ADA	-	OK	-
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 625 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 625	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya. Jumlah IMB yang berlaku	100%	-	ADA	-	OK	-
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 1233.89 Jumlahtotal panjang jalan kabupaten/kota = 1826.633	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap. Jumlahtotal panjang jalan kabupaten/kota	67.55%	-	ADA	-	OK	-
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 462 Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 3041	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis. Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	15.20%	-	ADA	-	OK	-



1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 0 Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 152	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan	96.43%	-		-	OK	-
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 513 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 532	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun.	100%	-	ADA	-	OK	-
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 300 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 300	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	100%	-	ADA	-	OK	-
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 7.11 Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 87.17	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha). Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	8.15%	-	ADA	-	OK	-
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 4616 Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 1314	Jumlah unit rumah tidak layak huni. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	351.29%	-	ADA	-	OK	-
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 300 Jumlah unit rumah kab/kota = 1314	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi. Jumlah unit rumah kab/kota	22.83%	-	ADA	-	OK	-
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditangani = 107 Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 107	Jumlah pengaduan yang ditangani. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	100%	Terdapat 32 pelanggaran/pengaduan yang masuk dan ditangani dari Bid. Trantibum serta 75 pelanggaran/pen	ADA	-	OK	-



						gaduan yang masuk dan ditangani dari Bid. Penegakan Perda				
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan = 24 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 26	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	92.31%	terdapat 2 perda yg tidak memuat sanksi yang ditegakkan	ADA	-	OK	-
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 100 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Realisasi sesuai sosialisasi : 75 orang sasaran sesuai DPA : 75 orang	ADA	-	OK	-
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 100 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Realisasi yang memperoleh layanan : 105 orang sasaran sesuai DPA : 105 orang	ADA	-	OK	-
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 56160 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 19	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	295578.95 %	-	ADA	-	OK	-
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 4 Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 81	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	4.99%	-	ADA	-	OK	-
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	59	jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian : 4.781 Menit dibagi jumlah seluruh kejadian : 81 kejadian	ADA	-	OK	-



1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 3233 Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 17407	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak lanjut pengemis	18.57%	-	ADA	-	OK	-
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 53198 Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 53252	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	99.90%	-	ADA	-	OK	-
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 72 Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 87	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	82.76%	-	ADA	-	OK	-
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 417 Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 178543	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Jumlah tenaga kerja keseluruhan	0.23%	-	ADA	-	OK	-
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 10516.4 Jumlah tenaga kerja = 178543	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan). Jumlah tenaga kerja	5.90%	-	ADA	-	OK	-
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 32 Jumlah Perusahaan = 136	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Jumlah Perusahaan Perusahaan	23.53%	-	ADA	-	OK	-
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 216 Jumlah pencaker yang terdaftar = 1144	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan. Jumlah pencaker yang terdaftar	18.88%	-	ADA	-	OK	-



2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD = 1018475186 Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD = 1104458136394	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD. Jumlah seluruh belanja langsung APBD	0.092%	-	ADA	-	OK	-
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 18 Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 108021	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	0.017%	-	ADA	-	OK	-
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 8 Jumlah penduduk perempuan = 171242	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan. Jumlah penduduk perempuan	4.67%	-	ADA	-	OK	-
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 133196 Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 43419	Jumlah cadangan pangan. Jumlah kebutuhan pangan	306.77%	-	ADA	-	OK	-
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 609.834 seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 609.834	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi. seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	100%	-	ADA	-	OK	-
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 1826.633 Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 592.668	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	308.20%	-	ADA	-	TIDAK OK	Data dan data dukung yang disajikan tidak relevan. Data yang disajikan adalah data tentang penetapan status ruas jalan dan data kondisi jalan yang tidak mantap. Sedangkan data yang diminta adalah penetapan jumlah tanah untuk pembangunan fasilitas umum dan data jumlah kebutuhan tanah untuk



										pembangunan fasilitas umum.
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 609.834 Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 609.834	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan Diterbitkan peruntukannya di atas izin lokasi. Luas izin lokasi yang diterbitkan.	100%	-	ADA	-	OK	-
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 78 Jumlah penerima tanah obyek landreform = 300	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; . Jumlah penerima tanah obyek landreform	26%	-	ADA	-	OK	-
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 609.834 Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 609.834	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan IzinMembuka Tanah. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan.	100%	-	ADA	-	OK	-
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 2 Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 2	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	100%	-	ADA	-	OK	-
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	65.63%	IKA : 58.42 IKU : 91.85 IKL : 43.54 IKLH : 68.70	-	-	OK	-
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 37980.08 Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 38337.3	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani. Jumlah seluruhTotal vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota.	99.07%	-	ADA	-	OK	-
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 90 usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 102	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota. Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	88.23%	-	ADA	-	OK	-
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib	Administrasi Kependudukan dan Sipil	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah Pencatatan melakukan perekaman.	98.46%	-	ADA	-	OK	-



	Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		= 247220 Jumlah penduduk wajib KTP-el = 251091	Jumlah penduduk wajib KTP-el						
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Sipil	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 43397 Jumlah anak usia 0-17 tahun = 103523	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA. Jumlah anak usia 0-17 tahun	41.92%	-	ADA	-	OK	-
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Sipil	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 105874 Jumlah anak usia 0-18 tahun = 108021	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir. Jumlah anak usia 0-18 tahun	98.01%	-	ADA	-	OK	-
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 2 Jumlah PD = 40	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Jumlah OPD	5%	-	ADA	-	OK	-
2.l.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 2 Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 2	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun)	100	-	ADA	-	OK	-
2.l.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1 Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 85	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	1.17%	-	ADA	-	OK	-
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana		-	2.32	-	ADA	-	OK	-
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 53277 Jumlah Pasangan Usia Subur = 63598	Jumlah peserta KB Aktif Modern. Jumlah Pasangan Usia Subur	83.77%	-	ADA	-	OK	-
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 5473 Jumlah Pasangan Usia Subur = 63968	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani. Jumlah Pasangan Usia Subur	8.55%	-	ADA	-	OK	-



2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	<p>Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <p>o $IK1 (\text{angkutan jalan}) = (\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut}$</p> <p>o $IK2 (\text{Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = \text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas} \div \text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, 	-	0.33	-	ADA	-	OK	-
-------	---	-------------	--	---	------	---	-----	---	----	---



			<p>bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>							
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	-	0.08	-	ADA	-	OK	-
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	<p>Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 30</p> <p>Jumlah PD = 40</p>	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Jumlah OPD	75%	-	ADA	-	OK	-
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	<p>Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 7</p> <p>Jumlah Layanan Publik = 7</p>	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Jumlah Layanan Publik	100%	-	ADA	-	OK	-
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	<p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 4276</p> <p>Jumlah penduduk = 348505</p>	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Jumlah penduduk	1.22%	-	ADA	-	OK	-
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	<p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 14</p> <p>Jumlah seluruh koperasi = 168</p>	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset. Jumlah seluruh koperasi	8.33%	-	ADA	-	TIDAK OK	Bukti dukung memang telah menyajikan data di tahun sebelumnya dengan data di tahun sekarang, tetapi belum menggambarkan koperasi berkualitas. Agar



										jumlah koperasi yang kualitasnya meningkat dapat diukur berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki predikat sekurang-kurangnya ABB (Cukup Berkualitas). Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan menjadi tanggung jawab penuh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK)-
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 24572 Jumlah usaha mikro keseluruhan = 34868	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha. Jumlah usaha mikro keseluruhan	70.47%	-	ADA	-	OK	-
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -265422680000 Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 1039043640000	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	-25.54%	-	ADA	-	OK	-
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 29 Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 82773	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	0.035%	-	ADA	-	OK	-
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota. Jumlah	0.045%	-	ADA	-	OK	-



			= 37 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 82773	pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota						
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	-	5%	-	ADA	-	OK	-
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 40 jumlah PD = 40	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Jumlah OPD	100%	-	ADA	-	OK	-
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 40 jumlah PD = 40	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. jumlah OPD	100%	-	ADA	-	TIDAK OK	Data dukung belum andal. Diharapkan dilampirkan juga sebagian lembaran Renja OPD (pada BAB II) yang memperlihatkan Data Statistik digunakan dalam evaluasi pembangunan daerah pada sektor yang berkaitan. Tidak Hanya berupa Daftar SKPD yang menggunakan data statistik. Dalam surat pernyataan, jika kinerja dilaksanakan pada tahun 2021, maka untuk penyusunan RKPD/Renja SKPD tahun 2022. Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib	Persandian	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 419	Jumlah nilai per area keamanan informasi. Jumlah area penilaian	64.96%	-	ADA	-	OK	-



	Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		Jumlah area penilaian = 645							
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 16 Jumlah cagar budaya yang terdata = 16	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan. Jumlah cagar budaya yang terdata	100%	-	ADA	-	TIDAK OK	bukti dukung belum menampilkan kegiatan pelestarian cagar budaya.
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan		-	22.24%	sudah dilaksanakan survey dan nilainya sesuai data terlampir	ADA	-	OK	-
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan		-	NIHIL	-	ADA	-	OK	-
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	14066.25	$a = 330$ $i = 55.187$ $s = 748$ $j = 0$	ADA	-	OK	-
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	-	1089.17	$m=0$ $b=0$ $g=5188$ $a=748$ $c=112$ $i=0$	ADA	-	OK	-



3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 65929.49 Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan		Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	satuan dalam ton. Data tersebut merupakan data riil dari DKPP karena data dari One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate (data tersedia tahun 2019 dan 2020)	ADA	-	OK	Data tersebut bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, diakui karena data dari One Data KKP belum tersedia
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -2 Jumlah wisatawan tahun n-1 = 2	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1). Jumlah wisatawan tahun n-1	-100	-	ADA	-	OK	-
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -136570 Jumlah wisatawan tahun n-1 = 330241	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1). Jumlah wisatawan tahun n-1	-41.35	-	ADA	-	OK	-
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah kamar yang terjual = 218 Jumlah kamar yang tersedia = 234	Jumlah kamar yang terjual. Jumlah kamar yang tersedia	93.16%	-	ADA	-	OK	-
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 0.004 Total PDRB Berlaku	-	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0		ADA	-	OK	-
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata = 0.04 Total realisasi PAD	-	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0		ADA	-	OK	-
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 140.65 luas panen = 31.695	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun. luas panen	443.76%	-	ADA	-	OK	-
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -4032 Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 4032	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1). Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-100	-	ADA	-	OK	-
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan		-	0	-	ADA	-	OK	-
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0	-	ADA	-	OK	-



3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 2530 Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 37398	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	6.76%	-	ADA	-	OK	-
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Realisasi = 36387177 RDKK = 36387177	Realisasi. RDKK	100	-	ADA	-	OK	-
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 735 jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 1462	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	50.27%	-	ADA	-	OK	-
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 80 Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 3378	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1). Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	2.37%	-	ADA	-	OK	-
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian		-	100	-	ADA	-	OK	-
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 82 Jumlah izin yang dikeluarkan = 82	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	100%	-	ADA	-	OK	-
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	NIHIL	ADA	-	OK	-
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	NIHIL	ADA	-	OK	-
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	-	100	-	ADA	-	OK	lampirkan bukti dukung fisik,



			<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/energy - Informasi tenaga kerja 							capaian IKK outcome gunakan perhitungan dengan rumus
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi		-	0	-	ADA	-	OK	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan Urusan Transmigrasi
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 244249329986 Jumlah APBD = 1881305839322.4	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan. Jumlah APBD	12.98%	-	ADA	-	TIDAK OK	Jumlah pegawai yang disampaikan adalah jumlah pada Dinas Kesehatan dan Pendidikan, bukan jumlah belanja pegawai untuk guru dan Nakes, sehingga masih perlu disesuaikan dengan dikurangi jumlah pegawai non guru dan non nakes pada dinas-dinas tersebut.
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah PAD = 195670930777 Jumlah Pendapatan pada APBD = 14755190000	Jumlah PAD. Jumlah APBD non migas	1326.11%	-	ADA	-	TIDAK OK	Jumlah PDRB Non Migas perlu disesuaikan karena data yang ada dalam milyar rupiah, bukan dalam juta. Jumlah PDRB non migas juga belum dikurangi dengan Pertambangan dan Penggalian
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	-	2.823	-	ADA	-	OK	-
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	-	3	-	ADA	-	OK	-
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer	60.36%	-	ADA	-	OK	-



			= 1135502088203.5 jumlah belanja APBD = 1881305839322.4	expenditures. jumlah belanja APBD						
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	-	10	2011 s.d. 2021 WTP	ADA	-	OK	-
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0 jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 1490	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n. jumlah kontrak keseluruhan tahun n.	0	Tidak ada kontrak konstruksi di atas 5 Milyar-	ADA	-	OK	-
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 1490 Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 6241	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode dengan kompetitif. Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	23.87%	-	ADA	-	OK	-
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan = 908856308412.81 total belanja operasional dan modal = 1852938727798.4	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan. total belanja langsung	49.05%	-	ADA	-	OK	-
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1804 Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah = 632	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas. Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	285.44%	-	ADA	-	OK	-
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 332 seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1716	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan). seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.34%	-	ADA	-	OK	-
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 165 seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 332	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi. seluruh jumlah pegawai non Fungsional(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	49.67%	-	ADA	-	OK	-
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Realisasi Belanja = 1881305839322.4 Total Belanja APBD = 2220694238312	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi. total belanja APBD dikurangi satu	15.28%	-	ADA	-	OK	-



4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Total PAD dalam realisasi = 195670930777.1 Total PAD dalam APBD = 167212726504	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi, dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	17.02%	-	ADA	-	OK	-
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	-	2	-	ADA	-	OK	-
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Nilai realisasi SILPA = 607021151812.73 total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1535660520668	Nilai realisasi SILPA. total belanja anggaran tahun dalam sebelumnya	39.53%	-	ADA	-	OK	-
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 2728794139 Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 2580416867	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	105.75%	-	ADA	-	OK	-
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 95 total jumlah dokumen yang telah dirinci = 95	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda. total jumlah dokumen yang telah dirinci	100%	-	ADA	-	OK	-

Dari Tabel di atas dapat dilihat IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut masing-masing urusan dari total IKK Outcome yang berjumlah 123 IKK sudah terpenuhi beserta data dukung IKK LPPD dengan penilaian dari APIP (Tim Review dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut) dengan Status “OK” berjumlah 117 IKK dan Status “Tidak OK” berjumlah 6 IKK. Sehingga persentase pemenuhan IKK adalah sebesar 95%. Sedangkan untuk skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) LPPD Tahun 2022 untuk Tahun Anggaran 2021 nilai/skor masing-masing Kabupaten dari Tim EPPD Pusat belum terbit.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Capaian IKK masing-masing urusan masih rendah dan bahkan nihil karena realisasi kegiatan untuk memenuhi capaian IKK dari SKPD belum memenuhi target atau bahkan kegiatannya belum/tidak dilaksanakan
- Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*
- Keterlambatan SKPD dalam menginput capaian dan data dukung IKK LPPD
- Kurangnya komitmen SKPD dalam merencanakan penganggaran prioritas kegiatan yang mendukung pemenuhan target capaian IKK LPPD

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis para Tim Penyusun LPPD
- Peningkatan kualitas pengumpulan data IKK LPPD dan evaluasi internal seluruh SKPD
- Mengoptimalkan e-LPPD untuk memudahkan dan mempercepat pengisian capaian dan data dukung IKK LPPD
- Adanya *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan pemenuhan capaian IKK LPPD
- Menyampaikan surat kepada APIP untuk melakukan reviu terhadap dokumen LPPD SKPD

Rencana Aksi :

- Mengadakan sosialisasi penyusunan LPPD dengan narasumber dari Tim EPPD Provinsi dan Pusat
- Mengajukan kepada pimpinan usulan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan pemenuhan capaian IKK LPPD
- Adanya penilaian terhadap LPPD SKPD layaknya seperti SPIP, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SAKIP



Pelaksanaan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penyampaian IKK LPPD secara Desk SKPD



SASARAN 4 Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga
Indikator : Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2022 adalah 100%. Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti di Tahun 2022 sebanyak 25 Dokumen.

DAFTAR KERJASAMA DAERAH TAHUN 2022

I. NOTA KESEPAKATAN

NO.	PERIHAL	NOMOR DAN TANGAL	MASA BERLAKU
1	Nota Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengadaan sarana Penunjang Mako Polda Kalimantan Selatan	04/VIII/L06.1.1.4./2022 188.45/ 72-KB/ KUM/ 2022 4 Juli 2022	2 (dua) tahun
2	Nota Kesepakatan antara TVRI Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Publikasi, Promosi dan Sosialisasi Program dan Hasil-Hasil Pembangunan	188.45/ -NK/ KUM/ 2022 9 Agustus 2022	5 (lima) tahun



3	Nota Kesepakatan antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	432/KTR/VIII-04/1222 432/3305/BPJS 5 Desember 2022	5 (lima) tahun
TOTAL			3 Dokumen

II. KESEPAKATAN BERSAMA

NO.	PERIHAL	NOMOR DAN TANGAL	MASA BERLAKU
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Kintap tentang Sinergitas Pembinaan Sepakbola Usia Dini	188.45/2-KB/ KUM/ 2022 HK.107/01/01 UPP.KTP-2022 17 Januari 2022	5 (lima) tahun
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	188.45/ 03-KB/ KUM/ 2022 180/ 02-KSB/HST/2022 31 Januari 2022	2 (dua) tahun
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.	188.45/ 7-KB/ KUM/ 2022 03 / KSB-TKKSD/2022 21 Februari 2022	2 (dua) tahun
4	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan STIA Bina Banua Banjarmasin tentang Pengembangan SDM, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	188.45/ 16/ KB/ KUM/ 2022 074/STIA-YPBB/KS/IV/2022 18 April 2022	2 (dua) tahun
5	Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.	058.1/UNIO/KS/2022 188.45/24-KB/KUM/2022 24 Mei 2022	4 (empat) tahun



6	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengelolaan Pelayanan pada Bidang Kesehatan.	86/KSB-PEMOTDA/2022 188.45/60-KB/KUM/2022 2 Juni 2022	5 (lima) tahun
7	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Kepolisian Resor Tanah Laut tentang Dukungan Penyaluran BBM Solar Nelayan melalui Sub Penyalur	188.45/ 27-KB/ KUM/ 2022 B/15/VII/HUK.8.1.1/2022 14 Juli 2022	2 (dua) tahun
8	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan RS. Borneo Citra Medika tentang Pelayanan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi	188.45/ 29-KB/ KUM/ 2022 9 Agustus 2022	2 (dua) tahun
9	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Politeknik Negeri Tanah Laut tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut	188.45/ 62-KB/ KUM/ 2022030/PL40/KS/202231 Oktober 2022	3 (tiga) tahun
10	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan PT. SOKA WISATA tentang Pengelolaan Kolam Renang Tirta Kenanga Kab. Tanah Laut	188.45/ 63-KB/ KUM/ 2022 370-SW-SP-X-2022 31 Oktober 2022	5 (lima) tahun
11	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengendalian Inflasi di Kota Banjarmasin	100/005/KSB/BAGPEM/XII/2022 '188.45/ 75-KB/ KUM/ 2022 16 Desember 2022	5 (lima) tahun
TOTAL			11 Dokumen

III. PERJANJIAN KERJASAMA

NO.	PERIHAL	NOMOR DAN TANGAL	MASA BERLAKU
1	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kerjasama Pengembangan/ Pemakaian Aplikasi Pengembangan SDM	134.4/70/I/DISKOMINFO 134.4/20/I/DISKOMINFO 31 Januari 2022	2 (dua) tahun



2	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pelaksanaan Absensi terkait Mekanisme Pengukuran Kinerja dan Disiplin dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	01 TAHUN 2022 800/01-PKS/BKPSDMD/2022 31 Januari 2022	2 (dua) tahun
3	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pelaksanaan Asistensi terkait Mekanisme Pengukuran Kinerja dan Disiplin dalam rangka Tambahan Penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.	800/ 021/ BKPSDM/2022 01 Tahun /2022 21 Februari 2022	2 (dua) tahun
4	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Mekanisme Penerapan Sistem Informasi Penilaian Kinerja ASN dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.	134.4/ 70/I/ Diskominfo 800/90/Diskominfo.2022 21 Februari 2022	2 (dua) tahun
5	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS).	470/43/Disdukpencahil/2022 470/207/Disdukcapil/2022 21 Februari 2022	2 (dua) tahun



6	Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis bagi Dokter Utusan Khusus..	2366.5/UNIO/F08/KS/2022 800/840-Bang.2/BKPSDM/2022 25 Mei 2022	4 (empat) tahun
7	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Bank KalSel Cabang Pelaihari tentang Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Bank KalSel Cabang Pelaihari.	188.45/ 61-PKS/ KUM/ 202213/PKS/UMP-PIH/20221 Juli 2022	Sejak Penandatanganan s.d dicairkannya seluruh deposito
8	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan RS. Borneo Citra Medika tentang Pelayanan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi	470/ / Disdukpencapil/2022 9 Agustus 2023+C35	2 (dua) tahun
9	Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kab. Tanah Laut dalam rangka Universal Health Coverage	188.45/ 32-Add-PKS/ KUM/ 2022 74/KTR/VIII-04/0822 29 Agustus 2022	12 bulan (1 Jan-31 Des 2022)
10	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Politeknik Negeri Tanah Laut tentang Pengintegrasian Program Kmapung Iklim dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	49.1-TL/DPRKPLH/X/2022 031/PL40/KS/2022 31 Oktober 2022	3 (tiga) tahun
11	Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM Kabupaten Tanah Laut dan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi (Assesment) Bagi Peserta Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	800/1713-Bang.2/BKPSDM/XII/2022 '577/UM-BJM/FPsi/S.1/ 2022 19 Desember 2022	Terhitung sejak tanggal ditandatangani s.d terbitnya laporan hasil assesment dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama
TOTAL			11 Dokumen

TOTAL KESELURUHAN : 25 Dokumen

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya koordinasi SKPD terkait mengenai rencana awal penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah
- Penyusunan Dokumen Kerjasama yang tidak sesuai dengan SOP

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang akan melakukan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah mengenai teknis penyusunan Dokumen Kerjasama
- Menyampaikan SOP terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah
- Penetapan Peraturan Daerah terkait Kerjasama Daerah

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait rencana kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang akan direalisasikan di tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.
- Menyampaikan SOP dan peraturan-peraturan terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah agar SKPD dapat lebih awal menyampaikan *draft* dokumen Kerja Sama Daerah sehingga Bagian Pemerintahan dapat memfasilitasi kegiatan secara maksimal.



Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan dan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

- 1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan pagu Rp1.053.422.440,00 dan terealisasi sebesar Rp712.494.262,00 atau 67,63% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.
- 2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan pagu Rp1.053.422.440,00 dan terealisasi sebesar Rp712.494.262,00 atau 67,63% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.
- 3) Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan indikator Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti pada tahun 2022 tidak terdapat target dan capaian karena perubahan nomenklatur dari yang semula terdapat di Kegiatan Otonomi Daerah menjadi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Sasaran Strategis / Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan indikator Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan pagu Rp290.131.000,00 terealisasi Rp264.455.080,00 dengan realisasi keuangan sebesar 91,15% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.
- 4) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD dengan indikator Persentase Pemenuhan IKK di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daearah dengan pagu Rp164.097.124,00 terealisasi Rp160.288.780,00 dengan realisasi keuangan sebesar 97,68% dan dilaksanakan oleh 4(empat) orang SDM.
- 5) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga dengan indikator Persentase Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti di tunjang dengan



Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri dengan pagu Rp122.898.240,00 terealisasi Rp104.510.650,00 dengan realisasi keuangan sebesar 85,04% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM

Dalam mencapai sasaran, Bagian Pemerintahan memiliki 1 (satu) Program dengan 4 (empat) Kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan					
2	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.053.422.440	712.494.262	67,63	4 (empat) orang	
3	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	290.131.000	264.455.080	91,15	4 (empat) orang	
4	Persentase Pemenuhan IKK SKPD		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan					
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	164.097.124	160.288.780	97,68	4 (empat) orang	
5	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah					
			Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	122.898.240	104.510.650	85,04	4 (empat) orang	



Analisa Capaian Sasaran Strategis
Kepala Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	90%	97,5%	108,33%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 <i>"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"</i>
2	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	40%	100%	250%	
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	95%	95%	
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	90%	90%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis
 Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	%	92,5	65%	80%	97,5%	108,33%
2	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	%	55	70%	30%	100%	333%
3	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	%	100	92,5	100%	95%	95%
4	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	%	100	100%	100%	90%	90%

* : data sementara BPS Kabupaten Tanah Laut

❖ Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Bagian Organisasi dari ke lima indikator adalah 145,26, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 terealisasi sebesar 97,5% dari target 90%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 108,33%.
- 2) Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60 terealisasi sebesar 100% dari target 40%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 250%.
- 3) Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 terealisasi sebesar 95% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 95%.
- 4) Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

- 5) Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif terealisasi sebesar 90% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 90%.

❖ **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

- 1) Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10, Tahun 2022 adalah sebesar 100%, mengalami peningkatan sebesar 32,5% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 65%.
- 2) Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60, Tahun 2022 adalah sebesar 100% (40 SKPD dari 40 SKPD), mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 70% (28 SKPD dari 40 SKPD).
- 3) Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 Tahun 2022 adalah 95%, persentasenya mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 92,5%.
- 4) Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2022 adalah 100% sama dengan Tahun 2021 yang juga sebesar 100%.
- 5) Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif tahun 2022 adalah 90%, hasil ini mengalami perubahan dari Tahun sebelumnya sebesar 100%.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**



NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	62,5 %	96,15 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal cukup	10%	12,5 %	125%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	10%	5%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi



	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	-	-	-	70%	92,5%	132,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD	-	-	-	70	55	78.57 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	-	-	-	15%	17,5%	116,6 7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
		Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase SKPD dengan nilai komponen	-	-	-	-	-	-	80%	65%	81,25 %	90%	97,5 %	108,3 3%	100%	-	-	Bagian Organisasi



	Instansi Pemerintah	pelaporan kinerja minimal 10																
	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	-	-	-	-	-	-	30%	70%	233,33%	40%	100%	250%	50%	-	-	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	-	-	-	-	-	-	100%	92,5	92,5%	100%	95%	95%	100%	-	-	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Organisasi
	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	-	-	Bagian Organisasi

❖ Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

SASARAN 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Minimal 10

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	80%	97,5%	108,33%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 telah dilaksanakan kegiatan :

- 1) Melaksanakan pendampingan penyusunan kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Melaksanakan analisa Laporan Kinerja seluruh SKPD.
- 3) Melaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja 40 SKPD yang dilaksanakan pada pada bulan Februari Tahun 2022 di Ruang Rapat Barakat Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berikut disajikan nilai hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKDP pada komponen Pelaporan Kinerja di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021.

Hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKDP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	NAMA SKPD	NILAI KOMPONEN PELAPORAN KINERJA
1	SEKRETARIAT DAERAH	12.495
2	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	12.495
3	DINAS KESEHATAN	11.505
4	INSPEKTORAT KABUPATEN	12.000
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.505
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	11.505



7	DINAS PARIWISATA	11.505
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.505
9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	11.505
10	SEKRETARIAT DPRD	11.505
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.000
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	11.600
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12.000
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.600
15	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11.505
16	KECAMATAN TAKISUNG	11.505
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.505
18	KECAMATAN BAJUIN	10.500
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.505
20	KECAMATAN PELAIHARI	10.995
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.995
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.500
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10.500
24	KECAMATAN TAMBANG ULANG	10.995
25	DINAS SOSIAL	10.500
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.100
27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10.800
28	KECAMATAN PANYIPATAN	10.500
29	KECAMATAN JORONG	11.100
30	KECAMATAN BUMI MAKMUR	11.000
31	DINAS PERHUBUNGAN	10.100
32	KECAMATAN KURAU	10.995
33	KECAMATAN BATU AMPAR	10.800
34	KECAMATAN KINTAP	10.800
35	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	11.700

36	KECAMATAN BATI-BATI	11.600
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.500
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.400
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.005
40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	9.500

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen pelaporan kinerja, ada 39 SKPD dengan nilai di atas 10 dan 1 SKPD dengan nilai di bawah 10 atau sebesar 97,5%. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Kurangnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pejabat struktural dalam kegiatan Akuntabilitas Kinerja.
- Kurang selarasnya dokumen AKIP Karena laporan kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan.
- Belum dimanfaatkannya informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis analisis para penanggungjawab program serta tim penyusun Laporan kinerja
- Tetap dilaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja seluruh SKPD.
- Peningkatan kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.
- Pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.
- Terus dilakukan kegiatan penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagai bentuk reward dan punishment terhadap kinerja organisasi.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Terus memberikan reward dan punishment kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang diperoleh sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2021.

- Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 123.274.913 dan terealisasi sebesar Rp 97.114.202 atau 78,78% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD

SASARAN 2 Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD

Indikator 1 : Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	40%	100%	250%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60 terealisasi sebesar 100% (40 SKPD dari 40 SKPD) dari target 40% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 250%.

Realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 30%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 70%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capainnya adalah sebesar 200% dengan target 50%.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kabupaten terhadap 8 (delapan) area perubahan Tahun 2021 :

DAFTAR NILAI HASIL EVALUASI PMPRB

NO	SKPD	NILAI PEMENUHAN (14,6)	NILAI REFORM (21,7)	NILAI TOTAL (36,30)	PERSENTASE %	KATEGORI
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.30	20.86	35.16	96.86	AA
2	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	14.57	19.60	34.17	94.13	AA
3	DINAS PARIWISATA	12.69	21.28	33.97	93.58	AA
4	SEKRETARIAT DAERAH	13.59	20.02	33.61	92.59	AA
5	INSPEKTORAT	13.04	20.56	33.60	92.56	AA
6	DPRKPLH	13.46	19.87	33.33	91.82	AA
7	BKPSDM	13.73	19.54	33.27	91.65	AA
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.74	19.97	32.71	90.11	AA
9	KECAMATAN KINTAP	12.42	20.20	32.62	89.86	A
10	DPMPTSP	12.70	19.33	32.03	88.24	A
11	DP2KBP3A	12.41	19.40	31.81	87.63	A



12	DPUPRP	12.49	19.04	31.53	86.86	A
13	KECAMATAN PANYIPATAN	12.29	18.63	30.92	85.18	A
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.95	19.70	30.65	84.44	A
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	11.87	18.69	30.56	84.19	A
16	DINAS PERHUBUNGAN	9.95	19.60	29.55	81.40	A
17	KECAMATAN TAMBANG ULANG	12.46	16.86	29.32	80.77	A
18	BPKAD	9.79	19.03	28.82	79.39	BB
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10.51	18.06	28.57	78.71	BB
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.70	17.30	28.00	77.13	BB
20	DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	9.48	18.43	27.91	76.89	BB
21	DINAS KESEHATAN	10.17	17.44	27.61	76.06	BB
22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	10.92	16.61	27.53	75.84	BB
24	KECAMATAN JORONG	10.19	16.90	27.09	74.64	BB
25	KECAMATAN BAJUIN	9.52	17.56	27.08	74.60	BB
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.03	17.56	26.59	73.25	BB
27	DPMPD	9.43	16.66	26.09	71.87	BB
28	KECAMATAN TAKISUNG	10.22	15.83	26.05	71.76	BB
29	SEKRETARIAT DEWAN	9.89	15.93	25.82	71.13	BB
30	KECAMATAN BATI-BATI	10.29	14.79	25.08	69.08	B
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.43	14.93	24.36	67.11	B
32	KECAMATAN KURAU	9.26	14.80	24.06	66.28	B
33	SATPOL PP	9.87	13.94	23.81	65.59	B
34	DINAS SOSIAL	8.72	14.70	23.42	64.51	B
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.44	15.85	23.29	64.15	B
36	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8.99	14.24	23.23	63.99	B
37	RSUD H. BOEJASIN	8.98	14.11	23.09	63.61	B
38	KECAMATAN BUMI MAKMUR	8.43	14.32	22.75	62.67	B
39	KECAMATAN PELAIHARI	7.17	15.58	22.75	62.67	B
40	KECAMATAN BATU AMPAR	12.49	10.05	22.54	62.09	B
41	DINAS PENDIDIKAN	8.81	13.47	22.28	61.37	B

Bagian Organisasi merupakan sekretariat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Untuk mencapai indikator nilai komponen area perubahan SKPD dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi 8 (delapan) area perubahan RB
- Melaksanakan bimtek agen perubahan seluruh SKPD
- Menginternalisasikan rencana aksi Reformasi Birokrasi dan kalimat-kalimat positif dalam budaya kerja.
- Pelaksanaan Quick Win RB
- Pelaksanaan program prioritas RB sesuai Roadmap RB 2020-2024.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum optimalnya internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah
- Belum optimalnya peran agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.
- Belum optimalnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Rencana Aksi:

- Optimalisasi internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah
- optimalisasi agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
- Melaksanakan rapat Tim secara berkala agar reformasi birokrasi bisa menjalankan tugas secara optimal.



Dokumentasi Kegiatan Evaluasi RB Tahun 2022

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 123.274.913 dan terealisasi sebesar Rp 97.114.202 atau 78,78% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.

SASARAN 3 Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Indikator 1 : Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	95%	95%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 pada Tahun 2022 adalah 95%, persentasenya mengalami kenaikan daripada Tahun 2021 sebesar 92,5%. Pada Tahun 2022 nilai SKM Kabupaten Tanah Laut sebesar 85,65 dengan kategori **"BAIK"**. Rata-rata persentase nilai SKM masing-masing SKPD bisa dikatakan Baik, karena nilai interval yang didapat oleh masing-masing SKPD antara 76,61-88,30.

Dari 40 SKPD yang memperoleh nilai SKM Minimal 80, ada 2 SKPD yang memperoleh nilai dibawah 80 yaitu Dinas Pariwisata (79,31), dan Kecamatan Jorong (79,65), akan tetapi untuk nilai tersebut masih dikatakan BAIK kalau dilihat dari nilai intervalnya.

Pada Tahun 2022 ada 9 SKPD yang kategori nilai SKM nya kategori **"SANGAT BAIK"** yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (94,02), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (94,22), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (91,34), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (91,33), Dinas Sosial

(91,48), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (89,51), Dinas P2KBP3A (89,05), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (89,61), dan Kecamatan Bumi Makmur (91,75).

Ada beberapa SKPD/Unit Pelayanan yang unsur pelayanannya dianggap paling memuaskan oleh responden dan mencapai angka 4,00, yang terdapat pada yang terdapat pada Bappeda, BPKAD, BPBD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Bumi Makmur. Sedangkan unsur pelayanan yang kurang memuaskan dengan angka dibawah 3,00 terdapat pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

Kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan salah satunya dikarenakan adanya kegiatan **Manunggal Tuntung Pandang yaitu kegiatan bermalam di desa untuk Bupati dan seluruh jajaran** dan Perangkat Daerah. Dimana pada saat manunggal tuntung pandang dilaksanakan, SKPD pemberi layanan misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, DPMPTS memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat tanpa mereka harus datang langsung ke Kantor SKPD pemberi layanan

Rekomendasi :

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.

- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan Survei Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, survei bisa dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Masih ada beberapa SKPD yang kualitas pelayanannya kurang baik
- Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan laporan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada SKPDnya sehingga menghambat dalam penyusunan Laporan SKM Kabupaten.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan pada SKPD/Unit pelayanan dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan Survei Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, survei bisa dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Rencana aksi

- Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat oleh pihak eksternal;
- Sejak Tahun 2022 SKPD diminta untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara triwulan, dengan mengisi link yang telah dibuat oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut.
- Pemberian reward and punishment terhadap SKPD dengan predikat layanan terburuk dan terbaik.

Indikator 2 : Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Untuk capaian SKPD yang memiliki SOP Tahun 2022 adalah sebesar 100%, persentasenya sama dengan Tahun 2021 yaitu 100%.

Dari beberapa SKPD yang sudah memiliki SOP, ada beberapa SKPD telah melakukan revisi terhadap SOPnya masing-masing menyesuaikan dengan PERDA SOTK Nomor 6 Tahun 2016. Akan tetapi berdasarkan hasil inventarisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dikatakan bahwa data Peraturan Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan dari tahun 2015 s.d 2021 ditemukan penetapan Standar Pelayanan Prosedur (SOP) dengan Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga penetapan SOP dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (8), Pasal 7 ayat (2), Pasal 13, Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, untuk tahun 2022 bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sudah melakukan inventarisir ulang sekaligus melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada pada SKPD se Kabupaten Tanah Laut.

Kedepannya diharapkan SOP yang ada pada setiap SKPD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 sehingga bisa dirangkum dalam 1 Keputusam Bupati Tanah Laut.

Adapun program/kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Penataan Organisasi/Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.117.325.689,- dengan realisasi sebesar Rp.97.524.800,- (83,12%).

Untuk serapan anggaran sdh melebihi 50% dari pagu yang ada, hal ini disebabkan karena Kabupaten Tanah Laut sudah mulai berada pada zona kuning, sehingga beberapa kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.

SASARAN 4 Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Analisa dan Evaluasi Jabatan Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Kelembagaan yang Efektif

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	90%	90%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif tahun 2022 adalah 90%, hasil ini mengalami perubahan dari Tahun sebelumnya sebesar 100%.

Pada tahun 2022 terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan evaluasi kelembagaan, yang berdampak pada diadakan perubahan dan penyesuaian SOTK. Dari 40 (empat puluh) SKPD yang ada, sebanyak 4 (empat) SKPD yaitu Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengalami perubahan SOTK yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja. Sehingga ada 4 (empat) SKPD atau 10% dari keseluruhan Perangkat Daerah dilakukan perubahan dan penyesuaian penyesuaian, yang artinya 90% Perangkat Daerah sudah memiliki kelembagaan yang efektif.

Perubahan dan penyesuaian dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. *Pertama*, perubahan pada Dinas PRKPLH dilakukan karena adanya duplikasi fungsi pada Bidang Tata Kota dan Kebersihan setelah dibentuknya UPTD Kebersihan, sehingga perlu

penyesuaian untuk mengalihkan tugas dan fungsi dari Bidang Tata Kota dan Kebersihan ke UPTD Kebersihan. *Kedua*, perubahan nomenklatur setiap bidang pada Dinas PMD dilakukan untuk pemerataan tugas dan fungsi yang belum merata, sehingga pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dapat lebih efektif efisien. *Ketiga*, pemutakhiran data yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mempengaruhi kelembagaan BKPSDM Tanah Laut, adanya ketidaksesuaian antara fungsi dengan sumber pendanaan mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berjalan tidak berjalan optimal sehingga dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi. *Keempat*, dilakukan penyesuaian kedudukan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas pada Inspektorat sebagai unsur Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 117.226.852,- dan realisasinya sebesar Rp. 78.260.873,- atau 66.76%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menunjang kegiatan Tim kegiatan di bidang kelembagaan Tahun anggaran 2022 dan Belanja Barang Jasa, seperti ATK, narasumber, cetak, makanan dan minuman kegiatan, serta perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 berupa :

1. Rapat Tim Kelembagaan :

- a. Ekspose tentang usulan perubahan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Ekspose tentang usulan perubahan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- c. Ekspose tentang usulan perubahan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Ekspose tentang usulan pembentukan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- e. Ekspose tentang usulan peningkatan status *Public Safety Center (PSC) 119 Tanah Laut* menjadi UPTD *Public Safety Center (PSC) 119 Tanah Laut*;

- f. Rapat Tim membahas perubahan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menjadi Badan Perencanan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. Rapat Tim membahas rancangan perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Perangkat Daerah; dan
 - h. Rapat Tim membahas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN.
2. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan;
 3. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Perangkat Daerah dan Uraian Tugas Pelaksana;
 4. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah;
 5. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD baru;
 6. Melaksanakan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah;

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Realisasi Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab

NO	PERBUP	TENTANG
1	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2022	Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2022	Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut.
3	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2022	Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut
4	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 54 Tahun 2022	Nomenklatur dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2022	Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut
6	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 59 Tahun 2022	Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut
7	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2022	Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut
8	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
9	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2022	Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut

NO	PERBUP	TENTANG
10	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut
11	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 142 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut
12	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 143 Tahun 2022	Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
13	Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-838/I/OT.00.00/9/2022	Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dalam hal pelaksanaan penataan dan penyusunan produk hukum kelembagaan tidak serta merta hanya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan SKPD sebagai pihak yang mengusulkan perubahan kelembagaan. Ada peran Pembinaan Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Sehingga dalam penetapan produk hukum yang menaungi perubahan kelembagaan perlu lebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur, dan berproses sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Sehingga beberapa kondisi perubahan yang dilaksanakan tidak dapat langsung dilaksanakan.
- Sedang dilaksanakannya transformasi organisasi melalui penataan struktur oleh Pemerintah Pusat, sehingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan sedang banyak mengalami perubahan.

Solusi dan rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intens dengan pihak terkait terutama dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.



Foto Kegiatan Rapat Tim Kelembagaan

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

Dalam mencapai sasaran bagian organisasi memiliki Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan pagu Rp 357.827.454,00 terealisasi Rp 272.899.875,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 40,60%.

Jumlah SDM di Bagian Organisasi terdiri dari, Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi berjumlah 3 orang, Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berjumlah 3 orang, Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana berjumlah 2 orang.



Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Penataan Organisasi					
2	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	123.274.913	97.114.202	78,78%	3 Orang	
3	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80		Kegiatan Penataan Organisasi					
4	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	117.325.689	97.524.800	83,12	2 Orang	
5	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif		Kegiatan Penataan Organisasi					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	117.226.852	78.260.873	66,76	2 Orang	

Analisa Capaian Sasaran Strategis
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	101.44%	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.6	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	
4	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Perencanaan dan Keuangan terhadap capaian tahun sebelumnya :

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Perencanaan dan Keuangan
 terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	84.35	86.81	83	84.2	101.44%
4	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Level	-	Tahap Baseline SPIP	3,6	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi
5	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	%	-	-	100%	100%	100%

1. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Capaian kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan ada 5 (lima) indikator dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan, Tahun 2022 realisasi indikator ini sebesar 100% dengan target 100% dengan demikian indikator ini terlaksana 100% dengan menyiapkan bahan - bahan Renja APBD Murni dan APBD Perubahan, Penyusunan Konsep Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFT, dan JFU serta Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.
- 2) Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan, Tahun 2022 realisasi indikator ini sebesar 100% dengan target 100% dengan demikian indikator ini terlaksana 100% dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2022, Penyusunan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2022.
- 3) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, untuk Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 telah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700/261-LHE AKIP/Insp/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Hal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai 84.2 dari target 83. Sedangkan target nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebesar 84, untuk Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Daerah Tahun 2022 sedang dalam proses penilaian dengan Hasil Evaluasi yang akan terbit di Tahun 2023.
- 4) Nilai SPIP Sekretariat Daerah untuk Tahun 2022 target nilai SPIP Sekretariat Daerah dengan nilai 3,7, sedangkan untuk Tahun 2022 masih dalam tahap penilaian Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi, Penyusunan Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2022 dengan pendampingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut serta Upload Kertas Kerja Komponen SPIP yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan.
- 5) Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan Tahun 2022 memiliki target kinerja 100% dengan demikian indikator ini tercapai 100%. Kegiatan Penatausahaan Keuangan telah dilaksanakan melalui Anggaran Belanja, Penerimaan Pendapatan, Inventarisasi, Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Tahun 2022 serta Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Sekretariat Daerah Tahun 2022.

2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Sebelumnya

- 1) Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan realisasi untuk Tahun 2022 sebesar 100%, untuk Tahun 2021 tercapai 100%, sehingga capaian targetnya sama 100%.
- 2) Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan realisasi untuk Tahun 2022 sebesar 100%, untuk Tahun 2021 tercapai 100%, sehingga capaian targetnya sama 100%.
- 3) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah realisasi untuk Tahun 2022 masih dalam tahap penilaian, sedangkan untuk realiasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan nilai 84.2 (MEMUASKAN).
- 4) Nilai SPIP Sekretariat Daerah, untuk Tahun 2021 masih dalam tahap penilaian *Baseline* Maturitas SPIP Terintegrasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Maturitas SPIP Sekretariat Daerah telah di Level “3” setelah dilakukan penilaian *Quality Assurance* dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018, sedangkan untuk Tahun 2022 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dan Pendampingan Penyusunan Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2022 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5) Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan. IKU ini baru muncul pada Tahun 2022 dengan target 100% serta tercapai 100% sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun dari Tahun 2018-2023

Sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, bahwa capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III dari Tahun 2018-2023 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2019 Bagian TU dan Keuangan mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), dari target 100% dengan realisasi 100%, dalam artian kedua Indikator Kinerja tersebut tercapai 100%
2. Pada Tahun 2020 Bagian TU dan Keuangan mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja, yang mana ada salah satu Indikator Kinerja yang tidak tercapai dari target yang sudah ditetapkan yaitu Indikator Kinerja “**Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik**”,

hal ini dikarenakan tidak seluruh Bagian melakukan Survei Kepuasan secara maksimal sedangkan untuk 4 (empat) Indikator Kinerja lainnya telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan

3. Pada Tahun 2021 Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja, 3 (tiga) Indikator Kinerja telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada satu Indikator Kinerja yang belum dilaksanakan yaitu Indikator Kinerja **“Nilai SPIP Sekretariat Daerah”**. Dalam hal ini belum dilaksanakan lagi Penilaian Maturitas SPIP setelah Tahun 2018, dan baru dilaksanakan pada tahap Maturitas *Baseline* SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
4. Pada Tahun 2022 Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja, untuk 3 (Tiga) Indikator Kinerja tercapai 100%, untuk indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tercapai 101.4%, dan untuk indikator Nilai SPIP Sekretariat Daerah masih dalam tahap Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
5. Untuk Indikator Kinerja SPIP Sekretariat Daerah telah melakukan Input Data Awal dalam bentuk dokumen Excel dan Input data kedalam Kertas Kerja Penilaian Penetapan Tujuan, Penilaian Struktur dan Proses, dan Penilaian Pencapaian Tujuan.
6. Pada Tahun 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023.
7. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Selama 5 (Lima) Tahun dari Tahun 2018-2022 dan Target Kinerja Tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	Meningkatnya layanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Pimpinan/Bagian lingkup Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian TU dan Keuangan
2	Meningkatnya kualitas pelaporan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan mutu penyusunan pelaporan/kinerja yang tepat waktu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian TU dan Keuangan
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik	-	-	-	100%	82.33%	82.33 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	-	-	-	85	91.24	107.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	-	-	-	82	84.65	103.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	82	84.35	102.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Usaha dan Keuangan



	Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/ Bagian lingkup Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	82	86,81	105,86%	-	-	-	-	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	3.6	Tahap Baseline SPIP	Tahap Baseline SPIP	-	-	-	-	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang Perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan



3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	84.2	101.44%	85	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Setda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	Masih tahap Baseline SPIP Terintegrasi	Masih tahap Baseline SPIP Terintegrasi	3.7	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan

5. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Kepala Bagian

SASARAN 1 Meningkatnya Layanan Administrasi Bidang Perencanaan

Indikator : Persentase Layanan Administrasi Bidang Perencanaan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Pada Tahun Anggaran 2022 ini pelaksanaan Indikator Kinerja Layanan Administrasi Bidang Perencanaan meliputi :

1. Rencana Kerja (Renja) APBD Murni Tahun Anggaran 2023 adalah :

📌 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Murni Tahun Anggaran 2023, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/674/Perenc, Makro/2022 Tanggal 15 Maret 2022 perihal Rancangan Renja SKPD. Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dimulai dari bagian-bagian melakukan rumusan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerjanya. Kemudian rumusan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dihimpun dan diformalkan dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disampaikan ke Tim RKPD BAPPEDA.



*Dokumentasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Murni
Tahun Anggaran 2023*

- ✚ Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 oleh Tim RKPD BAPPEDA berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/42/Bappeda Hal Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2022 dan dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon III dan Eselon IV Sekretariat Daerah.



*Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Rancangan Renja Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2023*

- Rapat persiapan dalam rangka Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk membahas Rancangan Renja APBD Murni Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Persiapan Dalam Rangka Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Tahun 2023

- Rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/535/DPRD Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait KUA - PPAS Tahun Anggaran 2023. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan SKPD dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Sekretariat Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Raker dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

- ✚ Penyusunan RKA APBD Murni Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2055/BPKAD/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA-SKPKD Tahun Anggaran 2023, menindaklanjuti Surat Edaran tersebut maka Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah diminta menyusun RKA masing-masing Bagian sesuai dengan pedoman tersebut diatas.

Dilanjutkan pembahasan dan Riviurumusan program kegiatan dan sub kegiatan Renja oleh Tim APIP dan Tim TAPD dilaksanakan sesuai dengan Lampiran V Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2055/BPKAD/2022.





Dokumentasi Kegiatan Pembahasan dan riviurumusan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

- ✚ Dokumen Laporan Hasil Reviuratas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD dan RKA-PPKD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Nomor 700/286/LHR-RKA/Insp/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, dengan hasil reviu antara lain masih terdapat Koefisien yang belum diperbaiki

yaitu belanja makan dan minum dan koefisien pada belanja Banner/Spanduk.




*Dokumen Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA-SKPD dan RKA-PPKD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2023*

- 
 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) akhir APBD Murni Tahun Anggaran 2023 berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/1200/Bappeda Tanggal 20 Mei 2022 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2023.
- 
 Rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/1002/DPRD Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut Dalam Rangka Pembahasan RAPERDA Kabupaten Tanah Laut Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan SKPD dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Sekretariat Daerah.



*Dokumentasi Kegiatan Raker dengan Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Tanah Laut terkait Rancangan Renja Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2023*


2. Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah :

- 
 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/301/Perenc Makro/2022 Tanggal 7 Juni 2022 perihal Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022. Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah dimulai dari bagian-bagian melakukan rumusan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerjanya. Kemudian rumusan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dihimpun dan diformalkan

dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disampaikan ke Tim RKPD BAPPEDA.



Dokumentasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

- 
 Verifikasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2022 oleh Tim RKPD BAPPEDA berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/353/Perenc Makro/2022 Hal Verifikasi Perubahan Renja SKPD Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 dan dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon III dan Eselon IV Sekretariat Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022

- Rapat persiapan dalam rangka Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Pejabat Eselon II untuk membahas Rancangan Perubahan APBD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Pagu sesuai KUA-PPAS.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Persiapan Dalam Rangka Raker dengan Badan Anggaran DPRD Tahun Anggaran 2022

- Rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/818/DPRD Tanggal 5 September 2022 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan SKPD dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Sekretariat Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Raker Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022


- Penyusunan RKA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 910/2236/BPKAD tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) / Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PRKA-SKPKD) Tahun Anggaran 2022, menindaklanjuti Surat Edaran tersebut maka Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah diminta menyusun RKA masing-masing Bagian sesuai dengan pedoman tersebut diatas.

Dilanjutkan pembahasan dan Riviurumusan program kegiatan dan sub kegiatan Renja oleh Tim APIP dan Tim TAPD dilaksanakan sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 910/2236/BPKAD yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022.




*Dokumentasi Kegiatan Pembahasan dan Riviurubahan Renja
 Sekretariat Daerah TA 2022*

-  Setelah masing-masing Bagian menyusun RKA sesuai dengan KUA-PPAS dan dilanjutkan Raker dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan surat Ketua DPRD Nomor 170/878/DPRD Tanggal 19 September 2022 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon II sebagai wakil Pimpinan SKPD dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Sekretariat Daerah dengan pembahasan penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran.



Dokumentasi Kegiatan Raker Perubahan Renja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut TA 2022


- 
 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Peraturan Daerah Perubahan APBD No.09 LD No. 09 Tanggal 21 Oktober 2022, kemudian terbitlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor. DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022.

3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II, Eselon III dan Eselon IV berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/07/II/Perenc&Keu Tanggal 14 Februari 2022 Perihal Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Fungsional Tertentu/Subkoordinator Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Februari 2022 yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV. Pada saat rapat selain draft Perjanjian Kinerja (PK) disampaikan pula draft Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pohon Kinerja Eselon III dan Eselon IV Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah. Selanjutnya hasil koreksi draft tersebut disampaikan ke Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki dan dihimpun menjadi Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022.





Dokumentasi Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

4. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah :

-  Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, JFU dan JFT berdasarkan Nota Dinas Nomor 900/07/II/Perenc & Keu/2022 Tanggal 14 Februari Tahun 2022 Perihal Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Fungsional Tertentu dan Sub Koordinator Tahun 2022 Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) diawali dengan rapat dengan Tim Kinerja Sekretariat Daerah dalam rangka membahas Indikator Kinerja dan Target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada masing-masing Bagian.



*Dokumentasi Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun Anggaran 2022*

-  Koreksi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 untuk Eselon III, Eselon IV, JFT dan JFU Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Nota Dinas Nomor 900/17/VI/Perenc & Keu/2022 Tanggal 29 Juni 2022 Perihal Permohonan Koreksi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 untuk Eselon III, Eselon IV, JFT dan JFU Lingkup Sekretariat Daerah, dengan mendistribusikan Nota Dinas dan draft Perjanjian Kinerja (PK) ke Bagian-bagian untuk meminta koreksi Indikator Kinerja dan Target dalam Perjanjian Kinerja (PK) masing-masing Bagian. Setelah Indikator Kinerja dan Target dalam Perjanjian Kinerja (PK) dikoreksi oleh masing-masing Bagian, kemudian hasil koreksi tersebut dihimpun dan dibuat menjadi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2022.
-  Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022 Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, JFU dan JFT berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 065/3031/ORG Hal Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Tanggal 29 November 2022. Kegiatan ini dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran

Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 di sah kan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mencantumkan Penambahan Anggaran pada masing – masing Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.



*Kegiatan Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan
 Sekretariat Daerah Tahun 2022*

Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Aparatur Perencana Lingkup Sekretariat Daerah telah dilaksanakan dengan cara mengikuti Bimbingan Teknis Perencanaan pada Tanggal 7 s.d 9 November 2022 sesuai dengan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/2593/Bappeda/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Perencanaan.



Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan

5. Pelatihan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti oleh KPA/PPK/PPTK/ Tim Pendukung di SKPD.



Kegiatan Pelatihan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Pelatihan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam aplikasi SIRUP yang diikuti oleh Petugas Penginput SIRUP di SKPD.



Kegiatan Pelatihan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam aplikasi SIRUP

Dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Sehubungan dengan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Periode 2024-2026 diadakan sosialisasi terkait Penyusunan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Periode Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Desember 2022.



Sosialisasi terkait Penyusunan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah (RPD)

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 dilaksanakan lah rapat intern dengan Tim Kinerja Sekretariat Daerah terkait Penyusunan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Periode Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan pada 27 Desember 2022. Dalam rapat tersebut dibahas terkait permintaan data Capaian Kinerja Renstra Sekretariat Daerah (Tabel T-C.23), Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah (Tabel Tc-24), Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 (Tabel T-C.25), Strategi Dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah (Tabel Tc. 26, Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Sekretariat Daerah (Tabel T-C.27), Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpd (Tabel T-C.28), Dan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan

Fungsi Perangkat Daerah (Tabel T-B.35). Selanjutnya data tersebut akan disampaikan ke BAPPEDA pada tanggal 30 Desember 2022.



Kegiatan Penyusunan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Periode Tahun 2024-2026

Sedangkan untuk pelayanan administrasi perencanaan dilaksanakan melalui :

1. Menyiapkan bahan - bahan Renja APBD Murni dan APBD Perubahan (RKA dan Pagu KUA-PPAS) baik saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut maupun saat pembahasan dengan Tim RKPD BAPPEDA dan Tim TAPD BPKAD serta Tim APIP Inspektorat Kabupaten.
2. Menyusun konsep Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah untuk Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFU dan JFT.
3. Menyusun konsep Indikator Kinerja (IKU) dan Pohon Kinerja Sekretariat Daerah untuk Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.

Pelaksanaan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada matriks dibawah ini :

MATRIKS PENYUSUNAN RENJA
SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
RENJA MURNI TAHUN 2023			
1	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/674/Perenc, Makro/2022 Tanggal 15 Maret 2022 perihal Rancangan Renja SKPD	14 s.d 23 Maret 2022	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Murni Tahun Anggaran 2023
2	surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/42/Bappeda Hal Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2023	4 Februari 2022	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 oleh Tim RKPD BAPPEDA
3	Rapat persiapan dalam rangka Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut	24 Mei 2022	dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk membahas Rancangan Renja APBD Murni Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.
4	Rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/535/DPRD Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait KUA - PPAS Tahun Anggaran 2023.	05 Agustus 2022	Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan SKPD dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Sekretariat Daerah.
5	Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2055/BPKAD/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023	19 Agustus 2022	Penyusunan RKA APBD Murni Tahun Anggaran 2023
6	Dokumen Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD dan RKA-PPKD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Nomor 700/286/LHR-RKA/Insp/2022	24 Agustus 2022	Dokumen LHR RKA
7	Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/1200/Bappeda Tanggal 20 Mei 2022 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2023	20 s.d 25 Mei 2022	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) akhir APBD Murni Tahun Anggaran 2023
8	surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/1002/DPRD Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut Dalam Rangka Pembahasan RAPERDA Kabupaten Tanah Laut Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	18 Oktober 2022	Rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut
9	Input hasil raker kedalam SIPD	20 Oktober 2022	Bagian-bagian input hasil Raker ke dalam SIPD
10	Pelatihan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti oleh KPA/PPK/PPTK/ Tim Pendukung di SKPD	3 November 2022	Kegiatan Sosialisasi P3DN



11	Pelatihan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam aplikasi SIRUP yang diikuti oleh Petugas Penginput SIRUP di SKPD	4 November 2022	Input Aplikasi SiRUP
12	Surat Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/2593/Bappeda/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Perencanaan.	7 s.d 9 November 2022	Bimbingan Teknis Perencanaan
13	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/3244/Bappeda/2022 Perihal Undangan	22 Desember 2022	sosialisasi terkait Penyusunan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Periode Tahun 2024-2026 serta evaluasi Renstra Periode 2018-2023
14	Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026	30 Desember 2022	Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah (TC.23, TC.24, TC.25, TC.26, TC.27, TC.28, TB.35)
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022			
1	Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/301/Perenc Makro/2022 Tanggal 7 Juni 2022 perihal Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022	10 Juni 2022	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022
2	Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/353/Perenc Makro/2022 Hal Verifikasi Perubahan Renja SKPD Tahun 2022	28 Juni 2022	Verifikasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2022 oleh Tim RKPD BAPPEDA
3	Rancangan Perubahan APBD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Pagu sesuai KUA-PPAS.	11 Juli 2022	Rapat persiapan dalam rangka Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Pejabat Eselon II
4	Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/818/DPRD Tanggal 5 September 2022 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023	08 September 2022	Rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut
5	Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 910/2236/BPKAD tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) / Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PRKA-SKPKD) Tahun Anggaran 2022	14 September 2022	Penyusunan RKA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022
6	Sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 910/2236/BPKAD	14 September 2022	pembahasan dan Riviurum rumusan program kegiatan dan sub kegiatan Renja oleh Tim APIP dan Tim TAPD
7	surat Ketua DPRD Nomor 170/878/DPRD Tanggal 19 September 2022 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022.	20 September 2022	Raker dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut
8	Input hasil raker kedalam SIPD	22 September 2022	Penginputan Anggaran Perubahan Tahun 2022
9	Terbitlah DPPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022	21 Oktober 2022	Peraturan Daerah Perubahan APBD No.9 LD No.09 tgl 21 Oktober 2022
10	Surat Sekretaris Daerah Nomor 065/3031/ORG Hal Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	29 November 2022	Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan dari Bagian Organisasi

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya kemampuan melakukan proyeksi kegiatan secara efektif

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Komunikasi yang intens dengan Tim Kinerja Sekretariat Daerah melalui *Whatsapp Group*
- Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip perencanaan yang efektif yang dapat memberikan dampak positif terhadap pola perencanaan
- Peningkatan kompetensi terhadap penyusun perencanaan untuk dapat menganalisa dampak suatu perencanaan
- Melakukan koordinasi secara intens terkait penyusunan perencanaan dari Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Selalu melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai dengan SOP
- Meningkatkan kompetensi para petugas penyusun perencanaan
- Bimtek tentang teknik pembuatan perencanaan

SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Persentase Kualitas Penyusunan Pelaporan Kinerja yang sesuai Aturan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan mengevaluasi bahan penyusunan Laporan Kinerja yaitu :

1. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dengan melaksanakan :

- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I pada Tanggal 6 Juli 2022.



- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II pada Tanggal 03 Oktober 2022.



- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan III pada Tanggal 22 Desember 2022.



- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan IV.

2. Penyusunan LPPD Tahun 2022

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 130/2717/PEM/2022 Tanggal 11 November 2022 Perihal Pemutakhiran Data e-LPPD secara Desk, maka dilaksanakan pemutakhiran data e-LPPD untuk Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan LPPD SKPD Tahun 2022.



Kegiatan Desk Pemutakhiran Data e-LPPD Tahun 2021

Selanjutnya untuk Desk penyusunan LPPD SKPD Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/2954/PEM/2022 Tanggal 22 November 2022 Perihal Kegiatan Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2022 dan Penginputan ke e-LPPD Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2022 di Fugo Hotel Banjarmasin.



*Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD dan Penginputan Ke E-LPPD
Tahun 2022*

Dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Tahun 2022 dilaksanakan rapat dengan anggota Tim Kinerja Sekretariat Daerah tanggal 27 Desember 2022 dengan agenda Rapat Penyusunan Laporan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2022.



*Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Sekretariat Daerah Tahun 2022*

3. Laporan SPIP Tahun 2022

Sekretariat Daerah, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selanjutnya pelaksanaan SPI Lingkup Sekretariat Daerah dituangkan dalam bentuk laporan SPIP Sekretariat Daerah untuk Semester I dan Semester II Tahun 2022 sebagaimana berikut :



Dalam rangka penyusunan Risk Register SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dilakukan pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Desember 2022 di Aula Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.



Kegiatan Desk Risk Register SKPD dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan



Dokumen Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2022 setelah Desk/Pendampingan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Belum optimal melakukan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
- Beberapa Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah tidak menyampaikan data capaian kinerja secara tepat waktu

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan reviu kinerja internal secara berkala
- Intensitas informasi melalui *WhatsApp Grup* “Tim Kinerja”.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :


- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan
- Menyampaikan surat permintaan data kinerja dengan mencantumkan batas waktu

SASARAN 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Indikator 1 : Nilai SAKIP Sekretariat Daerah


NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	101.44%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”

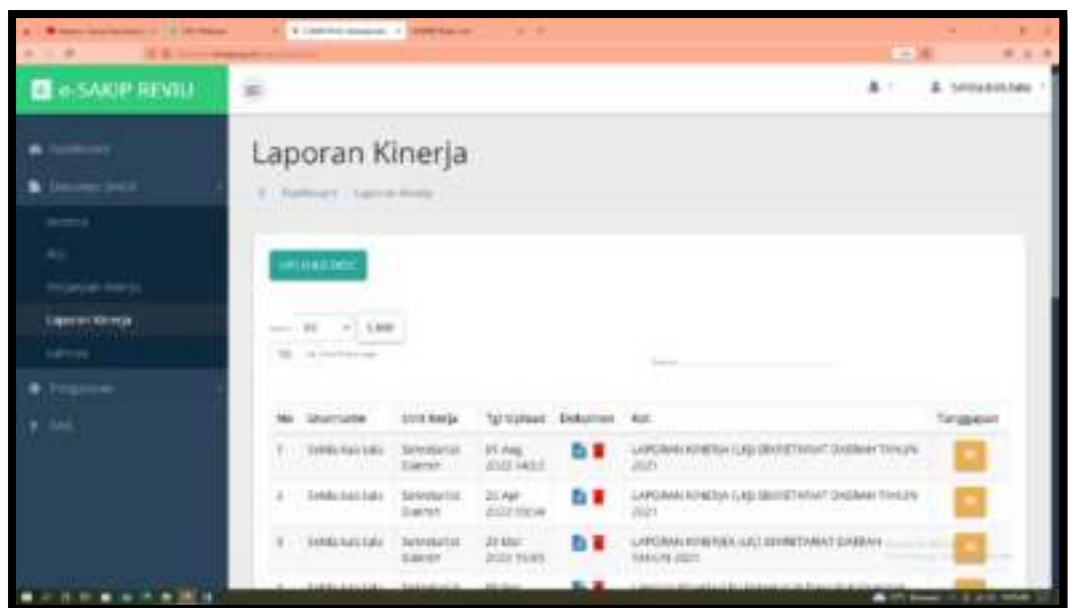
Pelaksanaan IKU Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD diawali dengan :

-  Kegiatan Asistensi Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2021 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 065/703/ORG Tanggal 18 Maret 2022, kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Kegiatan Asistensi Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2021

-  Upload Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 pada e-SAKIP Riviur berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 065/709/ORG Perihal Upload Dokumen SAKIP pada ESR Menpan dan RB Tanggal 21 Maret 2022.

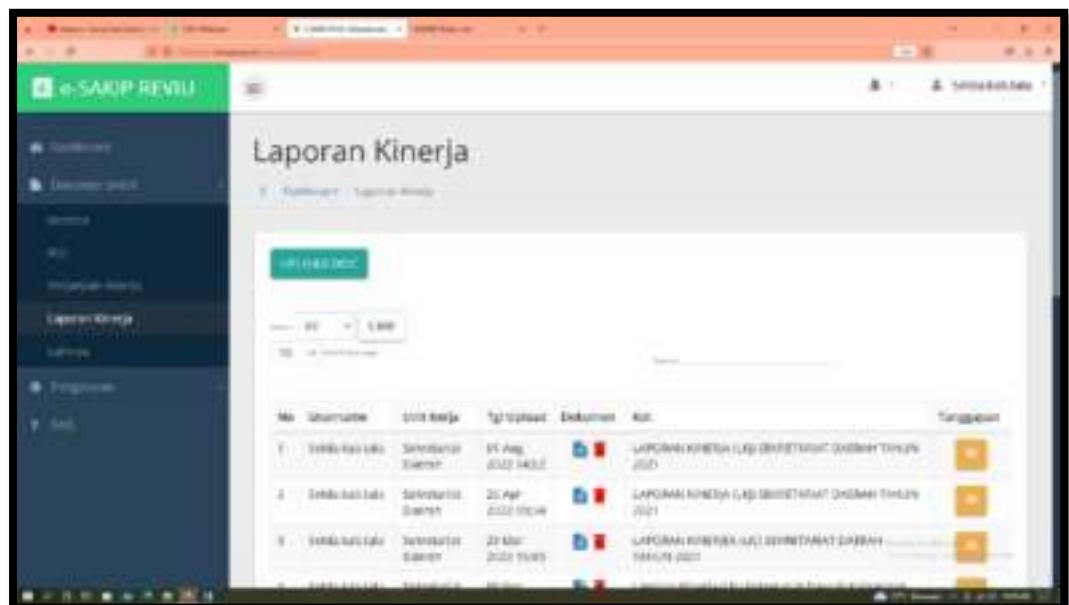


Upload Dokumen LKj Pertama ke ESR Menpan RB

🚦 Permintaan Data Evaluasi SAKIP – SKPD Tahun 2022 berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 050/507-Insp/2022 Perihal Permintaan Data Evaluasi SAKIP – SKPD Tahun 2022 Tanggal 27 Juni 2022, dengan data yang dikirimkan sebagai berikut :

- Laporan Kinerja SKPD Tahun 2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 dan 2021
- Draft Renstra SKPD 2018-2023
- Renja Tahun 2021
- Cascading / Pohon Kinerja Tahun 2021
- Matriks Keselarasan Tahun 2021
- Capaian Kinerja Tahun 2021

🚦 Permintaan Data Dukung dan Matriks Tindak Lanjut untuk Evaluasi RB dan AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 065/180/ORG/2022 Tanggal 25 Juli 2022 melalui aplikasi e-SAKIP Review paling lambat Tanggal 01 Agustus 2022.



Upload Dokumen LKj Kedua ke ESR Menpan RB

🚦 Pengisian data Aplikasi Penilaian AKIP Secara Mandiri berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 005/611 –Insp/2022 Perihal

Pengisian Data Pada Aplikasi Penilaian AKIP Tahun 2021 secara Mandiri
 Tanggal 26 Juli 2022.



*Kegiatan Pengisian data Aplikasi Penilaian AKIP Secara Mandiri
 (Aplikasi SAKUNTALA)*

- 📄 Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/261-LHE AKIP/Insp/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 bahwa Sekretariat Daerah memperoleh nilai sebesar **84.2** dengan kategori **A (Memuaskan)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA SKPD	PERENCANAAN KINERJA (30 %)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI TOTAL
SEKRETARIAT DAERAH	24.99	24.99	12.495	21.675	84.2 A

- Persiapan Evaluasi RB dan SAKIP Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 065/2021/ORG/2022 Tanggal 15 Agustus 2022, dengan ini Sekretariat Daerah diminta membuat paparan progres atas pelaksanaan 4 (Empat) Komponen SAKIP dengan menampilkan progres pelaksanaan sebelum dan sesudah.



Dokumen Progres Pelaksanaan SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/261-LHE AKIP/Insp/2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tanggal 1 Agustus 2022, Hasil Evaluasi Komponen SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Upaya tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



NO	KOMPONEN SAKIP	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT EVALUASI KOMPONEN SAKIP	
		REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA	Agar dipertahankan dan ditingkatkan kualitas perencanaan kinerja, yaitu dengan tetap selarasnya antara tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, Pohon Kinerja, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK)	Perencanaan kinerja telah selaras antara tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah, Pohon Kinerja, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK).
2	PENGUKURAN KINERJA	Agar lebih meningkatkan pengukuran kinerja secara berkala (bulanan), pemantauan secara berjenjang dan lebih meningkatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishmen</i> .	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (bulanan) dengan menyajikan Realisasi SKP E – KITA Bulanan secara berjenjang misalnya, dari SKP Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV sampai ke Pelaksana. Apabila pengukuran kinerja bulanan tidak disampaikan tepat waktu ke BKPSDM maka ada sanksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3	PELAPORAN KINERJA	Agar dalam penyajian Laporan Kinerja (LKj) menyajikan seluruh perbandingan kinerja, yaitu perbandingan kinerja dengan Kabupaten/Provinsi.	Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2022 telah menyajikan perbandingan kinerja Sekretariat Daerah dengan kinerja Kabupaten/Provinsi dan disajikan dalam bentuk tabel perbandingan.
		Agar dalam penyajian Laporan Kinerja (LKj) menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya (periode Renstra)	Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2022 telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2018 s.d Tahun 2023 (periode Renstra) selama masa jabatan Bupati Tanah Laut.
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Agar monev internal atas capaian kinerja tetap dilaksanakan secara terus menerus dan ditindaklanjuti.	Monev internal atas capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala (Triwulan I s.d Triwulan IV), dan ditindaklanjuti dengan solusi jika terjadi kendala.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komponen SAKIP Tahun 2021 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut masih terdapat Komponen/Sub Komponen SAKIP dengan Nilai 80, dan akan lebih ditingkatkan Sub Komponen tersebut pada Tahun selanjutnya dengan melakukan Tindak Lanjut Peningkatan sebagaimana tabel di bawah ini :

No	KOMPONEN SAKIP	SUB KOMPONEN SAKIP	NILAI	TINDAK LANJUT PENINGKATAN
I.	PERENCANAAN KINERJA	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta	80	1. Adanya Pohon Kinerja yang telah menggambarkan keselarasan dari Indikator Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV 2. Adanya dokumen Renstra yang telah memuat rumusan hasil (tujuan/sasaran) dengan



		memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).		<p>menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai</p> <p>3. Dibuatnya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) mulai dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sampai ke Pelaksana telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu</p> <p>4. Adanya Indikator Kinerja Pada Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA yang mengampu Misi Ke-5 Bupati Tanah Laut.</p>
		Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	80	<p>1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021</p> <p>2. Melaksanakan Monev secara berkala terhadap capaian kinerja dan telah disajikan dalam bentuk tabel Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021</p> <p>3. Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa terkait Riviu dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ (MK-UKPBJ) Level Pro-Aktif</p> <p>4. Pejabat yang mengampu kinerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui SKP E-KITA secara berjenjang dan Perjanjian Kinerja (PK)</p> <p>5. Membuat Laporan bulanan terkait Pengukuran Kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan melalui SKP E-KITA dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sampai ke Pelaksana dan selanjutnya Laporan tersebut disampaikan ke BKPSDM</p>
II	PENGUKURAN KINERJA	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja	80	<p>1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 oleh</p>

		secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan		<p>Pejabat Eselon II dan dihadiri seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV Lingkup Sekretariat Daerah</p> <p>2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersaji pada tabel Capaian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Triwulan I s.d Triwulan II Tahun 2021</p> <p>3. Terdapat 4 (Empat) Bagian yang telah melakukan Pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yaitu Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa</p>
		Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	80	<p>1. Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan telah dijadikan sebagai dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut BAB XI Kewajiban dan Sanksi pada Pasal 25</p> <p>2. Efisiensinya penggunaan anggaran dan SDM dalam mencapai kinerja, hal ini dapat dilihat dalam Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 yaitu realisasi anggaran sebesar 87.87% sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 98.50% artinya ada efisiensi penggunaan anggaran karena capaian fisik yang lebih besar dari realisasi anggaran, sedangkan terkait SDM sesuai dengan peta jabatan bahwa masih terdapat beberapa peta jabatan yang lowong contohnya pada Bagian Perencanaan dan Keuangan masih ada Pejabat</p>



				<p>Eselon IV yang tidak memiliki staf/pelaksana.</p> <p>3. Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi yang dipimpin langsung oleh Pejabat Eselon II secara berkala.</p>
III	PELAPORAN KINERJA	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	80	<p>1. Telah disusunnya LKj, CALK, LPPD, Laporan SPIP setiap Tahun.</p> <p>2. Telah disusunnya LKj, CALK, LPPD, Laporan SPIP setiap Tahun telah dipublikasikan pada Website Portal PPID Kabupaten Tanah Laut</p>
		Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaan nya.	80	<p>1. Telah disusunnya LKj dengan menggambarkan keberhasilan dan kegagalan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta memberikan solusi dan rencana aksi terhadap hambatan atau kendala yang dihadapi, hal ini tersaji pada BAB III Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj)</p> <p>2. Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang tersaji dalam bentuk tabel Capaian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021.</p> <p>3. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel Kabupaten tersaji dalam bentuk tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten/RPJMD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)</p>
		Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam mencapai kinerja	80	<p>1. Telah melakukan evaluasi terhadap Realisasi Anggaran Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021</p> <p>2. Telah melaksanakan Monev Capaian Kinerja yang dipimpin langsung oleh Pejabat Eselon II</p> <p>3. Evaluasi pencapaian kinerja telah disajikan dalam bentuk tabel Capaian Kinerja Eselon II, Eselon III dan</p>

			Eselon IV Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021 4. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2021 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja dengan membuat Perjanjian Kinerja (PK)
IV	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	80 1. Melakukan Monev secara berkala untuk Triwulan I s.d Triwulan IV terhadap Capaian Kinerja, Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan. 2. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti dalam penyusunan LKj Tahun 2021 3. Hasil evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja disajikan dalam bentuk tabel Rekapitulasi Laporan Hasil Pengukuran Kinerja Internal Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021 4. Hasil dari evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam bentuk penghargaan. 5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal dengan melakukan inovasi terkait pelaksanaan kegiatan, pada Tahun 2021, ada 6 (enam) inovasi yang ada di SKPD yang diikutsertakan pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021

Dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 pada Tanggal 27 Desember 2022 dihadiri oleh Anggota Tim Kinerja Sekretariat Daerah.



Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 065/3242/ORG Tanggal 19 Desember 2022 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD, maka dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2022 yang dipimpin Oleh Asisten Administrasi Umum, dihadiri oleh Seluruh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2022

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Proses upload data pada aplikasi SAKUNTALA belum sepenuhnya optimal;
- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami sepenuhnya Sistem AKIP;
- Anggota Tim Penyusunan SAKIP dari Bagian-Bagian dalam menyampaikan data tidak tepat waktu; dan

- Kurang cermatnya dalam hal penyajian data.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi petugas penyusun Laporan Kinerja;
- Rapat secara berkala dalam rangka membahas penyajian data dalam dokumen Laporan Kinerja; dan
- Intensitas komunikasi melalui *WhatsApp Group* dengan “Tim Kinerja” Sekretariat Daerah.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Agar lebih mengoptimalkan aplikasi SAKUNTALA sehingga tidak terjadi lagi kendala upload data;
- Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja;
- Melaksanakan Monev terkait capaian kinerja secara berkala;
- Koordinasi lebih intens dengan Pembina SAKIP Kabupaten; dan
- FGD

SASARAN 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Indikator 2 : Nilai SPIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.6	Masih tahap <i>baseline SPIP</i> Terintegrasi	Masih tahap <i>baseline SPIP</i> Terintegrasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)”

Pengendalian Intern Lingkup Sekretariat Daerah telah melaksanakan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu :

- 1) Lingkungan Pengendalian;
- 2) Penilaian Risiko;
- 3) Kegiatan Pengendalian;
- 4) Informasi dan Komunikasi;
- 5) Pemantauan Pengendalian Internal.

Pada Tahun 2022 ini Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diawali dengan adanya Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/948-KUM/2022 Tentang Pembentukan Tim Asesor Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 005/626-Insp/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh Asesor SKPD pada Tanggal 3 Agustus 2022 di Aula Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.



Kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2022 yang diikuti oleh Seluruh Asesor SKPD

Dalam rangka menindaklanjuti Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dilakukanlah Internalisasi Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Eselon IV, JFT/JFU Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tanggal 04 Agustus 2022.



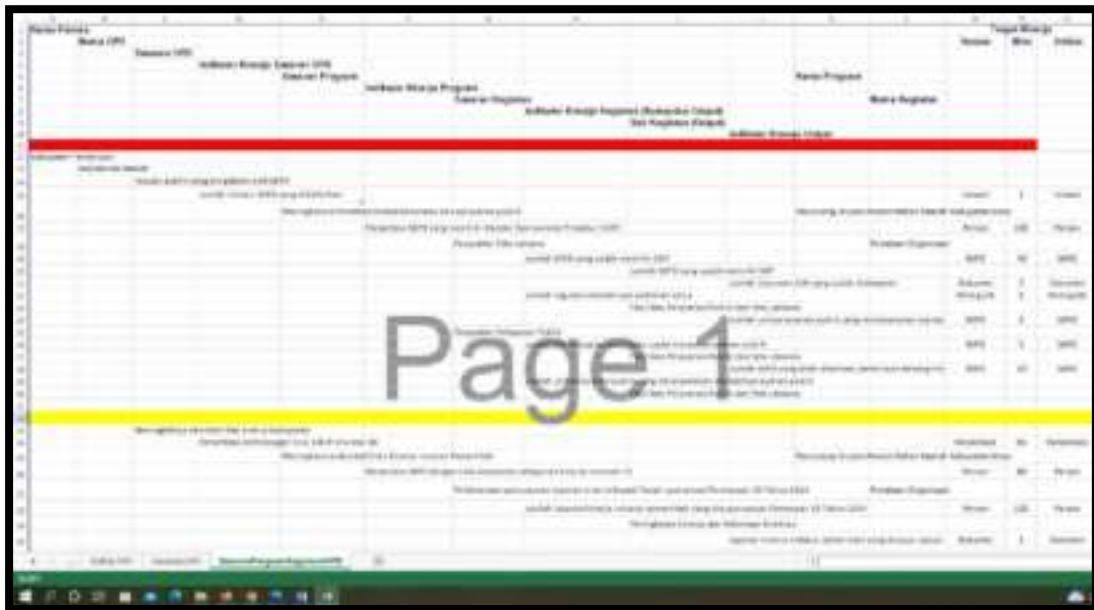
*Internalisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Lingkup Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022*

Selanjutnya dilaksanakan Kegiatan Input Data Awal SPIP Terintegrasi Tahun 2022 Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 005/645/Insp/VIII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022 Perihal Input Data Awal SPIP Terintegrasi Tahun 2022, yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Agustus 2022 di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan diikuti oleh Sub Koordinator Perencanaan dan Operator.



Kegiatan Input Data Awal SPIP Terintegrasi Tahun 2022

Hasil dari Input Data awal Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi disajikan dalam bentuk dokumen Excel sebagai berikut :



Kemudian dilaksanakan Kegiatan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2022, maka diadakan Kegiatan Pendampingan Pengisian data SPIP ke dalam System SPIP Terintegrasi berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/790/Insp/2022 Tanggal 27 September 2022 Perihal Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi, yang dilaksanakan pada Tanggal 29 September 2022 di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.



Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2022

Setelah dilaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2022 dilanjutkan dengan Finalisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Kabupaten Tanah Laut dengan Narasumber BPKP Pusat Jakarta Berdasarkan Surat

Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 005/2424 –Insp/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 Perihal Undangan Finalisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.



Kegiatan Finalisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Kabupaten Tanah Laut dengan Narasumber BPKP Pusat Jakarta Tahun 2022

Tinndak Lanjut dari Kegiatan Finalisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah dilaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/882/Insp/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 Perihal Pelaksanaan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada matriks dibawah ini :

MATRIKS PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI SPIP TERINTEGRASI
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/948-KUM/2022 Tentang Pembentukan Tim Asesor Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	1 Agustus 2022	Keputusan Bupati Penetapan Asesor SKPD
2	Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 005/626-Insp/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2022	03 Agustus 2022	Diikuti oleh seluruh asesor SKPD
2	Internalisasi Lingkup Sekretariat Daerah	04 Agustus 2022	Dipimpin Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, Eselon III, JFT/JFU Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
3	Membuat Nota Dinas ke Bagian-bagian untuk permintaan data Asesor Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah	5 Agustus 2022	Telah didistribusikan ke Bagian-bagian
4	Data Asesor Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah diterima Bagian Perencanaan dan Keuangan	9 Agustus 2022	Data Asesor Bagian-bagian masuk ke Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Nota Dinas ke Bagian Hukum untuk koreksi Draft SK Tim Asesor Lingkup Sekretariat Daerah	9 Agustus 2022	Membuat Nota Dinas ke Bagian Hukum untuk koreksi draft SK Tim Asesor Lingkup Sekretariat Daerah
6	Draft SK Tim Asesor Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah	9 Agustus 2022	Membuat draft SK Tim Asesor Lingkup Sekretariat Daerah

7	Input data awal SPIP Terintegrasi Tahun 2022	10 Agustus 2022	Diikuti oleh Sub Koordinator Perencanaan dan Operator di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
8	SK Tim Asesor Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah telah selesai	16 Agustus 2022	SK Sekretaris Daerah Tentang Tim Asesor Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah
9	Rapat pendampingan PM Maturitas SPIP	29 September 2022	Penginputan kertas kerja penyelenggaraan SPIP ke dalam aplikasi SPIP Terintegrasi
10	Rapat Koordinasi Tim Asesor Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	03 Oktober 2022	Rapat Koordinasi dengan asesor Bagian-bagian
11	Finalisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2022	13 Oktober 2022	Finalisasi dan analisis dari BPKP Pusat Jakarta, BPKP Provinsi Kalsel dan Inspektorat Kabupaten
12	Pelaksanaan penjaminan kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	19 s.d 28 Oktober 2022	Penjaminan Kualitas dilakukan oleh Tim PK Inspektorat Kabupaten

Pelaksanaan Pengendalian Intern Lingkup Sekretariat Daerah melaksanakan 5 (Lima) unsur SPIP dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Unsur dan telah diformalkan dalam bentuk laporan SPIP Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2022, dan pengendalian intern tersebut telah menjabarkan pencapaian 4 (Empat) tujuan SPIP yaitu :

NO	TUJUAN SPIP	PENCAPAIAN TUJUAN
1	Efektivitas dan Efisiensi	Capaian Fisik Kegiatan 99,11% dan realisasi keuangan 93,34%, dalam artian ada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dikarenakan capaian fisik kegiatan lebih besar dibanding dengan realisasi keuangan
2	Keandalan Pelaporan Keuangan dan Kepegawaian	A. Pelaporan keuangan melalui :



		<ol style="list-style-type: none"> 1. SIPD dan SIMDA Keuangan, disamping itu juga telah dilaksanakan rekon keuangan dan rekon pendapatan pertriwulan 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah (CALK) 3. Laporan Keuangan baik untuk anggaran belanja dan pendapatan dilaksanakan secara bulanan, triwulan, dan tahunan 4. Melaksanakan monev terhadap realisasi belanja dan realisasi pendapatan. <p>B. Pelaporan Kepegawaian melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 2. Nominatif PNS Sekretariat Daerah 3. Pelayanan Administrasi Kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG, SIMFONI, SIDIKA, dan SIAB 4. Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Semester I dan Semester II 5. Pengelolaan Kearsipan 6. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar
3	Pengamanan Aset	<p>Adanya Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2711/BPKAD/XI/2022 Tentang Langkah – Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022 yang terkait dengan Penatausahaan Aset dan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset.</p> <p>Pengamanan aset telah dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan BMD Sekretariat Daerah secara berkala yaitu laporan bulanan, triwulan dan tahunan 2. Pencatatan aset melalui KIB (Kartu Inventaris Barang) 3. Berita acara pemakaian aset 4. Laporan BMD melalui SIMDA BMD
4	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang - undangan	<p>Menindaklanjuti LHP dari BPK/BPKP yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tuntasnya regulasi yang mendukung kegiatan penyediaan air bersih (Bag. Perekonomian, Adm Pemb dan SDA). 2. Belum memadainya pengelolaan pengeluaran pembiayaan Pemkab Tanah Laut pada PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Berupa Pinjaman Kredit Gapura Karomah (Bag. Perekonomian, Adm Pemb dan SDA).

		3. Belum tertibnya penatausahaan aset tetap Kabupaten Tanah Laut (Bag. Umum) 4. Belum tuntasnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dioperasikan pihak lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Belum Sesuai Ketentuan. (Bag. Umum) 5. Belum tuntasnya Aset Tak berwujud yang sudah tidak digunakan lagi dalam Operasional Pemerintahan Belum diusulkan untuk dihapuskan. (Bag. Umum) 6. Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung Belum Sepenuhnya Dilaksanakan secara Memadai (PBJ)

Sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800/962/Insp/2022 Perihal Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan temuan – temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti dan status temuan yang belum dianggap tuntas oleh pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Status Temuan untuk Sekretariat Daerah termuat didalam dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dibawah ini :



Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						
No.	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
1	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
2	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
3	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
4	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
5	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
6	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
7	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
8	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
9	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi
10	SKPD	Temuan	Revisi	SKPD	Revisi	Revisi

Menindaklanjuti Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, maka dilaksanakan Desk dengan SKPD yang memiliki status temuan yang belum dianggap tuntas oleh pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800/937/Inso/2022 Tanggal 13 Desember 2022.



Dokumentasi Desk dengan SKPD yang memiliki status temuan yang belum dianggap tuntas

Pada Tahun 2022 pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/3147/Insp/XII/2022 Tanggal 5 Desember 2022 Perihal Undangan Pendampingan Risk Register SKPD, pendampingan akan dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Desember 2022. Bahan atau data pendampingan penyusunan Risk Register

Sekretariat Daerah adalah Dokumen RKA Tahun 2023 dan Dokumen Risk Register Tahun 2021.



Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Asesor belum sepenuhnya memahami untuk menentukan pengisian Grade dalam Kertas Kerja Maturitas SPIP Terintegrasi.
- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami maksud unsur-unsur SPIP;
- Kurang cermatnya dalam hal penyajian data

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan koordinasi secara intens dengan Tim Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi.

- Meningkatkan kompetensi petugas penyusun laporan agar lebih memahami unsur-unsur SPIP
 - Rapat secara berkala dalam rangka membahas penyajian data dalam dokumen SPIP
- Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :
- Melaksanakan Bimtek terkait Manajemen Risiko
 - Melaksanakan Monev terkait Rencana Tindak Lanjut Risiko
 - Koordinasi lebih intens dengan Pembina SPIP Kabupaten
 - FGD

SASARAN 4 Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Sedangkan untuk pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan melalui penatausahaan keuangan, monitoring dan evaluasi intern terhadap capaian keuangan per Triwulan, melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan anggaran Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah serta monitoring dan evaluasi penerapan SPI dengan menjalankan prinsip-prinsip efektif dan efisien anggaran, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan asset BMD dan ketaatan terhadap peraturan.

Dalam Rangka pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah diawali dengan menetapkan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1363-KUM/2021 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022, Mempunyai tugas :

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Menyusun Dokumen Pengesahan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah

- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- d) Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- f) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
- g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- h) Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM)
- i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- k) Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- l) Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
- m) Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
- n) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan atau menetapkan sebagian kewenangannya kepada :

1. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/330-KUM/2022 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- e) Menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung dan Surat Perintah Membayar – Tambah Uang;
 - f) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
 - h) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran; dan
 - i) Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 10/KEP-SEKDA/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, dengan tugas sebagai berikut :
- a) Melakaukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM);
 - c) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) Melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e) Menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - f) Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPM) atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
 - g) Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan Surat Perintah Pembayaran (SPM)
3. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 4/KEP-SEKDA/2022 tentang Penunjukan dan

Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan tugas sebagai berikut:

- a) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaanteknis Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - b) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai barang/jasa
 - d) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - e) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
 - g) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - h) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
 - i) Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - j) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab pada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
 - k) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengamil alih mandat yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4. Menetapkan Bendahara Pegeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1367-KUM/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, dengan tugas sebagai berikut :
- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran – Langsung
 - b) Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU)

- c) Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya
- d) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik
- g) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2711/BPKAD/XI/2022 tentang Langkah – langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022, hal ini dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2022 terkait perihal Belanja, Penatausahaan Aset, Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, dan Akuntansi.

REKAPITULASI KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022		
NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Uang Persediaan (UP)	1 Kali
2	Ganti Uang (GU)	7 Kali
3	LS Gaji PNS	12 Kali
4	LS Gaji KDH/WKDH	12 Kali
5	LS TPP	10 Kali
6	LS Operasional	12 Kali
7	LS Rekanan	12 Kali
8	LS Honorarium	5 Kali
9	LS Hadiah	3 Kali
10	LS Hibah	6 Kali
11	LS Makan Minum	2 Kali
12	LS Jasa Pihak Ketiga	1 Kali

The screenshot displays the SAP S/4HANA Cloud interface for the 'Kostenstellen' (Cost Centers) report. The report is filtered by 'Kostenstellen' and 'Kostenart'. The report shows a total of 10 cost centers with a total cost of 10.000.000. The report is generated on 10.08.2023 at 10:00:00.

Laporan LRA Tahun Anggaran 2022

Indikator ini dilaksanakan dengan mengevaluasi Realisasi Belanja Sekretariat Daerah per triwulan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dengan melaksanakan :
 - Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 08 April 2022.



- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 12 Juli 2022.

- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 14 Oktober 2022.
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 29 Desember 2022.



Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, maka dilaksanakanlah kegiatan Migrasi data keuangan dari aplikasi SIPD ke aplikasi FMIS (Financial Management Information System) BPKP yang diikuti oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Sekretariat Daerah dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 November 2022 di Aula BPKAD.



Kegiatan Migrasi data keuangan dari aplikasi SIPD ke aplikasi FMIS

Dilanjutkan dengan Migrasi penatausahaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 menggunakan sistem FMIS (Financial Management Information System) BPKP diikuti oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Sekretariat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 November 2022 di Hotel Dafam Banjarbaru.



Kegiatan Migrasi dan Input Data APBD Tahun 2022 dari Aplikasi SIPD Ke Aplikasi SIMDA-NG (FMIS)

1. Menetapkan Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/29-KUM/2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, dengan tugas sebagai berikut :

- a) Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
- b) Menyimpan seluruh penerimaan
- c) Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja
- d) Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank
- e) Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya
- f) Melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan aset paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp. 100.000.000 dari hasil Retribusi Pemakaian Ruangan dan Pemakaian Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	Rp. 25.000.000
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000
		Rp. 100.000.000

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan Sekretariat Daerah dilakukan melalui :

1. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2022
2. Rapat Intern dengan pengelola pendapatan dan pelaksana pendapatan terkait strategi peningkatan pendapatan

Terkait dengan pelaporan pendapatan Sekretariat Daerah dilakukan melalui :

1. Rekon Pendapatan Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
2. Laporan Bulanan Pendapatan Sekretariat Daerah yang disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah
3. Laporan Pendapatan Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2022

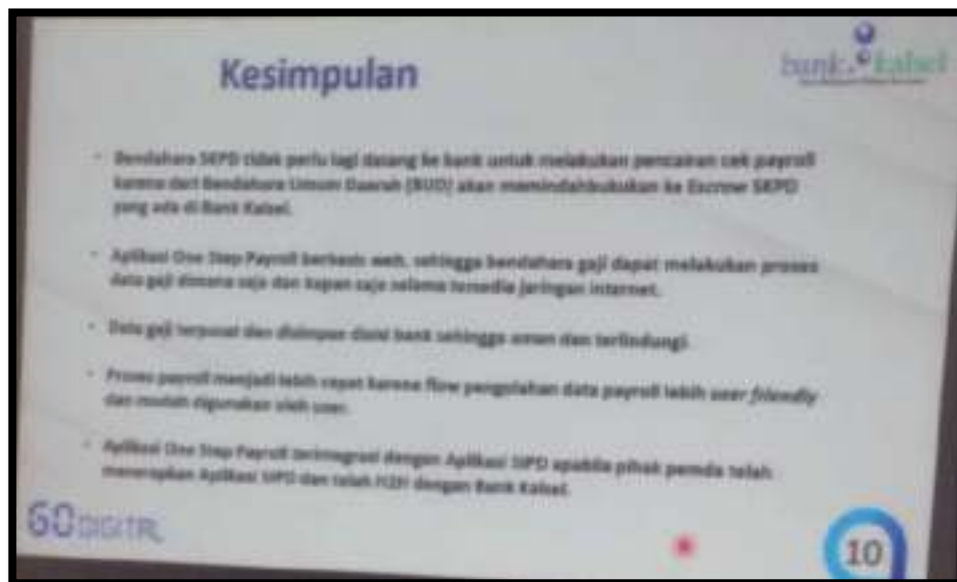


*Kegiatan Rekon Pendapatan yang dilaksanakan oleh
Badan Pendapatan Daerah*



*Dokumen Laporan Pendapatan Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II
Tahun Anggaran 2022*

Sehubungan dengan adanya Bimbingan Teknis untuk petugas pengelola gaji SKPD maka dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis *One Step Payroll* dan *Ready Cash Bank Kalsel* yang diikuti oleh Bendahara Gaji/Petugas Pengelola Gaji.



Kegiatan Bimbingan Teknis One Step Payroll dan Ready Cash Bank Kalsel

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan implementasi Aplikasi FMIS (Financial Management Information System) BPKP sebagai pendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 maka dilaksanakan kegiatan FGD Penginputan Pendapatan dan *Trouble Shooting* dalam Aplikasi FMIS (Financial Management Information System) BPKP bagi Bendahara Penerimaan.



Kegiatan FGD Penginputan Pendapatan dan Trouble Shooting dalam Aplikasi FMIS

Adapun realisasi pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terinput dalam aplikasi SIMDA Pendapatan melebihi target tahunan yaitu sebesar 107.3%, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN RETRIBUSI	TARGET ANGGARAN	REALISASI	SISA YANG BELUM TERCAPAI	CAPAIAN
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	25.000.000	34.414.000		
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.000.000	72.915.000	2.085.000	
	TOTAL	100.000.000	107.329.000	2.085.000	107.3%

Upaya Strategi peningkatan pendapatan Sekretariat Daerah untuk Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Penerapan aplikasi eTALase untuk Pelayanan Sekretariat Daerah berupa Penyewaan Mobil dan Penyewaan Tempat
2. Menaikkan tarif Retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor.
3. Memperbaiki sarana dan prasarana Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah.
4. Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap pelanggan atau penyewa.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Capaian Pendapatan Sekretariat Daerah Tahun 2022 yang dihadiri oleh Pejabat Pengelola

Pendapatan, Bendahara Penerimaan, Pengelola Gedung dan Pengemudi armada BUS. Dari hasil monev tersebut diharapkan dapat menaikkan pendapatan melalui :

- Penerapan aplikasi eTALase untuk Pelayanan Sekretariat Daerah berupa Penyewaan Mobil dan Penyewaan Tempat.
- Menaikkan tarif Retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor.



*Kegiatan Monev Pendapatan Semester I dan Semester II
 Sekretariat Daerah TA 2022*

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan tidak sepenuhnya mengerti mekanisme penginputan aplikasi SIPD secara tepat
- Sering terjadinya kesalahan input data ke dalam Aplikasi SIPD
- Kurangnya fitur pada aplikasi SIPD khususnya terkait fitur Penatausahaan Keuangan Daerah
- Terjadi pemborosan waktu karena terkait laporan Penatausahaan Keuangan Daerah dilakukan 2 (dua) kali penginputan yaitu, data laporan Penatausahaan Keuangan Daerah di input terlebih dahulu kedalam SIPD selanjutnya di input kembali ke dalam aplikasi Financial Management Information System (FMIS) BPKP. Dan penginputan sistem ini akan berlaku juga untuk tahun selanjutnya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Diadakan pembekalan mengenai mekanisme penginputan aplikasi SIPD secara tepat
- Agar dilengkapinya fitur dalam aplikasi SIPD
- Aplikasi SIPD dan FMIS BPKP di integrasikan agar memudahkan penginputan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Agar dilakukan FGD
- *Sharing Knowledge* antara Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan dengan admin SIPD

6. Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun Anggaran 2022 Bagian Perencanaan dan Keuangan mendapatkan pagu sebesar Rp. 22.521.459.313 terealisasi Rp. 20.487.725.146 realisasi keuangan sebesar 91%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan dengan **Indikator Persentase layanan administrasi bidang perencanaan** dan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 20.389.072 terealisasi Rp 16.085.900 dengan realisasi keuangan sebesar 78.89% dan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang Sumber

Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu terkendala dengan PERPRES NO.33 TAHUN 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

- 2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah dengan **Indikator Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan dan Indikator Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan** ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 21.680.184.065 terealisasi Rp 19.705.155.610 dengan realisasi keuangan sebesar 90.89% dan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pagu Rp 820.886.176 terealisasi Rp 766.483.636 dengan realisasi keuangan sebesar 93.37% dan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan indikator ini tidak sepenuhnya terealisasi dikarenakan sifatnya *accress* belanja pegawai.
- 3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD dengan **Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dan Nilai SPIP Sekretariat Daerah** ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 20.389.072 terealisasi Rp 16.085.900 dengan realisasi keuangan sebesar 78.89% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu terkendala dengan PERPRES NO.33 TAHUN 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

Tabel Indikator Kinerja Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Perencanaan - Pengelola Perencanaan - PTT (2 Orang)	
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.039.362	7.917.500	78.86%		
2	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Keuangan	
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	21.671.184.320	19.697.014.310	90.89%		
3	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan		- Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	8.999.745	8.141.300	90.46%	- Verifikator Keuangan - Bendahara Pengeluaran	
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				- Pengadministrasi Keuangan - Pengadministrasi Penerimaan - PTT (3 Orang)	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	820.886.176	766.483.636	93.37%		
4	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Pelaporan	
5	Nilai SPIP Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.349.710	8.168.400	78.92%	- PTT (2 Orang)	



Analisa Capaian Sasaran Strategis
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	110%	110%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Mengampu Misi ke-3 <i>“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”</i>
2	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	85%	117%	142.6%	
3	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	5%	8.95%	179%	
ESELON IV						
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	165 Paket	110%	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
2	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Terhadap capaian tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	%	100%	165%	100%	110%	110%
2	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	%	100%	57,5%	85%	117%	142.6%
3	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	%	-	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	%	-	75%	5%	8.95%	179%
Rata Rata Capaian							132.9%

Pemaparan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu :

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Capaian kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan ada 4 (Empat) indikator adalah **132.9%** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap Indikator yaitu “Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu”.

Dari target kinerja yang sebanyak 150 paket, telah terealisasi sebanyak 165 paket, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya adalah 110%.

- 2) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indikator yaitu “Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE”.

Untuk mencapai indikator ini dilakukan secara bertahap agar SKPD memanfaatkan sistem pengadaan SPSE, yang dipaparkan sebagai berikut :

NO	TAHUN	TARGET	JUMLAH SKPD TARGET	REALISASI	JUMLAH SKPD REALISASI
1.	2021	75%	30	57.5%	23

2.	2022	85%	34	117%	40
3.	2023	100%	40	-	-

Dari target kinerja sebanyak 34 SKPD (Tahun 2022) yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE, telah terealisasi sebanyak 40 SKPD yang melaksanakan PBJ Pemerintah melalui sistem SPSE, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya adalah 142.6%.

- 3) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indikator Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dari target kinerja sebanyak 25 orang yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa, telah terealisasi sebanyak 25 orang yang telah kompeten mengikuti Bimtek dan pelatihan Kompetensi sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja telah terealisasi 100%.
- 4) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indikator Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang/Jasa.
 Dari target kinerja yang sebesar 5 %, telah terealisasi efisiensi sebesar 8.95 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya adalah 179 %.
- 5) Di Tahun 2022 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut telah mencapai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) memperoleh penilaian dengan bobot 77.9 dengan predikat BAIK. Penilaian tersebut sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi .

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

1. Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu di Tahun 2022 mencapai 110%, sedangkan Tahun 2021 yaitu 165%.
2. Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE di Tahun 2022 sebesar 117% dari target yang dicanangkan 85% (40 SKPD dari target 34 SKPD). Di Tahun 2021 Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE sebesar 57.5% dari target 75% (23 SKPD dari target 30 SKPD).
3. Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa mencapai di Tahun 2022 mencapai 100%, sama dengan Tahun 2021 yaitu 100%.
4. Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa di Tahun 2022 ini adalah 179% atau 8.95% dari nilai 5% penghematan biaya. Jika penghematan biaya mencapai 5%

maka persentase efisiensi pagu 100%. Jika penghematan biaya mencapai nilai 8.95% maka persentase efisiensi pagu 179%.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**



NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian PBJ
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	-	-	100%	55%	55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	100%	165%	165%	100%	110%	110%	100%	-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa



Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	-	-	-	-	-	-	75%	57.50 %	76.67 %	85%	117%	142.6%	100%	-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	-	-	-	-	-	-	100%	75%	75%	5%	8.95 %	179%	100%	-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik

Indikator : Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi yaitu melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam pengelolaan dan pembinaan PBJ tersebut kunci kesuksesannya yaitu jika paket pengadaan yang dilayani dapat diproseskan sesuai standar dan tepat waktu.

Agar paket pengadaan yang dilayani dapat selesai tepat waktu diperlukan peran serta yang sangat besar oleh pelaku pengadaan yang memahami terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pencapaian persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu menghadapi kendala yaitu :

1. Kurangnya pemahaman para PA/KPA dan PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Sulitnya kerjasama SKPD untuk dievaluasi dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. Sulitnya membina hubungan dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah :

1. Meningkatkan pemahaman para pelaku pengadaan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Memahamkan SKPD terkait pentingnya evaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD sehingga akan menghasilkan proses pengadaan yang lebih baik;
3. Memahamkan pelaku pengadaan terkait pentingnya pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4. Membuka komunikasi secara intens dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan adalah :

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir;
2. Melaksanakan pelatihan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
3. Mengagendakan rapat dengan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa.



GAMBAR 1
Kegiatan Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Mendampingi SKPD

Sasaran 2 Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE

Indikator : Persentase SKPD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan melalui system LPSE	Persentase SKPD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Melalui Sistem LPSE	85%	117%	142.6%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

Selain peningkatan kualitas layanan pengadaan barang/jasa, Bagian Pengadaan Barang/Jasa harus mengarahkan SKPD agar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan sistem LPSE.

Tujuan dari dilaksanakannya Pengadaan barang/jasa secara elektronik (melalui LPSE) adalah :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Untuk itu maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa selalu mengusahakan agar SKPD di Pemerintah Kab. Tanah Laut melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE.

Proses pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE diantaranya :

- Pengadaan langsung secara elektronik (e-PL)
- E-Tendering;
- E-Seleksi;
- E-Purchasing (Katalog lokal dan katalog nasional);
- Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Pencatatan); dan
- E-Kontrak

Di Tahun 2022, persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE sebesar 117% dari target 85% (40 SKPD dari target 34 SKPD).

Proses pengadaan yang dilaksanakan oleh SKPD melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) di Tahun 2022 adalah kegiatan e-tendering, e-seleksi, e-purchasing (Katalog lokal maupun katalog nasional), e-pengadaan langsung dan pencatatan non tender.

Di Tahun 2022 ini, semua SKPD juga sudah bertransaksi pengadaan barang/jasa (di bawah 50 juta) melalui aplikasi Sosialita. Aplikasi Sosialita adalah Aplikasi yang memfasilitasi kegiatan Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut.

Untuk capaian indikator sasaran meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem LPSE pada Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilaksanakan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu Rp. 281.926.530,- terealisasi Rp. 261.865.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 92.88%.

Adapun penyebab realisasi keuangan sebesar 92.88% dikarenakan ada beberapa uraian kegiatan yang menyisakan anggaran seperti Belanja Pemeliharaan komputer – peralatan komputer – mainframe dan Belanja Modal Sistem/Power Supply.

Terdapat beberapa kendala agar SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui SPSE tersebut, yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman dan kecakapan pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa melalui SPSE (terutama untuk e-PL, Pencatatan non Tender dan E-Kontrak);
2. Pelaksanaan pemanfaatan sistem pengadaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik (manual) terutama untuk metode pengadaan langsung secara elektronik (e-PL). Hal tersebut terjadi karena pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, masih memperbolehkan pelaksanaan secara manual.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah:

1. Peningkatan pemahaman dan kecakapan pelaku pengadaan di SKPD dalam memanfaatkan sistem pengadaan;
2. Koordinasi dengan pimpinan daerah dan stake holder di Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut terkait adanya keharusan dalam pemanfaatan sistem pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama untuk e-purchasing, non e-Tendering & non e-Purchasing dan e-kontrak.
3. Untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya di atas 200 Juta dan pengadaan jasa konsultansi di atas 100 juta telah dilaksanakan E-Tendering dan E-Seleksi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Rencana aksi perbaikan untuk peningkatan SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE yang akan dilakukan adalah :

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir dalam pemanfaatan sistem LPSE;
2. Melaksanakan koordinasi dengan stake holder lain (Bappeda, BPKAD dan Inspektorat) untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan SPSE.



GAMBAR 2

Kegiatan Pendampingan SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE Oleh Bag. Pengadaan Barang/jasa

Sasaran 3 Meningkatnya Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas

Indikator : Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

Sesuai dengan pencapaian level 3 proaktif kematangan UKPBJ, sebuah UKPBJ harus memenuhi 9 variabel yang mana salah satu dari variabel tersebut adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Sehingga target pencapaian kinerja organisasi akan mudah direalisasi.

SDM pada bagian pengadaan barang/jasa ini terdiri atas :

- Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ;
 - Pengelola PBJ (JF PPBJ)
 - Personil lainnya (Non JF PPBJ)
- Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ; dan
- Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ.

Dari unsur sumber daya pada bagian PBJ harus saling bekerja sama dalam melaksanakan pelayanan yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan Sistem pengadaan secara elektronik dan pengelolaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Indikator kinerja untuk sub bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ yaitu Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai realisasi capaian kinerja mencapai 100% (Tahun 2022).

Untuk capaian indikator sasaran meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas pada Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ dilaksanakan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu Rp. 386.154.487,- terealisasi Rp. 317.151.237,- dengan realisasi keuangan sebesar 82.13%.

Adapun penyebab realisasi keuangan sebesar 82.13% dikarenakan ada beberapa uraian kegiatan yang menyisakan anggaran seperti Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Souvenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium narasumber atau pembahasan, moderator, pembawa acara dan panitia, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Sisa Anggaran dikarenakan :

- PPN yang tidak direalisasikan secara maksimal karena banyak penyedia yang pajaknya terkategori Non PKP;
- Tidak digunakannya honorarium narasumber beserta biaya transportasi dan biaya hotel narasumber dan souvenir/cendera mata narasumber, karena terbatasnya waktu untuk melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan/workshop;
- Kegiatan Belanja Bimbingan Teknis yang tidak semuanya diikuti oleh SDM UKPBJ karena terbatasnya Pelatihan/Bimbingan Teknis yang ditawarkan untuk diikuti.

Ada beberapa kendala dalam mewujudkan SDM yang kompeten dalam pengadaan barang/jasa, yaitu :

1. Terbatasnya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
2. Sulitnya persyaratan kompetensi yang dilaksanakan oleh LKPP untuk lulus menjadi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
3. Rendahnya kesadaran pelaku pengadaan di SKPD untuk meningkatkan pemahaman terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah:

1. Pemetaan kebutuhan pelatihan pengadaan barang/jasa untuk JF PPBJ;
2. Pemantauan kinerja SDM untuk personil UKPBJ

3. Pemetaan kebutuhan pelatihan pengadaan barang/jasa untuk semua pelaku pengadaan di SKPD;
4. Perlu kunjungan ke SKPD untuk melaksanakan FGD terkait regulasi dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD.

Rencana aksi perbaikan untuk peningkatan Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas yang akan dilakukan adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dengan LKPP terkait pemenuhan kebutuhan pelatihan dan bimbingan teknis SDM JF PPBJ;
2. Penyusunan jadwal kegiatan pembinaan pelaku pengadaan yang lebih terarah, efektif dan efisien dan perlu kunjungan ke SKPD untuk melaksanakan FGD terkait regulasi dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD;
3. Melaksanakan sosialisasi/bimtek Pengadaan Barang/Jasa di kegiatan coffe morning (bersama Bupati).



GAMBAR 3

Kegiatan Koordinasi Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Perencanaan PBJ Pemerintah (2-4 November 2022)

Sasaran 4 Meningkatnya Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa

Indikator : Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa	5%	8.95%	179%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

Mengikuti arahan dari Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (MK-UKPBJ) Level proaktif, Bagian Pengadaan Barang/Jasa diharuskan untuk memiliki indikator kinerja terkait Penghematan biaya yaitu Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa. Sesuai arahan SE tersebut maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanah Laut membuat indikator kinerja yaitu Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa dengan target 100%, yang dihitung dengan cara mengukur total nilai dari pagu anggaran dibandingkan dengan total nilai kontrak.

Capaian kinerja untuk Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa di Tahun 2022 ini adalah 179% atau 8.95% telah dilaksanakan efisiensi dari nilai 5% efisiensi yang seharusnya.

Untuk **rencana aksi** di tahun yang akan datang, terkait dengan pencapaian target penghematan biaya, Bagian pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut akan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku pengadaan di SKPD agar lebih cakap dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan (spesifikasi teknis/KAK, HPS dan Rancangan Kontrak).

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas layanan pengadaan Barang/Jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik dan Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE maka ditunjang dengan Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa dengan pagu Rp 1.028.152.202,- dengan besaran realisasi Rp 902.460.388,- dan realisasi keuangan sebesar 88%. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan 2 (dua) orang Sub Koordinator yaitu Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Kepala Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa beserta Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ).

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2022	REALISASI ANGGARAN (RP) 2022	%	JUMLAH SDM	KET
1	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standard dan tepat waktu Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					
2	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	360.009.039,-	323.443.651,-	89.84%	1 Kasubbag, 15 JF PPBJ dan 1 Pengelola ULP	2 PTT
3	Persentase SDM yang Kompeten dalam pengadaan Barang/Jasa		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					
4	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang/Jasa Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam		Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	281.926.530,-	261.865.500,-	92.88%	1 (Sub Koordinator) dan 3 Staf LPSE	2 PTT 2 TENAGA AHLI
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2022	REALISASI ANGGARAN (RP) 2022	%	JUMLAH SDM	KET
	pengadaan/jasa sesuai standard dan tepat waktu		Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	386.154.487,-	317.151.237,-	82.13%	1 (Sub Koordinator)	2 PTT

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pagu Rp. 360.009.039,- terealisasi Rp. 323.443.651,- dengan realisasi keuangan sebesar 89.84%.

Adapun penyebab realisasi keuangan sebesar 89.84% dikarenakan ada beberapa uraian kegiatan yang menyisakan anggaran seperti belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan computer, honorarium narasumber atau pembahasan, moderator, pembawa acara dan panitia, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Sisa Anggaran dikarenakan :

- PPN yang tidak direalisasikan secara maksimal karena banyak penyedia yang pajaknya terkategori Non PKP;
- Kegiatan Perjalanan Daerah Dalam Kota tidak dilaksanakan karena kegiatan klarifikasi/verifikasi/koordinasi tentang PBJ ke Kecamatan terbatas;
- Tidak digunakannya honorarium narasumber beserta transport dan biaya hotel.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2022	REALISASI ANGGARAN (RP) 2022	%	SDM	KET
1	Jumlah Pemilih penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	360.009.039,-	323.443.651,-	89.84		2 PTT



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2022	REALISASI ANGGARAN (RP) 2022	%	SDM	KET
2	Jumlah Pemilih penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Kasubbag, 15 JF PPBJ dan 1 Pengelola ULP	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	165 Paket	100%	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa
2	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa

SASARAN 1 Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sesuai Standar dan Tepat Waktu

Indikator : Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	165 Paket	100%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu sebanyak 165 paket.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Terlambatnya pemasukan Dokumen Persiapan Pengadaan dari SKPD ke UKPBJ (masuk di triwulan II – April, Mei dan Juni) sehingga beban kerja Pokja Pemilihan menjadi tertumpuk pada triwulan tersebut.
- Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan pelaku pengadaan di SKPD dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan (Spesifikasi teknis, HPS dan Rancangan kontrak);

- Kurangnya pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku pengadaan di SKPD, sehingga banyak pelaporan data pengadaan yang belum terdata di SPSE.
- SKPD terlambat dalam pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- UKPBJ melaksanakan pendampingan dengan menugaskan Pengelola PBJ untuk mendampingi PPK dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan;
- UKPB selalu menyampaikan himbauan kepada SKPD agar segera menyampaikan permohonan tender/seleksi ke UKPBJ melalui rapat koordinasi (*Coffee Morning*) yang biasanya dilakukan di awal pekan;
- UKPBJ melaksanakan monitoring pelaksanaan input RUP dan melaksanakan pelatihan (*coaching clinic*) tata cara input RUP kepada SKPD serta memberikan pendampingan dalam pelaksanaan input RUP kepada SKPD.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan adalah :

- Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kompetensi kepada pelaku PBJ yang ada di SKPD dengan lebih intensif dengan cara kunjungan ke SKPD;
- Menyampaikan himbauan kepada SKPD melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP dengan dikenakannya sanksi bagi SKPD yang terlambat dalam pelaksanaan.



GAMBAR 4
 Kegiatan Reviu Pengadaan Oleh Pokja Pemilihan Bersama SKPD Dalam Proses Pemilihan

SASARAN 2 Memfasilitasi Pendampingan SKPD dalam Perencanaan Pengadaan dan Pengelolaan Kontrak

Indikator : Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak sebanyak 40 SKPD.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Sulitnya mendapatkan informasi tentang inventarisasi paket PBJ yang ada di SKPD;
- Sulitnya mendapatkan informasi tentang e-purchasing (e-katalog lokal dan e-katalog nasional) yang telah selesai dilaksanakan oleh PPK;
- Sulitnya koordinasi dengan SKPD (khususnya PPK) dalam hal pendampingan pengelolaan kontrak.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Menyampaikan himbauan kepada SKPD melalui Sekretaris Daerah pada kegiatan rapat koordinasi agar SKPD melaksanakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan sesegera mungkin, sehingga UKPBJ bisa segera menginventarisasi, memetakan dan merencanakan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Menyampaikan kepada SKPD agar melibatkan JF PPBJ yang ada di UKPBJ untuk berperan serta mendampingi dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ.
- Melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelaku pengadaan di SKPD dalam memanfaatkan system pengadaan.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi intensif kepada SKPD terkait pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan agar bisa dilaksanakan di awal tahun, sehingga UKPB dapat lebih mudah untuk memetakan dan merencanakan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Melaksanakan bimbingan teknis/workshop tim teknis PPK dalam memanfaatkan sistem pengadaan.
- Lebih intens melaksanakan sosialisasi kepada SKPD tentang peran serta Pengelola PPBJ dalam pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ dengan tujuan agar Pengelola PPBJ lebih dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ.

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"
2	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	
3	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	
4	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 78,4	104,5%	

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Capaian kinerja Bagian Hukum dari 4 (empat) indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase informasi produk hukum pada Tahun 2022 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100%;
- 2) Persentase produk hukum yang harmonis pada Tahun 2022 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100%;
- 3) Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani pada Tahun 2022 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100%;
- 4) Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) pada Tahun 2022 dengan target nilai 75 dapat terealisasi dengan baik dengan realisasi Nilai 78,4 dan mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. sehingga realisasinya adalah sebesar 104,5%;

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase informasi produk hukum	%	-	100%	100%	100%	100%
2	Persentase produk hukum yang harmonis	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai	Nilai 79,64	-	Nilai 75	Nilai 78,4	104,5%

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

- 1) Persentase informasi produk hukum pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 sama-sama terealisasi 100%;
- 2) Persentase produk hukum yang harmonis pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 sama-sama terealisasi 100%;
- 3) Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 sama-sama terealisasi 100%;
- 4) Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik dengan Nilai 78,4 sedangkan untuk Tahun 2021 tidak dilakukan penilaian dikarenakan peniadaan kegiatan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2019-2023)**

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III pada Tahun 2019 hanya ada 3 (tiga) yaitu Jumlah Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis dengan capaian 237%, Jumlah masalah hukum yang diselesaikan dengan capaian 100%, dan diraihnya predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan capaian 100%;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III pada Tahun 2020 bertambah 1 (satu) sehingga menjadi 4 (empat) indikator yaitu Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis dengan capaian 100%, Persentase masalah hukum

yang diselesaikan dengan capaian 100%, dan Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM dengan capaian 100%, Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan dengan capaian 100%;

- 3) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III pada Tahun 2021 ada 4 (empat) indikator yaitu Persentase informasi produk hukum dengan capaian 100%, Persentase produk hukum yang harmonis dengan capaian 100%, dan Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani dengan capaian 125%, dan Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) yang tidak dapat terealisasi dikarenakan peniadaan kegiatan penilaian ditahun tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III pada Tahun 2022 ada 4 (empat) indikator yaitu Persentase informasi produk hukum dengan capaian 100%, Persentase produk hukum yang harmonis dengan capaian 100%, dan Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani dengan capaian 100%, dan Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dengan capaian 104,5%.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**



NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	562	1.333	237%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	4	4	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
	Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Diraihnya predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
	Produk Hukum Daerah yang terdokumenta si dan dipublikasikan	Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	450	450	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai	Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum



	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan																	
	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
	Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM	-	-	-	Nilai 75	Nilai 79,64	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
	Produk Hukum Daerah yang terdokumenta si dan dipublikasikan	Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Bagian Hukum
	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Bagian Hukum
	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Bagian Hukum
	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	-	-	-	-	-	-	Nilai 75	-	-	Nilai 75	Nilai 78,4	104,5 %	Nilai 76	-	-	Bagian Hukum

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Informasi Produk Hukum

Indikator : Persentase Infomasi Produk Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Dalam rangka untuk meningkatnya informasi produk hukum maka Bagian Hukum melalui Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum telah melakukan publikasi atau penyebar luasan produk hukum daerah melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah dengan cara mendigitalisasikan produk hukum daerah yang telah diundangkan pada Tahun 2022.

Publikasi atau penyebar luasan produk hukum juga dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum, pada Tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Bajuin, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Tambang Ulang.

Selain itu juga telah dilakukan pembukuan terhadap produk hukum daerah sebanyak 500 eksemplar Lembaran Daerah pada Tahun 2022. Setelah dilakukan cetak Produk hukum daerah tersebut dipublikasikan dengan cara membagikan produk hukum daerah yang telah dibukukan tersebut kepada SKPD sampai dengan Kecamatan.

Sehingga target 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat dianggap terrealisasikan semua atau 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Proses penginputan atau pengunggahan data produk hukum daerah belum terjadwal dengan baik dikarenakan padatnya kegiatan pada Sub Kegiatan Pendokumentasian

Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum karena sejak Tahun 2021 juga melakukan pencetakan terhadap produk hukum penetapan.

- File atau dokumen Peraturan Daerah Tahun 2005 kebawah yang masih belum ditemukan arsipnya karena proses pengarsipan waktu itu masih belum sebagus saat ini. kebawah dan Peraturan Bupati Tahun 2013 ke bawah tidak tersedia karena terkendala tidak adanya file atau dokumen karena ditahun-tahun tersebut Perbup langsung dicetak oleh SKPD masing-masing.
- Masih terbatasnya anggaran untuk melakukan pencetak produk hukum dan sosialisasi hukum

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut
- Perlu melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau ke SKPD-SKPD terkait secara bertahap
- perlu penambahan anggaran pada cetak produk hukum agar dapat mencetak lebih banyak produk hukum dan kegiatan sosialisasi hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut
- melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap
- Penganggaran pembuatan cetak produk hukum



(Screenshot website <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/>)



(Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah)

SASARAN 2 Meningkatnya harmonisasi produk hukum

Indikator : Persentase produk hukum yang harmonisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Dalam hal ini bagian hukum menerima dan melakukan koreksi terhadap *draft* rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diusulkan oleh SKPD terkait ke bagian hukum. Selanjutnya juga dilakukan autentifikasi terhadap draf rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Melakukan rapat-rapat serta fasilitasi dan evaluasi terhadap draf rancangan peraturan daerah dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jika diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Hal tersebut juga bisa dilakukan terhadap rancangan peraturan bupati jika diperlukan. Dan khusus untuk Harmonisasi terhadap Peraturan Daerah wajib dilakukan melalui Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Untuk Tahun 2022 ada sebanyak 14 Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan sebelumnya telah dilakukan fasilitasi dan harmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 143 Peraturan Bupati, 1312 Keputusan Bupati dan 12 Instruksi Bupati. Sehingga target 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat direalisasikan 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama terutama rancangan peraturan daerah yang terkadang terkendala dalam proses di DPRD
- Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.
- belum siapnya SKPD pengusul terhadap draft dan kajian rancangan peraturan daerah (naskah akademik) serta materi muatan yang perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke kementerian / lembaga terkait atau pakar hukum atau tenaga ahli.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Petugas perlu menghubungi SKPD pengusul untuk mengingatkan agar draf yang telah diperbaiki agar segera diserahkan kembali ke bagian hukum
- Perlunya penganggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah serta honorarium narasumber
- Perlunya penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.
- Penambahan anggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah serta honorarium narasumber
- Penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.



(Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah)



(Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah)

SASARAN 3 Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Pemberian layanan bantuan hukum, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD, dan Pemerintahan Desa di Tahun 2022 berjumlah 4 (empat) kasus/perkara hukum yang telah dibantu penanganannya oleh Bagian Hukum melalui Sub Kegiatan Bantuan Hukum. Kasus/perkara Hukum yang ditangani tersebut terdiri dari 2 (dua) perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan register perkara Nomor: 17/G/2022/PTUN.BJM yang dikuasakan oleh Lurah Angsau dan Camat Pelaihari ke Bagian Hukum dan saat ini sedang dalam tahapan Kasasi, dan Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.BJM yang dikuasakan oleh Kepala Desa Pandan Sari dan saat ini masih dalam proses persidangan tingkat pertama, lalu 2 (dua) perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pli yang dikuasakan oleh Lurah Sarang Halang dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN Pli yang dikuasakan oleh Kepala Desa Sungai Cuka dan Camat Kintap ke Bagian Hukum dan saat ini masih dalam proses persidangan tingkat pertama.

Dalam fasilitasi penanganan kasus/perkara tidak serta merta dapat diprediksi kapan kasus tersebut dapat dianggap selesai, karena bisa saja salah satu pihak melakukan upaya hukum sehingga waktu atau proses akan tetap berlanjut sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa telah dilakukan fasilitasi bantuan hukum terhadap semua kasus yang masuk atau yang dimintakan pendampingan, sehingga Persentase kasus/perkara hukum yang tertanganidengan target 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat dianggap terrealisasikan semua atau 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, dan hadir pada saat mediasi dan sidang pemeriksaan setempat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- koordinasi dan komunikasi dengan pemberi kuasa

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan sampai dalam peanganan perkara sampai dengan selesai.



(Dokumentasi mediasi perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN Pli)

SASARAN 4 Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut

Indikator : Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 78,4	104.5%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”

Bahwa pada Tahun 2022 kegiatan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM kembali dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I, proses pengumpulan bahan/formulir penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM telah dilakukan oleh Bagian Hukum sejak awal Tahun 2022 yang diambil dari data-data pada Tahun 2021 yang dikumpulkan dari SKPD-SKPD terkait yang wajib dilengkapi dengan data dukung untuk setiap poinnya.

Ada 10 Kelompok HAK yang wajib terpenuhi dalam penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yaitu hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak atas turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak dan hak perempuan dan anak. Penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM diambil dari nilai 10 kelompok tersebut (Nilai 73,4) diatas ditambah dengan nilai dari pengimplementasian Aksi HAM Tahun 2021 (Nilai 5) sehingga Kabupaten Tanah Laut mendapat Total Nilai 78,4 dengan Kriteria Peduli HAM, sehingga realisasinya melebihi target yang semula hanya ditargetkan mendapat nilai 75 dengan realisasi nilai 78,4 atau 104,5%.

Meski memenuhi target, namun dalam pelaksanaan indikator tersebut di atas masih terdapat beberapa kendala antara lain:

- Masih terdapat beberapa nilai capaian dibawah 60 untuk beberapa kelompok hak pada penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM, hal tersebut dikarenakan kurangnya data dukung yang diberikan oleh SKPD/Lembaga terkait.
- Adanya beberapa kegiatan khususnya RANHAM yang menjadi nilai tambah dalam penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM yang memang tidak dapat terlaksana karena tidak direncanakan dan dianggarkan oleh SKPD/Lembaga terkait.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- koordinasi dan komunikasi hingga jemput bola untuk membantu SKPD/Lembaga terkait untuk dapat melengkapi data dukung atas form yang telah diberikan.
- Koordinasi dengan BAPPEDA terkait kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan data RANHAM yang perlu dianggarkan oleh SKPD/Lembaga terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Karena pemilik data adalah SKPD/Lembaga terkait (pihak eksternal) maka tugas Bagian Hukum selaku koordinator dalam kegiatan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM hanyalah

terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD/Lembaga terkait terkait pengisian form/data-data yang diperlukan.

- Menyerahkan Laporan Penilaian Kreteria Kab/Kota Peduli HAM dan RANHAM kepada BAPPEDA agar dapat dijadikan bahan untuk perencanaan yang menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahun berikutnya.



(Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM)

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis / kinerja utama dalam meningkatnya informasi produk hukum, meningkatnya harmonisasi produk hukum, tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dan Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut yang di tunjangan dalam program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum dengan jumlah Pagu sebesar 1.483.907.058,- dengan reasliasi sebesar 1.038.558.036,- atau sebesar 70% yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) orang SDM yang terdiri dari 7 (tujuh) orang PNS yaitu Kepala Bagian Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (Sub Koordinator Pembentukan Produk Hukum Pengaturan), Penyuluh Hukum Muda (Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM), Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (Sub Koordinator Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum), Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan serta 7 (tujuh) orang Pegawai Tidak Tetap.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase informasi produk hukum	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	254.519.532	214.646.660	84,33%	5	- Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (1 orang) PTT (3 orang)
2	Persentase produk hukum yang harmonis		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	939.963.285	688.762.976	73,28%	4	- Penyuluh Hukum Muda (1 orang) - Penyusun Bahan Bantuan Hukum (1 orang)



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
								PTT (2 orang)
3	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum					
4	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	289.424.241	135.1484.00	46,70%	4	- Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (1 orang) PTT (2 orang)

Analisa Capaian Sasaran Strategis
Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	0%	0%	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti	100%	0%	0%	
ESELON IV						
1	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	430 Kali	430 Kali	100%	Kasubbag Protokol
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 Kali	28 Kali	100%	Kasubbag Protokol

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Rata-rata capaian kinerja bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah **100%**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 2) Persentase kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

- 3) Persentase kegiatan KDH/WKDHSKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 4) Persentase Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi tahun ini tidak ada kegiatan karena kegiatan ini sudah dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika
- 5) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti adalah 0% dari target 100%, Karena tidak terdapat aduan dari Masyarakat.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap capaian tahun sebelumnya :

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan terhadap capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyebaran informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	0%	0	100%	0%	0%
	Rata – Rata Capaian						100%

❖ Perbandingan realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ada 5 (Lima) indikator adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Persentase penyebaran informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu tercapai 100%
- 2) Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu tercapai 100%

- 3) Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/tamu daerah yang terlayani keprotokolannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu tercapai 100%
- 4) Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 mengalami perubahan, tahun ini tidak ada, karena kegiatan sudah dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 5) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu 0%

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**



NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya layanan informasi penyelenggara pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas dan Keprotokolan
		Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas dan Keprotokolan
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas dan Keprotokolan
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas dan Keprotokolan
	Meningkatnya layanan informasi penyelenggara pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan



		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	-	-	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	-	-	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

❖ **Analisa program penunjang**

SASARAN 1 Meningkatnya Layanan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Komunikasi Pimpinan, Keprotokolan dan Dokumentasi.

Indikator 1 : Persentase Penyebarluasan Informasi/Pemberitaan Pembangunan Pemerintahan Daerah yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terpublikasikan melalui media elektronik, media online maupun media sosial dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan pagu Rp 319.752.800,00 terealisasi Rp 293.624.956,00 dengan realisasi keuangan sebesar 92 %.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Penyebarluasan informasi / pemberitaan melalui web dan media sosial, SDM-nya kurang tanggap terhadap informasi yang harus dipublikasikan.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM agar lebih tanggap mengelola informasi yang dipublikasikan melalui web dan media sosial.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM melalui bimtek agar lebih tanggap dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah melalui web dan media sosial yang dikelola pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.



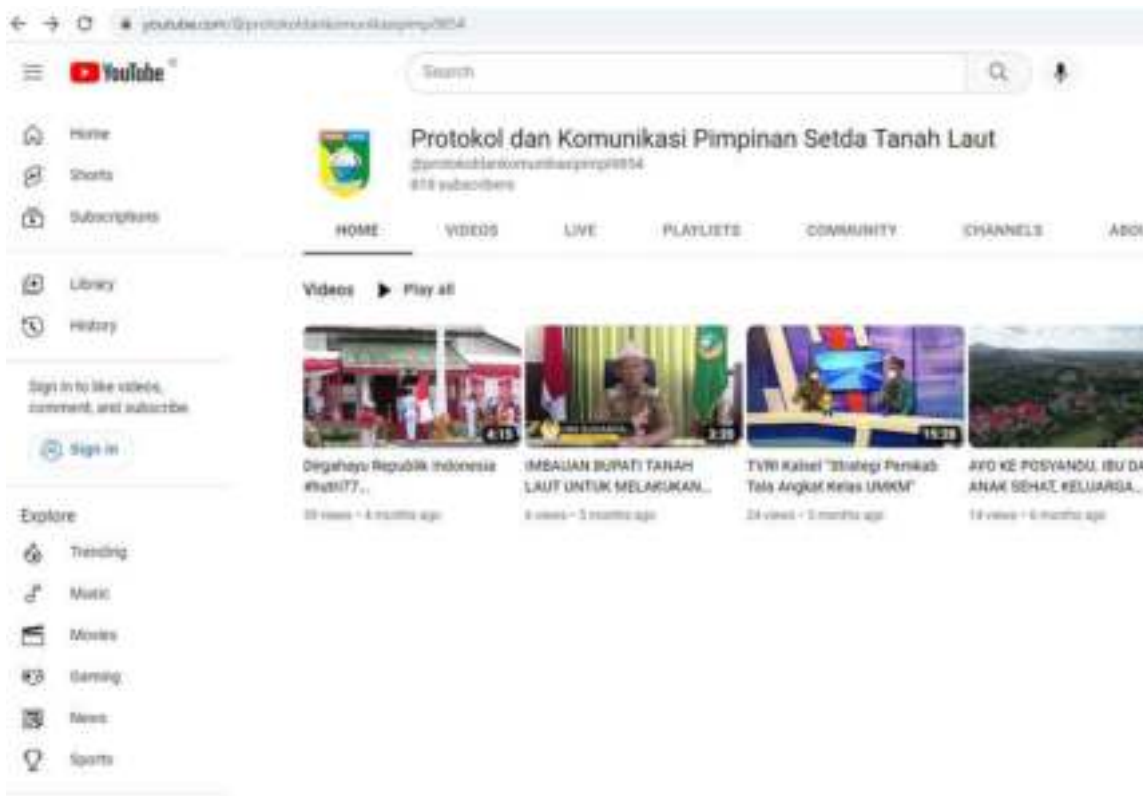


Foto : Media Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Indikator 2 : Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terdokumentasikan dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan pagu Rp 437.156.830,00 terealisasi sebesar Rp 409.215.965,00 atau sebesar 93,60 %.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kualitas sarana penyimpanan Dokumentasi kegiatan KDH / WKDH yang masih kurang memadai.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendokumentasian Pimpinan dan Kualitas sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan KDH / WKDH pada Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan agar lebih memadai.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pendokumentasian dan sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terfasilitasi dan terdokumentasikan.



Foto : Beberapa dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

Indikator 3 : Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolannya dan dokumentasi.	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah tamu daerah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah tamu daerah yang terlayani keprotokolannya dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan pagu Rp 299.706.344,00 terealisasi sebesar Rp 283.644.476,00 atau sebesar 94,64 %.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kurangnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan Sub Bagian Fasilitasi Keprotokolan.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Menginformasikan kepada pelaksana kegiatan agar terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Sub Bagian fasilitasi Keprotokolan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terlayani keprotokolannya dengan baik.



Foto :. Beberapa kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi Keprotokolannya.

Indikator 4 : Presentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	0%	0%	0%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini Tahun 2022 tidak dilaksanakan karena seluruh kegiatan pimpinan yang dipublikasikan melalui media cetak sudah dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan tidak menganggarkan lagi.



Foto : 1. salah satu media publikasi kegiatan pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut melalui website setda.tanahlautkab.go.id

2. Beberapa dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

Indikator 5 : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Pada tahun ini tidak ada pengaduan maupun yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi E-Lapor dengan program kegiatan Lapor KTA.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur penyampaian aduan.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat agar penyampaian aduan sesuai dengan prosedur.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tindak lanjut jika ditemukan laporan yang masuk.



❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

- 1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media sosial dan website serta ditunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan pagu Rp. 319.752.800,00 terealisasi Rp. 293.624.956,00 dengan realisasi keuangan sebesar 92% dan dilaksanakan oleh 8 (delapan) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Koordinasi Komunikasi Pimpinan, Pranata Komputer Lanjutan, dan 5 (lima) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- 2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan pagu Rp 437.156.830,00 terealisasi sebesar Rp 409.215.965,00 atau sebesar 93,60 % dan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Koordinasi Dokumentasi Pimpinan, satu orang pelaksana, dan 6 (enam) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- 3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator presentasi kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan dengan pagu Rp 299.706.344,00 terealisasi sebesar Rp 283.644.475,00 atau sebesar 94,64 %, dan dilaksanakan oleh 11 (sebelas) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,

Kasubbag Protokol, 6 (enam) orang Petugas Protokol, dan 4 (empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

- 4) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi E-Lapor dengan program kegiatan Lapor KTA dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Koordinasi Komunikasi Pimpinan dan operator.
- 5) Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan dengan Jumlah pagu Rp 1.056.615.974,00 terealisasi Rp 986.485.397,00 atau sebesar 93,37% dikarenakan :
 - Adanya peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur tentang perjalanan dinas , dimana di dalamnya mengatur besaran uang transport lokal perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam.

**Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang
dan Sumber Daya Manusia**

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Persentase penyebarluasan informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					
2	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi			319.752.800	293.624.956	92	7	
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti							
4	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani		- Sub Kegiatan Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan	437.156.830	409.215.965	93,60	8	
5	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya		- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolanan	299.706.344	283.644.476	94,64	11	
JUMLAH								

❖ Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Protokol

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Protokol dilaksanakan melalui program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi Protokol dengan pagu Rp 299.706.344,00 terealisasi Rp 283.644.476,00 dengan realisasi keuangan sebesar 94,64%, dan dilaksanakan oleh 12 (dua belas) orang SDM yaitu Kepala Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan, Kasubbag Protokol, 6 (enam) Orang Petugas Protokol dan 4 (Empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Protokol

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Jumlah Kegiatan KDH/WKDH yang terlayani Keprotokolannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	299.706.344	283.644.476	94,64	11	
2	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik		- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	299.706.344	283.644.476	94,64	11	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Protokol dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Protokol

	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	430 Kali	430 Kali	100 %	Kasubbag Protokol
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 Kali	28 Kali	100 %	Kasubbag Protokol

SASARAN 1 Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH yang Terlayani

Indikator : Jumlah Kegiatan KDH/WKDH yang Terlayani Keprotokolannya

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	430 Kali	430 Kali	100 %	Kasubbag Protokol

Pada Tahun 2022 pelayanan keprotokolan kegiatan KDH/WKDH/SKPD terlaksana sesuai dengan target dan tercapai 100%.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Peningkatan Koordinasi dengan Penyelenggara Acara dan ADC/Ajudan Pimpinan dan mengingatkan kembali kepada pelaksana acara agar menyampaikan surat permohonan fasilitasi kegiatan ke Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- Menyediakan armada/alat transportasi yang lebih memadai untuk pelaksanaan fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH di lapangan.



Foto : Beberapa kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi Keprotokolannya.

SASARAN 2 Pelayanan Tamu KDH/WKDH Yang Terlayani

Indikator : Jumlah tamu KDH/WKDH yang Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 Kali	28 Kali	100 %	Kasubbag Protokol

Pada Tahun 2022 seluruh tamu KDH/WKDH terlayani dengan baik sesuai dengan prosedur pelayanan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Mengadakan bimbingan teknis fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan kepada SKPD dan organisasi.



Foto : Beberapa pelayanan Tamu KDH/WKDH yang terfasilitasi Keprotokolannya.

Analisa Capaian Sasaran Strategis
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	99.64%	99.64%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"
2	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	98.04%	98.04%	
3	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	89.65%	89.65%	

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

1) Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Fasilitas Bina Mental Spiritual berupa fasilitasi pemberian bantuan hibah kepada lembaga/organisasi sosial keagamaan pada prinsipnya berjalan baik dan lancar dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.042.116.816,- terealisasi sebesar Rp. 7.016.683.200,- atau 99,64%, tetapi memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu antara lain masih kurangnya pemahaman pengurus lembaga/organisasi penerima hibah dalam hal administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan penggunaan dana hibah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual secara fisik dapat terealisasi 100%, yaitu terlaksananya :
 - Sosialisasi Pencairan dan Pelaporan Dana Hibah Daerah TA. 2022.
 - Kegiatan UKS dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

dengan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 107.116.816,- terealisasi Rp. 82.663.500,- atau 77,17%.

- b. Proposal hibah lembaga / organisasi keagamaan yang disetujui oleh Pemerintah Daerah pada TA. 2022 sebanyak 115 Proposal dan terealisasi secara fisik 100%, tetapi secara keuangan dari Pagu Rp 6.935.000.000,-

terrealisasi Rp. 6.934.019.700 atau 99,99% karena ada pengembalian dari dana hibah sebesar Rp. 980.300,-

2) Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, pada dasarnya dapat terlaksana sesuai yang direncanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.437.890.843,- terrealisasi sebesar Rp. 20.036.513.850,- atau 98,04%, yang terdiri dari terlaksananya 4 (empat) kegiatan dan terbayarnya insentif kepada Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama, dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - Kegiatan Pelatihan Mandi Jenazah bagi seluruh Penyuluh Agama Kab. Tanah Laut.
 - Kegiatan Studi Banding bagi Koordinator Penyuluh Agama ke Yogyakarta.
 - Kegiatan Wisuda Santri TPA/TKA se Kab. Tanah Laut.
 - Kegiatan Studi Tiru Penyuluh Agama Hindu ke Bali.
- Jumlah Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama yang mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berjumlah 3.290 orang dengan besaran Rp.19.308.000.000,-, yang terdiri dari guru-guru pada lembaga pendidikan keagamaan TKA/TPA berjumlah 1.898 orang, Madin/MIS berjumlah 466 orang, Pondok Pesantren berjumlah 686 orang dan Tenaga Penyuluh Agama berjumlah 240 orang.

Dari total keseluruhan tenaga pengajar yang berjumlah 3.290 orang, ada insentif yang dikembalikan ke Kas Daerah sebanyak 45 orang disebabkan berhenti, meninggal dunia dan lulus sebagai Tenaga P3K Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut.

3) Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, pada dasarnya dapat terlaksana dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.298.391.580,- dapat terrealisasi Rp. 2.957.048.442,- atau 89,65%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terlaksananya 11 Kegiatan Keagamaan dari 11 Kegiatan yang direncanakan yaitu :
- Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 H.
 - Safari Ramadhan Bupati dan Wabub Tanah Laut.
 - Shalat idul Fitri dan Idul Adha berjamaah bersama Bupati dan Wakil Bupati serta Halal Bihalal.
 - Tausiyah lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut.
 - Penyelenggaraan Ibadah Haji Kab. Tanah Laut Tahun 2022.
 - Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Bidang Agama.
 - Musabaqah Qira'atil Kutub Tk. Kab. Tanah Laut.
 - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H.
 - Shalat Hajat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
 - Shalat Hajat Hari Jadi Kab. Tanah Laut Tahun 2022.
 - Gema Al Qur'an Tanah Laut Tahun 2022.
- b. Pembinaan terhadap Lembaga/Organisasi Pendidikan keagamaan di Kabupaten Tanah Laut yaitu TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama.
- c. Fasilitasi kegiatan Lembaga/Organisasi Keagamaan, terdiri dari :
- a. Fasilitasi kegiatan LPTQ Kabupaten Tanah Laut berupa Pelantikan dan Orientasi Dewan Hakim MTQ Tk. Kab. Tanah Laut dan Fasilitasi pada MTQ Tk. Nasional dimana Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah.
 - b. Fasilitasi kegiatan FKDT Kabupaten Tanah Laut pada PORSADIN Tk. Provinsi Kalimantan Selatan dan Tk. Nasional.
 - c. Fasilitasi kegiatan FKPP Kabupaten Tanah Laut berupa Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Tanah Laut.
 - d. Fasilitasi kegiatan BHR Kabupaten Tanah Laut berupa kegiatan Ru'yatul Hilal 1 Syawal 1443 H dan Pengukuran arah Kiblat tempat Ibadah (Masjid/Langgar/Mushala) di Kab. Tanah Laut.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat terhadap capaian tahun sebelumnya :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	%	84,93%	96,43%	100%	99.64%	99.64%
2	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	%	99,94	98,81%	100%	98.04%	98.04%
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	%	11,77%	72,23%	100%	89.65%	89.65%

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya :**

- 1) Persentase realisasi peningkatan pelayanan lembaga sosial dan keagamaan berupa pelaksanaan kegiatan dan pemberian bantuan hibah kepada lembaga/organisasi keagamaan di Kab. Tanah Laut Tahun 2021 dan Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 3,21% , yaitu dari 96,43% menjadi 99,64%.
- 2) Persentase realiasi layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan yakni berupa pelaksanaan kegiatan dan pemberian insentif Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,77%, yakni dari 98,81% menjadi 98,04%, hal ini disebabkan adanya tenaga pengajar yang berhenti, meninggal dunia dan mengundurkan diri karena lulus menjadi tenaga P3K di Kab. Tanah Laut.
- 3) Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 17,42% yakni dari 72,23% menjadi 89,65%.
- 4)

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	%	100%	86%	84,93%	96,36%	99.64%
2	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	%	100%	99,51%	100%	99,22%	98.04%
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	%	100%	61,74%	11,77%	100%	89.65%

- 1) Persentase capaian Indikator Kinerja Utama peningkatan pelayanan lembaga sosial dan keagamaan berupa pelaksanaan kegiatan dan pemberian bantuan hibah kepada lembaga/organisasi keagamaan di Kab. Tanah Laut dari Tahun 2018-2023 pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, namun tidak dapat terealisasi 100% pada Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 disebabkan :
 - Terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga penerima hibah tidak dapat melaksanakan kegiatan.
 - Pemohon hibah sudah melaksanakan kegiatan fisiknya sebelum ada pencairan dana.
 - Pelaksanaan kegiatan fisik dari penerima hibah tidak sesuai dengan RAB Permohonan awal sehingga dana untuk organisasi tersebut tidak bisa di cairkan.
 - Pengurus Lembaga tidak mengajukan berkas pencairan dana hibah disebabkan adanya perhantian pengurus Lembaga/organisasi.
- 2) Persentase capaian Indikator Kinerja Utama layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan yakni berupa pelaksanaan kegiatan dan pemberian insentif Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama di Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2018-2023 pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, namun tidak dapat terealisasi 100% pada Tahun 2019 dan Tahun 2021, hal ini disebabkan adanya tenaga pengajar yang berhenti, meninggal dunia dan mengundurkan diri karena lulus menjadi tenaga P3K di Kab. Tanah Laut.
- 3) Persentase capaian Indikator Kinerja Utama hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2018-2023 pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, namun tidak dapat terealisasi 100% pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, hal ini disebabkan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak tidak dapat dilaksanakan.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**



NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya kualitas layanan untuk kesejahteraan rakyat	Persentase layanan keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	86%	86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	99,51 %	99,51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan pelayanan lembaga keagamaan	-	-	-	100%	84,93%	84,93 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya peran Organisasi/lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	-	-	-	100%	99,83%	99,94 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya peran Organisasi/Lembaga Keagamaan/S KPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	-	-	-	100%	11,77%	11,77 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	-	-	-	-	-	-	100%	96,43 %	96,36 %	100%	99,64 %	99,64 %	100%	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat



	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	-	-	-	-	-	-	100%	98,81 %	99,22 %	100%	98.04 %	98.04 %	100%	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	89.65 %	89.65 %	100%	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan

Indikator : Persentase Peningkatan Lembaga Sosial dan Keagamaan yang Dibina

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	99.64%	99.64%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat semakin banyak tahun demi tahun, ini dilihat dari banyak organisasi/kelembagaan sosial dan keagamaan yang memohon bantuan baik itu berupa fisik maupun kegiatan keagamaan. Jumlah proposal pada Tahun 2022 sebanyak 115 proposal.

NO	URAIAN	JUMLAH PROPOSAL YANG MASUK	JUMLAH PROPOSAL YANG DITINDAK LANJUTI	JUMLAH PROPOSAL YANG TIDAK DITINDAK LANJUTI	CAPAIAN 2022
1	Jumlah Proposal Hibah	150 Proposal	115 Proposal	35 Proposal	76,67 %

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Bagi pengurus organisasi/kelembagaan keagamaan yang memohon bantuan hibah kebanyakan tidak atau belum memahami tata cara dan kelengkapan administrasi Proposal yang diajukan.
- Lambatnya dalam hal pencairan dana hibah dikarenakan pengurus lembaga/ organisasi cenderung lambat dalam pengajuan kelengkapan administrasi pencairan dana hibah kepada Tim verifikasi di Bagian Kesra.
- Permintaan RAB proposal pencairan berbeda dengan RAB proposal awal sehingga terjadi beberapa kali perbaikan yang memakan waktu bagi pengurus lembaga/organisasi tersebut.
- Kurangnya pemahaman dalam meng SPJ kan dana hibah.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada pemohon hibah secara langsung dan meminta kepada aparat Desa dan Kecamatan untuk menyampaikan syarat-syarat proposal mengajukan permohonan fisik maupun kegiatan kepada bagian kesejahteraan rakyat.
- Sebelum membuat permohonan proposal terlebih dahulu melakukan musyawarah pengurus dengan warga berkaitan dengan permintaan apa yang diinginkan.
- Meningkatkan koordinasi yang intensif kepada pejabat atau instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada penerima pencairan hibah secara langsung dan sosialisasi bagaimana membuat laporan keuangan bantuan hibah
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.

Daftar Penerima Hibah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
 Tahun Anggaran 2022 Hibah Uang yang Direkomendasikan Oleh
 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Badan Pengelola Masjid Al Mujahidin	Jl. A. Yani KM. 5,5 RT.008 RW.002 Desa Panggung Kec.Pelaihari	Rp. 500,000,000
2	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Laut	Jl. A. Yani Km. 6 RT.008 RW.002 Desa Panggung Kec.Pelaihari	Rp. 500,000,000
3	Yayasan Pesantren Assyuhada	Jl. Abadi RT.03 RW.01 Kec.Pelaihari	Rp. 350,000,000
4	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut	Jl. Sapta Marga RT.007 RW.003 Kel. Pelaihari Kec.Pelaihari	Rp. 350,000,000
5	Gereja Kalimantan Evangelis	Jl. Sepakat RT.016 RW.004 No.16 Kel. Angsau Kec.Pelaihari	Rp. 200,000,000
6	Yayasan Pendidikan Islam Daarul Qur'an Istiqomah Tanah Laut	Jl. H. Boejasin Simpang Tiga Al Manar RT.022 RW.001 Kel. Angsau Kec.Pelaihari	Rp. 100,000,000
7	Pimpinan Daerah Aisyiyah	Jl. Matah I RT. 006/002 No. 43 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari	Rp. 75,000,000
8	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Tanah Laut	Jl. A. Yani Km. 6 RT.008 RW.002 Desa Panggung Kec.Pelaihari	Rp. 75,000,000
9	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tanah	Jl. Samudera RT.010 RW.04 Kel. Pelaihari Kec.Pelaihari	Rp. 75,000,000



NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Laut		
10	Lembaga Bendesa Adat Banjaran Mertesari	Desa Kampung Baru RT.04 RW.02 Dsn. Sumber Rejo Kec.Pelaihari	Rp. 50,000,000
11	Pengurus Masjid Daarun Najah	Desa Ujung Batu RT.11 RW.04 Kec.Pelaihari	Rp. 50,000,000
12	Pengurus Masjid Raudatul Aflah	Jln. Telkom RT.002/001 Desa Panggung Baru Kec.Pelaihari	Rp. 50,000,000
13	Group Habsyi Az-Zahra	Jl. Giok No.11 RT.07B RW.02 Komplek Permata Jingga Kec.Pelaihari	Rp. 40,000,000
14	Pengurus Kumpulan Maulid Al-Habsyi Haqqul Yaqin	Jalan Datu Daim RT.28 RW.02 Kec.Pelaihari	Rp. 25,000,000
15	Pengurus Langgar Nurul Huda	Desa Panjaratan RT. 01 RW. 01 Kec.Pelaihari	Rp. 25,000,000
16	Yayasan Al Falah Panjaratan	Desa Panjaratan RT. 01 RW. 01 Kec.Pelaihari	Rp. 25,000,000
17	Pengurus Langgar Raudhatul Jannah	Komplek Pasar PTP RT.008 RW.003 Desa Ambungan Kec.Pelaihari	Rp. 25,000,000
18	Pengurus Langgar Al-Falah	Jl.Proklamasi RT.08 RW.03 Desa Sumber Mulia Kec.Pelaihari	Rp. 50,000,000
19	Pengurus Musholla Jamiatul Mukminin	Jl. Pesantren RT.014/006 Desa Sungai Riam Kec.Pelaihari	Rp. 25,000,000
20	Pengurus Musholla Al Ikhlas	Jl. Pesantren RT.09/04 Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari	Rp. 20,000,000
21	Pengurus Langgar Nurul Jannah	Desa Sumber Mulia RT.006 DSN.003 Kec.Pelaihari	Rp. 20,000,000
22	Badan Pengelola Masjid Hidayatussalikin	Desa Telaga RT.06 RW.01 Kec.Pelaihari	Rp. 20,000,000
23	Pengurus Langgar Arraudhah	Jln. Antesa RT.05B RW.001 Kel. Angsau Kec.Pelaihari	Rp. 30,000,000
24	Pengurus Kerukunan Sosial Kematian Darul Mustaqim	Jl. Ambawang RT.015 RW.003 Kel. Sarang Halang Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000
25	Kelompok Habsyi An Wariah	RT.02 RW.01 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000
26	Perkumpulan Maulid Habsyi As-Syifa	Desa Telaga RT.08 RW.01 Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000
27	Perkumpulan Maulid Habsyi Attakwa Putra	Desa Telaga RT.08 RW.01 Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000
28	Kelompok Habsyi Al-Munawwarrah	Jl. Matah II RT.007/003 Kel. Karang Taruna Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000
29	Kelompok Habsyi Zauharatun Nafisah	Jl. Matah II RT.007/003 Kel. Karang Taruna Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000
30	Pengurus Rukun Kematian Al Ikhlas	RT.006/003 Dusun II Desa Sungai Riam Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000
31	Rukun Kematian Al Ikhwan	Jl. Purnawirawan RT.003 RW.001 Kel. Angsau Kec.Pelaihari	Rp. 25,000,000
32	Group Habsy Fatimah Az Zahra	Jl. A. Fatah RT.27 RW.08 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000



NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
33	Majelis Maulid Al Habsyi Khoirunnissa	Desa Sumber Mulia RT.004 Dsn.002 Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000
34	Pengurus Kelompok Habsyi Raudhatul Jannah	Desa Sumber Mulia RT.007/004 Kec.Pelaihari	Rp. 15,000,000
35	Yayasan Pesantren Ubudiyah	Jl. Pesantren RT.07/RW.02 Desa Padang Kec.Bati-Bati	Rp. 200,000,000
36	Pengurus Langgar Darul Aman	Jl.Pelabuhan Telaga Giri RT.003 RW.002 Desa Benua Raya Kec.Bati-Bati	Rp. 75,000,000
37	Pengurus Masjid Raudhatul Muttaqin	Jl. Datu Insad RT.02 RW.02 Desa Sambangan Kec.Bati-Bati	Rp. 50,000,000
38	Pengurus Yayasan Nurul Aman Desa Sambangan	Jl. Pasar Rawa RT.04 RW.01 Desa Sambangan Kec.Bati-Bati	Rp. 50,000,000
39	Pengurus Langgar Darussalam	Jl. A. Yani RT.02 RW.02 Desa Benua Raya Kec.Bati-Bati	Rp. 75,000,000
40	Pengurus Group Maulid Habsyi Al Karomah	Jl.Pesantren Kom.Al Karomah RT.008 RW.003 Desa Bati-Bati Kec.Bati-Bati	Rp. 15,000,000
41	Pengurus Mesjid Al-Anshar	Jl. Mekarsari II RT.07/03 Desa Bingkulu Kec.Tambang Ulang	Rp. 250,000,000
42	Pengurus Masjid Al-Falah	Desa Sungai Jelai RT.010/001 Kec.Tambang Ulang	Rp. 75,000,000
43	Pengurus Masjid Nurul Hikmah	Desa Sungai Jelai RT.006 RW.002 Kec.Tambang Ulang	Rp. 25,000,000
44	Pengurus Langgar Mafaatihul Huda	Dusun Plasma Desa Pulau Sari RT.07 RW.03 Kec.Tambang Ulang	Rp. 40,000,000
45	Pengurus Musholla Baiturohman	Desa Martadah Baru RT.09 RW.03 Kec.Tambang Ulang	Rp. 50,000,000
46	Pengurus Langgar Nurul Hasanah	Jl.Setuju RT.08 RW.03 Desa Gunung Raja Kec.Tambang Ulang	Rp. 20,000,000
47	Pengurus Masjid Darussalam	Desa Martadah Baru RT.03 RW.01 Kec.Tambang Ulang	Rp. 35,000,000
48	Pengurus Rukun Kematian Al Mujahidin	Desa Martadah Baru RT.07 RW.02 Kec.Tambang Ulang	Rp. 15,000,000
49	Pengurus Majelis Asmaul Husna Wa Dzikir Addhiya'ul Musthofawiy	Jl.Suka Makmur RT.04 RW.01 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur	Rp. 250,000,000
50	Pengurus Mesjid Attaqwa	Jl.Pembangunan RT.7 RW.3 Desa Sungai Rasau Kec.Bumi Makmur	Rp. 50,000,000
51	Pengurus Masjid Nurul Rahmah	Desa Handil Labuan Amas RT.07 RW.03 Kec. Bumi Makmur	Rp. 50,000,000
52	Pengurus Majelis Ta'lim Ar Rahim	Desa Handil Babirik RT.03 RW.02 Kec.Bumi Makmur	Rp. 25,000,000
53	Pengurus Langgar Sirajul Huda	Jl. Limo I RT.01 RW.01 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur	Rp. 20,000,000
54	Pengurus Langgar Raudhatul	Jl. Saripul RT.07 RW.02 Desa Kurau Utara	Rp. 20,000,000



NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Jannah	Kec.Bumi Makmur	
55	Pengurus Langgar Darul Huda	Jl. Bahagia RT.11 RW.04 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur	Rp. 20,000,000
56	Pengurus Langgar Nurul Anwar	Jl. Limo II RT.04 RW.02 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur	Rp. 20,000,000
57	Pengurus Langgar Darul Faizin	Jl. Suka Damai RT.04 RW.02 Desa Handil Suruk Kec.Bumi Makmur	Rp. 20,000,000
58	Pengurus Langgar Almukarromah	Jl. Desa Pantai Harapan RT.06 RW.01 Kec. Bumi Makmur	Rp. 20,000,000
59	Pengurus Langgar Nurul Huda	Jl. Desa Pantai Harapan RT.01 RW.01 Kec.Bumi Makmur	Rp. 20,000,000
60	Pengurus Musholla Jamiatusshollah	Jl. Pembangunan RT.01 RW.01 Desa Sungai Rasau Kec.Bumi Makmur	Rp. 20,000,000
61	Pengurus Langgar Baiturrahim	Jl. Desa Handil Babirik RT.05 RW.03 Kec.Bumi Makmur	Rp. 20,000,000
62	Pengurus Rukun Kematian Desa Handil Babirik	Desa Handil Babirik RT.02 RW.01 Kec.Bumi Makmur	Rp. 20,000,000
63	Pengurus Kelompok Maulid Habsyi Ar-Raudah	Jl. Suka Damai RT.04 RW.02 Desa Handil Suruk Kec.Bumi Makmur	Rp. 15,000,000
64	Pengurus Kelompok Maulid Al- Habsyi Al-Jannah	Desa Handil Birayang Bawah RT.004 RW.002 Kec.Bumi Makmur	Rp. 15,000,000
65	Pengurus Masjid Baitul Muslimin	Desa Tebing Siring 3 RT.016 Dusun IV Kec.Bajuin	Rp. 75,000,000
66	Pengurus Masjid Al Ikhlas	Jl. Tanjung 3A RT.09 Desa Tanjung Kec.Bajuin	Rp. 50,000,000
67	Pengurus Masjid Nurul Iman	Jl. Tanjung Raya RT.05 Dusun II Desa Tanjung Kec.Bajuin	Rp. 50,000,000
68	Lembaga Ta'mir Masjid Jami Miftahul Jannah	Jl. Soepirman RT.03 RW.02 Desa Kunyit Kec.Bajuin	Rp. 25,000,000
69	Pengurus Rukun Kematian Melati Putih	Jl. Soepirman RT.03 Desa Kunyit Kec.Bajuin	Rp. 15,000,000
70	Pengurus Langgar Baiturrahim	Jl.Mandila RT.06 RW.02 Desa Galam Kec.Bajuin	Rp. 15,000,000
71	Pengurus Perkumpulan Maulid Al-Habsyi Al-Ikhlas	Desa Tanjung RT. 08 Dusun III Kec.Bajuin	Rp. 15,000,000
72	Pengurus Group Maulid Habsyi Annisa	Jl. Tanjung Pasar RT.06 Desa Tanjung Kec.Bajuin	Rp. 25,000,000
73	Pengurus Group Habsyi Ar- Raudhah	Desa Tanjung Kampung RT.02 Dusun I Kec.Bajuin	Rp. 25,000,000
74	Pengurus Group Habsyi An-Nur	Desa Tanjung Kampung RT.02 Dusun I Kec.Bajuin	Rp. 25,000,000
75	Pengurus Group Habsyi Farasyatul Jannah	Desa Tanjung 4 A RT.22 Dusun IV Kec.Bajuin	Rp. 15,000,000



NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
76	Pengurus Group Maulid Habsyi Ahabul Habibah	Desa Tanjung RT.18 Dusun V Kec.Bajuin	Rp. 15,000,000
77	Pengurus Masjid Al-Mubarakah	Jl. H. Imam Bonjol RT.04 Dusun Sumber Arum Desa Durian Bungkok Kec.Batu Ampar	Rp. 25,000,000
78	Pengurus Langgar Al-Falah	Desa Batu Ampar RT. 08 RW. 03 Kec.Batu Ampar	Rp. 75,000,000
79	Pengurus Langgar Miftahul Jannah	Jl. H. M. Sarbini RT.010 Dusun Sidomulyo Desa Durian Bungkok Kec.Batu Ampar	Rp. 60,000,000
80	Pengurus Langgar Al Ukhuwah	Desa Durian Bungkok RT.014 Kec.Batu Ampar	Rp. 60,000,000
81	Pengurus Langgar Al-Muttaqin	Desa Batu Ampar RT.04 Kec.Batu Ampar	Rp. 60,000,000
82	Pengurus Perkumpulan Maulid Al-Habsyi Al-Hikmah	Desa Batu Ampar RT.08 RW.03 Kec.Batu Ampar	Rp. 15,000,000
83	Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Miftahussalam Asam-Asam	Jl. A. Yani KM 113 RT.015 RW.004 Desa Asam-Asam Kec.Jorong	Rp. 200,000,000
84	Yayasan Babussalam Asam-Asam	Jl. A. Yani KM 113 RT. 015/004 Desa Asam-Asam Kec.Jorong	Rp. 200,000,000
85	Pengurus Masjid Nurul Huda	Jl.Des. Muara Asam-Asam RT.05 RW.02 Kec.Jorong	Rp. 400,000,000
86	Pengurus Maulid Al-Habsyi Isyfa'Lana	Dusun Sidomukti RT.17 Desa Sabuhur Kec.Jorong	Rp. 25,000,000
87	Yayasan Madrasah Diniyah Takmiliah Darus Salim	Jl. Raya Takisung RT.002 RW.002 Desa Benua Lawas Kec.Takisung	Rp. 75,000,000
88	Yayasan Al-Muttaqin Kuala Tambangan	Jl. Batu Lima RT 12 RW 02 Desa Kuala Tambangan Kec.Takisung	Rp. 100,000,000
89	Pengurus Masjid Al-Jihad	Jl. Jenderal Sudirman RT.02 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 25,000,000
90	Pengurus Langgar Da'watul Khair	Jl. Teratai RT.01 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 20,000,000
91	Pengurus Masjid Nurul Iman	Jl. Sungai Kembang RT 19 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 25,000,000
92	Pengurus Langgar Baital Abror	Jl. Jenderal Sudirman RT.03 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 20,000,000
93	Perkumpulan Rukun Kematian Nur Jannah	Jl. Sungai Kembang RT 19 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 15,000,000
94	Pengurus Rukun Kematian Miftahurrohim	Jl. Nusa Indah RT.11 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 15,000,000
95	Pengurus Langgar Miftahul Janah	Jl. Lambung Mangkurat RT.16 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 20,000,000
96	Kelompok Habsyi Al-Jihad	Jl. Jenderal Sudirman RT.02 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 15,000,000
97	Pengurus Group Maulid Habsyi	Jl. Sungai Kembang RT.17 Desa Gunung	Rp. 15,000,000



NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Nurul Ilmi	Makmur Kec.Takisung	
98	Pengurus Group Habsyi Nurul Islam	Jl. Pandan Wangi RT.10 Dusun III Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 15,000,000
99	Pengurus Group Habsyi Nurul Iman	Jl. Sungai Kembang RT.18 Dusun V Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp. 15,000,000
100	Perkumpulan Maulid Syubbanul Muttaqin	Jl. Wisata Batu Lima Desa Kuala Tambangan RT.04 RW.02 Kec.Takisung	Rp. 15,000,000
101	Pengurus Masjid Jami' Al-Istiqamah	Jl. A. Yani KM.138 RT 001/001 Desa Pasir Putih Kec.Kintap	Rp. 75,000,000
102	Pengurus Langgar Darul Amilin	Jl.Doho RT 04 Dusun 01 Desa Sumber Jaya Kec.Kintap	Rp. 60,000,000
103	Pengurus Masjid Nurul Huda	Jl.Cek Dam RT.08 RW.02 Desa Pandan Sari Kec.Kintap	Rp. 50,000,000
104	Masjid Jamiatul Muslimin	Jl. Mawar RT 006 Dusun 002 Desa Bukit Mulia Kec.Kintap	Rp. 75,000,000
105	Pengurus Masjid Al-Barokah	Jl.Pantai Love Sari RT.08 RW.03 Desa Mekar Sari Kec.Kintap	Rp. 50,000,000
106	Yayasan Pendidikan Islam Ath Thohiriyah Batakan	Jl. H. Hasan Baseri No.10 RT.09/III Desa Batakan Kec.Panyipatan	Rp. 75,000,000
107	Pengurus Masjid Al-Muhajirin	Dusun Sundawa RT.006 RW.005 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan	Rp. 50,000,000
108	Pengurus Masjid Al-Muhajirin	UPT Tanjung Dewa RT 07 Dusun 3 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan	Rp. 50,000,000
109	Pengurus Masjid Jami Nurul Kautsar	Jl.A Yani RT.002 RW.1 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan	Rp. 50,000,000
110	Pengurus Mushalla Darussa'adah Wasallamah	Balicak Subur RT.08 RW.03 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan	Rp. 20,000,000
111	Badan Pengelola Langgar Hidayatul Ikhwan	Desa Batu Tungku RT.05 Dusun 2 Kec.Panyipatan	Rp. 20,000,000
112	Langgar Da'watul Khoirat	Desa Batu Tungku RT.04 Dusun 2 Kec.Panyipatan	Rp. 20,000,000
113	Group Maulid Habsyi Hubbul Musthofa	Jl.Pelabuhan RT.008 RW.003 Desa Tanjung Dewa Kec.Panyipatan	Rp. 15,000,000
114	Group Maulid Habsyi Raudhatul Anwar	Jl. Pelabuhan RT.006 / 002 Desa Tanjung Dewa Kec.Panyipatan	Rp. 15,000,000
115	Group Maulid Habsyi Syafa'atul Ikhwan	Jl. Pelabuhan RT.006 / 002 Desa Tanjung Dewa Kec.Panyipatan	Rp. 15,000,000
Jumlah			Rp6,935,000,000

FOTO KEGIATAN

PELAKSANAAN 2 KEGIATAN :

1. Sosialisasi Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Hibah



2. Kegiatan UKS



PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH :

1. Penandatanganan NPHD dan SPJ Pencairan Dana Hibah



2. Monitoring dan Evaluasi



SASARAN 2 Meningkatnya Layanan Bantuan Sosial Keagamaan

Indikator : Persentase layanan bantuan sosial keagamaan

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	98.04%	98.04%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat semakin banyak tahun demi tahun, ini dilihat dari banyaknya bangunan sekolah-sekolah keagamaan dan juga tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, dan Pondok Pesantren. Jumlah tenaga pengajar se Kabupaten yang diberikan insentif dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 berjumlah 3.290 orang. Dari total keseluruhan tenaga pengajar yang berjumlah 3.290 orang, ada insentif yang dikembalikan ke kas Daerah sebanyak 45 orang disebabkan berhenti, meninggal dunia dan mengundurkan diri karena lulus sebagai tenaga P3K di Kab. Tanah Laut.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, tetapi ada ditemukan beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah serta supervisor dan Koordinator Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.
- Dewan Pengurus Kabupaten BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus menginformasikan kepada kepala sekolah, Koordinator Kecamatan untuk mendata ulang TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang benar benar bersedia menjadi Tenaga Pengajar di lingkungan Pemerintah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Supervisor serta Koordibnator BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus aktif melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH.

- Meningkatkan koordinasi antara DPK dan DPD BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH agar setiap permasalahan yang dihadapi dilapangan dapat diselesaikan dengan cepat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH se Kabupaten Tanah Laut.
- Seluruh Kepala Sekolah maupun tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan menyusun target yang ingin dicapai pada setiap tingkatan pembelajaran baik di TKA/TPA, Madin, dan Ponpes agar kualitas hasil yang diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai.
- Setiap penandatanganan insentif tenaga pengajar dan penyuluh agama dihadiri oleh Pengurus BKPRMI dan Madin kecamatan dan Kabupaten serta bagian kesejahteraan rakyat pada saat rapat rutin dan melampirkan photo penandatanganan persekolahan.
- Bagi Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama penandatangerannya dimasing masing pondok dan Kantor KUA kecamatan masing-masing yang dilampiri dengan photo seluruh tenaga pengajar pondok dan penyuluh agama masing masing.

FOTO KEGIATAN

PELAKSANAAN 4 KEGIATAN :

1. *Pelatihan Mandi Jenazah Bagi Penyuluh Agama Kab. Tanah Laut*



2. *Studi Banding bagi Koordinator Penyuluh Agama ke Yogyakarta*



3. Batamat dan Wisuda Santri TKA/TPA





4. *Kegiatan Studi Tiru Penyuluh Agama Hindu ke Bali.*



PEMBAYARAN INSENTIF

1. *Penandatanganan SPJ Pembayaran Insentif*





Daftar Tenaga Pengajar TPA, Madin, Ponpes,
Penyuluh Agama Islam, Penyuluh Agama Hindu dan Penyuluh Agama Kristen
Lingkup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH GURU MADIN	JUMLAH GURU PONPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRISTEN
1	Pelaihari	436	36	227	49	4	7
2	Bajuin	122	-	-	16	-	3
3	Panyipatan	111	65	34	20	-	3
4	Takisung	160	41	13	18	-	-
5	Batu Ampar	206	7	27	18	4	5
6	Jorong	151	59	73	12	-	-
7	Kintap	210	60	72	20	4	-
8	Tambang Ulang	118	24	27	15	-	-
9	Kurau	102	19	12	10	-	-
10	Bumi Makmur	114	57	-	10	-	-
11	Bati Bati	168	98	201	22	-	-
JUMLAH		1898	466	686	210	12	18

**SASARAN 3 Meningkatnya Peran Serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan/SKPD
Dalam Bidang Pemuda dan Olahraga**

**Indikator : Persentase Hasil Tindak Lanjut Koordinasi Kegiatan Bidang
Keagamaan, Pemuda dan Olahraga**

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	89.65%	89.65%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan organisasi/lembaga keagamaan dan SKPD terkait pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat dari realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2022 yang meningkat dari Tahun 2021, tetapi memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Kegiatan yang bersifat even tahunan tidak dapat terjadwal sesuai rencana awal sehingga ada kegiatan yang tidak dapat terfasilitasi dengan maksimal karena jadwal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Meningkatkan koordinasi yang baik dengan organisasi/lembaga keagamaan maupun dengan instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

Meningkatkan dan menjalin koordinasi dengan semua pihak terkait serta menyusun rencana kegiatan dengan baik.

FOTO KEGIATAN

PELAKSANAAN 11 KEGIATAN KEAGAMAAN :

1. *Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 H.*



2. *Safari Ramadhan Bupati dan Wabub Tanah Laut.*









3. Shalat idul Fitri dan Idul Adha berjamaah bersama Bupati dan Wakil Bupati serta Halal Bihalal.



4. Tausiyah lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut.



5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Kab. Tanah Laut Tahun 2022.





6. Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Bidang Agama.



7. Musabaqah Qira'atil Kutub Tk. Kab. Tanah Laut.



8. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H.



9. Shalat Hajat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.



10. Shalat Hajat Hari Jadi Kab. Tanah Laut Tahun 2022.



11. Gema Al Qur'an Tanah Laut Tahun 2022.



PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA/ORGANISASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN TANAH LAUT YAITU TKA/TPA, MADIN/MIS, PONDOK PESANTREN DAN PENYULUH AGAMA.



FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA/ORGANISASI KEAGAMAAN :

1. Fasilitasi kegiatan LPTQ Kabupaten Tanah Laut berupa Pelantikan dan Orientasi Dewan Hakim MTQ Tk. Kab. Tanah Laut dan Fasilitasi pada MTQ Tk. Nasional dimana Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah.





2. Fasilitas kegiatan FKDT Kabupaten Tanah Laut pada PORSADIN Tk. Provinsi Kalimantan Selatan dan Tk. Nasional.



3. Fasilitas kegiatan FKPP Kabupaten Tanah Laut berupa Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Tanah Laut.



4. Fasilitas kegiatan BHR Kabupaten Tanah Laut berupa kegiatan Ru'yatul Hilal 1 Syawal 1443 H dan Pengukuran arah Kiblat tempat Ibadah (Masjid/Langgar/Mushala) di Kab. Tanah Laut.



❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

- 1) Untuk mencapai sasaran meningkatnya pembinaan lembaga sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator persentase peningkatan lembaga sosial dan keagamaan yang dibina, dengan pagu Rp. 7.042.116.816,- terealisasi Rp. 7.016.683.200,- atau 99,64% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM yaitu Sub Koord. Bina Mental dan Spiritual, Pengadministrasian umum, dan 2 (dua) orang tenaga PTT.
- 2) Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan bantuan sosial keagamaan yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator presentase layanan bantuan sosial keagamaan pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan pagu Rp. 20.437.890.843,- terealisasi Rp. 20.036.513.850,- atau 98,04% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM yaitu Sub Koord. Kesejahteraan Sosial, Pengelola bantuan sosial keagamaan, dan 2 orang tenaga PTT.
- 3) Untuk mencapai sasaran meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam bidang pemuda dan olah raga yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olah raga, dengan pagu Rp. 3.298.391.580,- terealisasi Rp 2.957.048.442,- atau 89,65% dan dilaksanakan oleh 6 (Enam) orang SDM yaitu Kepala Bagian, Sub Koord. Kesejahteraan Masyarakat, Pengelola data Kesejahteraan Masyarakat, Pengadministrasi umum, dan 3 (tiga) orang tenaga PTT.



Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHRTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.042.116.816	7.016.683.200	99,64%	4	
2	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan		- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	20.439.843.565	20.036.513.850	98,04%	4	
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga		- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.298.391.580	2.957.048.442	89,65%	6	

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100 %	100 %	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu Misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"
2	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	75%	100%	
3	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	75%	100%	
4	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	80%	80%	100%	

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA dari target indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut :
 - Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan dan perumusan kebijakan dalam rangka evaluasi penyaluran Kredit **Program Gapura Karomah** capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Kegiatan Fasilitasi Pembinaan BUMD dan penyusunan kajian analisa investasi kepada BUMD PD. Baratala Tuntung Pandang dan PT. BPR Tanah Laut capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Fasilitasi tindak lanjut penyelesaian dan pembahasan Raperda Investasi Pemerintah Daerah capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Fasilitasi kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan kegiatan pendukungnya capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Persentase fasilitasi kegiatan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Permodalan dari Pemerintah Pusat capaian kinerjanya adalah 100%.

- 2) BUMD yang berkinerja positif sebanyak 3 buah atau secara persentase 75% dari target 75% atau capainya adalah 100%.
- 3) Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan progress pembangunan fisik adalah 80% dari target 80% atau capainya adalah 100%.
- 4) Persentase penerapan kebijakan dalam rangka peningkatan penyaluran permodalan kepada Pelaku UMKM melalui program Gapura Karomah, KUR dan UMi mencapai hasil 100%, sehingga 75% dari jumlah UMKM yang mengajukan fasilitas permodalan telah terpenuhi atau mencapai target 100%.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam terhadap Capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase BUMD yang berkinerja positif	%	50%	75%	75%	75%	100%
3	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	%	-	75%	75%	75%	100%
4	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	%	-	75%	80%	80%	100%
	Rata – Rata Capaian						100%

❖ Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Realisasi capaian kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA pada Tahun 2022 dengan capaian **100%** berbanding dengan capaian kinerja Tahun 2021 pada masing-masing Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- a) Persentase Fasilitas penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan adalah 100% sama dengan capaian kinerja program Tahun 2021 yaitu 100%.
- b) Persentase BUMD yang berkinerja positif capaiannya adalah 75% sama dengan capaian kinerja program Tahun 2021 yaitu 75%

- c) Persentase kebijakan fasilitasi Program permodalan untuk UMKM melalui program Gapura Karomah, KUR dan UMi capaian kinerjanya adalah 75% capaian kinerja program Tahun 2021 yaitu 75%
- d) Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan progress pembangunan fisik adalah 80% lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 75%

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**



NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase Permasalahan yang berhasil ditindaklanjuti di bidang pengembangan Potensi Perekonomian	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian Pembangunan
		Fasilitasi pembinaan dan monev BUMD Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian Pembangunan
	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian Pembangunan
	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	-	-	-	75%	50%	66,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian Pembangunan
	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan	-	-	-	75%	50%	66,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian Pembangunan

	kewenangan																	
	Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi	-	-	-	50%	50%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian Pembangunan
	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Bagian Perekonomian , Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	-	-	-	-	-	-	75%	75%	100%	75%	75%	100%	100%	-	-	Bagian Perekonomian , Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	-	-	-	-	-	-	75%	75%	100%	75%	75%	100%	100%	-	-	Bagian Perekonomian , Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	-	-	-	-	-	-	80%	80%	100%	80%	80%	100%	85%	-	-	Bagian Perekonomian , Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Indikator : Persentase Penyelesaian Permasalahan Terkait Perekonomian dan Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100 %	100 %	100 %	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan merupakan akumulasi dari kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang melahirkan beberapa kebijakan dibidang perekonomian guna menyelesaikan permasalahan dibidang perekonomian dan administrasi pembangunan. Selain fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian dan administrasi pembangunan, juga kegiatan fasilitasi lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai tupoksi .

Capaian indikator kinerja utama Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Tahun 2022 yaitu Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah sebesar 100% sama dengan capaian kinerja program Tahun 2021 yaitu 100%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Beberapa rumusan kebijakan telah disusun dan direkomendasikan untuk dilaksanakan guna menunjang peningkatan perekonomian daerah namun dalam perjalanannya ada permasalahan - permasalahan yang muncul menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sempurna.
- Koordinasi dengan SKPD teknis terkait penerapan kebijakan masih kurang optimal.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Dalam penerapan rekomendasi kebijakan dilakukan evaluasi setiap periode dan pada saat timbulnya masalah akibat penerapan kebijakan tersebut.
- Melakukan monitoring penerapan kebijakan bidang perekonomian
- Koordinasi dengan SKPD Teknis terkait pelaksanaan kebijakan lebih dimaksimalkan terutama dalam hal pemenuhan data dan pelaporan

Rencana aksi yang diperlukan

- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
- Identifikasi permasalahan yang telah muncul dan kemungkinan yang akan muncul
- Melakukan pengumpulan data dan analisa terhadap hasil dari pelaksanaan kebijakan serta terhadap permasalahan yang muncul.



FGD Terkait Program Gapura Karomah



Rapat Koordinasi terkait Penyertaan Modal Pemerintah

SASARAN 2 Meningkatnya BUMD yang Sehat dan Berdaya saing

Indikator : Persentase BUMD yang Berkinerja Positif

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	75%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu misi ke-5 “Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam berikutnya yaitu Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing pada Tahun 2022 sebesar 75% sama dengan capaian Tahun 2021 yaitu 75%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Masih belum selesainya pembahasan Raperda penyertaan modal untuk BUMD pada tingkat Legislatif yaitu Penyertaan Modal kepada BUMD PT. BPR Tanah Laut dan Penyertaan Modal kepada BUMD PDAM Tanah Laut.
- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen BUMD belum dilaksanakan secara maksimal oleh BUMD.
- Hasil kajian analisis investasi penyertaan modal Pemerintah kepada BUMD perlu dilakukan update data karena tahun penyusunan yang sudah lama.
- Masih tingginya NPL pada PT. BPR Tanah Laut yang disebabkan oleh Debitur Program Gapura Karomah yang macet.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Secara aktif melakukan koordinasi dengan pihak Legislatif serta melaksanakan FGD investasi daerah untuk mendapatkan masukan dari semua pihak sebagai sarana untuk meyakinkan pihak legislatif
- Melakukan monitoring dan evaluasi dalam penerapan kebijakan terhadap BUMD
- Melakukan koordinasi dengan pihak penyusun kajian analisa agar dapat dilakukan update kajian agar sesuai dengan kondisi real BUMD
- Memfasilitasi rapat antara PT. BPR Tala dengan SKPD pembina pelaku usaha mikro untuk tindak lanjut penanganan debitur program Gapura Karomah yang macet

Rencana aksi yang diperlukan

- Membuka komunikasi yang intens dengan anggota ponstel yang mengurus investasi daerah
- Menyusun jadwal rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi untuk membahas kinerja BUMD serta progress pemasangan RT, 009
- Rapat koordinasi setiap akhir triwulan



Rapat Koordinasi Terkait Permasalahan PD. Baratala TP

SASARAN 3 Meningkatnya Pelaku UMKM yang Terfasilitasi Permodalan

Indikator : Persentase UMKM yang Terfasilitasi Permodalan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	75%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu Misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" "Masyarakat"

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan SDA yang berikutnya yaitu Meningkatnya Pelaku UMKM yang Terfasilitasi Permodalan pada Tahun 2022 sebesar 75%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Dana investasi untuk Tahun 2022 terlambat di cairkan kepada PT. BPR Tanah Laut, sehingga terlambat juga untuk disalurkan kepada calon debitur Gapura Karomah;

- Daftar pemohon program Gapura Karomah baik yang berasal dari tahun sebelumnya dan yang baru mendaftar pada Tahun 2022 sangat banyak sehingga dana investasi yang dianggarkan diperkirakan tidak cukup untuk memenuhi permintaan tersebut.
- Banyak para debitur yang telah jatuh tempo namun belum mengembalikan pinjaman mengakibatkan adanya NPL yang membebani PT. BPR Tala selaku bank penyalur.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan koordinasi dengan BPKAD dan Bagian Hukum agar dapat mempercepat proses pencairan dana investasi agar dapat segera disalurkan oleh PT. BPR Tanah Laut
- Mengajukan telahaan staf kepada pimpinan agar dilakukan penambahan anggaran investasi daerah untuk disalurkan kepada calon debitur pada anggaran perubahan Tahun 2022
- Melakukan koordinasi secara intens dengan SKPD untuk penambahan calon debitur yang akan di fasilitasi permodalan program Gapura Karomah pada anggaran perubahan agar tidak banyak lagi pelaku usaha mikro yang masuk daftar tunggu/*waiting list*.
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan tim teknis SKPD untuk mencari solusi dan melakukan tindakan teknis untuk menurunkan jumlah debitur macet

Rencana aksi yang diperlukan

- Menyusun time schedule untuk monitoring proses pencairan dana investasi sampai kepada waktu peyaluran dana investasi kepada pelaku usaha mikro
- Melaksanakan rakor tim investasi daerah untuk mengumpulkan data dan analisa untuk pengajuan tambahan dana investasi pada tahun perubahan anggaran Tahun 2022.
- Menyusun jadwal untuk tim teknis pendamping pelaku usaha mikro debitur program Gapura Karomah untuk melakukan kunjungan kerumah debitur yang menunggak pembayaran.



Rapat Koordinasi dengan SKPD Pembina UMKM

SASARAN 4 Meningkatnya Kualitas Manajemen Data Administrasi Pembangunan yang Proporsional

Indikator : Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Progres Pembangunan Fisik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	80%	80%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu Misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" "Masyarakat"

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan yang terakhir yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen Data Administrasi Pembangunan yang Proporsional pada Tahun 2022 sebesar 80% sama dengan capaian Tahun 2021 yaitu 80%, namun

ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Keterlambatan penyampaian laporan oleh SKPD;
- Data pelaporan yang diserahkan masih gabungan antara kegiatan pembangunan fisik dengan kegiatan pembangunan berupa renovasi.
- Data anggaran pembangunan fisik melalui program DAK yang dilaporkan oleh SKPD tidak sama antara nilai yang ada di Biro Adbang Provinsi dengan yang dilaporkan kepada Adm Pembangunan di Kabupaten.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi kepada SKPD tentang waktu pelaporan terkait administrasi pembangunan yang dilaksanakan SKPD
- Melakukan pemilahan data pelaporan yang diampaiakan oleh SKPD
- Melakukan koordinasi untuk mendapatkan data DAK yang sinkron dengan data DAK yang ada di Biro Adbang Provinsi Kalsel

Rencana aksi yang diperlukan

- Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala
- Koordinasi dan konsultasi tentang progres pembangunan fisik melalui dana DAK dengan Biro Adbang Provinsi Kalsel.



Rapat koordinasi Adm Pembangunan

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan di tunjang dengan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan pagu Rp 609.115.558,- terealisasi Rp 554.002.900,- dengan realisasi keuangan sebesar 90,95% dan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang Sumber Daya Manusia.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Perekonomian dan Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
			- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	204.436.326	202.957.000	99,28%	3 Orang	2 PNS dan 1 PTT
2	Persentase BUMD yang berkinerja positif		- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	241.839.150	199.106.900	82,33%	3 Orang	1 PNS dan 2 PTT
3	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan		- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-				
4	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					



NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	%	SDM	Ket
			- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	162.840.082	151.939.000	93,31%	3 Orang	2 PNS dan 1 PTT

4. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
1	2	3	4	5	6
Eselon II					
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	87,12	92.98	114%
Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	6	10	1000%
Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,125	Masih dalam tahap evaluasi	Nilai Belum Terbit	Nilai Belum Terbit
Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	90	70%	100	111,11%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	65%	100	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	86.81	84.2	101.4%
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	91	91,71	92.59	101.7%
	Nilai ZI Sekretariat Daerah	84	87,45	87.74	104.4%
Meningkatnya kebijakan perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022



SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
1	2	3	4	5	6
Eselon III					
Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	80%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	76,5%	76%	76%
	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	-	-
Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	95%	95%
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	416%	416%	416%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	90%	65%	97,5%	108,33%
Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	40%	70%	100%	250%
Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	92,5%	100%	100%
	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	95%	95%
Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	90%	90%
Meningkatnya layanan administrasibidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	Masih Proses Penilaian	84.2	101.4%
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP
Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	-	100%	100%
Meningkatnya pengelolaan Barang/Asset Lingkup	Persentase layanan pada bagian-bagian lingkup Setda	100%	100%	100%	100%



SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
1	2	3	4	5	6
Sekretariat Daerah Secara Tertib	sarana prasarana/asset milik Setda terkelola dengan baik				
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelayanan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	91	91,71	92.59	101.7%
	Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	84	87,45	87.74	104.4%
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standard an tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui system LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui system LPSE	85%	57.5%	100%	133%
Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Efisiensi pagu Pengadaan Barang jasa	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	100%	75%	100%	400%
Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk yang harmonis	100%	100%	100%	100%
Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%
Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM	75	-	Nilai 78,4	104,5%
Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	100%
	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	0%	0%
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	0%
Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase Peningkatan Lembaga social dan keagamaan yang dibina	100%	96,43%	99.64%	99.64%



SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya layanan bantuan social keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	98,81%	98.04%	98.04%
Meningkatnya peran serta Organisasi/lembaga keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	72,23%	89.65%	89.65%
Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100 %	100%
Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	75%	75%	100%
Meningkatnya pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	100%	75%	100%
Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	80%	100%	80%	100%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Laporan pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam hal pencapaian kinerja untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

CAPAIAN IKU ESELON II

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	Capaian 2022 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)	Keterangan
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,12	81,5	87.74	88.26	92.80	92.98	114%	82	139%	Umum	
2	Inovasi Publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	6	1	-	10	-	-	1000%	1	100%	Organisasi	
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	Masih dalam tahap evaluasi	ST 3,125	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	-	-	Pemerintahan	
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minima B	70%	90	-	72.5	100%	-	100%	100%	100%	Organisasi	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	65%	100	-	-	90%	10%	100%	100%	100%	Organisasi	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	86.81	83	-	-	84.2	-	101.4%	85	119%	Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam tahap evaluasi
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Masih dalam tahap Baseline SPIP	3,6	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP	-	-	Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam tahap Baseline SPIP
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	91,71	91	-	-	92.59	-	101.7%	92	110%	Umum	
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	87,45	84	-	-	87.74	-	104.4%	85	122.8%	Umum	

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	Capaian 2022 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)	Keterangan
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan	100%	100%	15%	15%	67%	100%	100%	100%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021*

CAPAIAN IKU ESELON III

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	CAPAIAN					Target Akhir Renstra	Capaian 2022 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab	Hasil Evaluasi
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik	80	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Umum	
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Aset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian lingkup Setda terkelola dengan baik	100%	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Umum	
3	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemantau dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelayanan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	-	50%	75%	50%	100%	100%	100%	Umum	
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	91.71	91	-	-	92.59	-	101.7%	92	110%	Umum	

		Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	105.4%	84	-	-	87.74	-	104.4%	85	122%	Umum	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	76,5%	100%	11%	35%	24%	-	76%	100%	76%	Pemerintahan	
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	100%	90%	-	-	50%	67.63%	100%	100%	100%	Pemerintahan	
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	40%		100%	100%	91.15%	-	100%	100%	Pemerintahan	
7	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%		0%	97.68%	95%	100%	95%	Pemerintahan	
8	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	416%	100%	83.33%	16.60	57%	85.04%	416%	100%	416%	Pemerintahan	
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	90%		0	80%	17.5%	108,33%	100%	108.33%	Organisasi	
10	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB Minimal 60	70%	40%		0	100%	-	250%	50%	500%	Organisasi	
11	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	92,5%	100%		0	100%	-	100%	100%	100%	Organisasi	
		Persentase SKPD yang memiliki	100%	100%	100%	0	100%	-	95%	100%	95%	Organisasi	



		Standar Operasional Prosedur (SOP)											
12	Meningkatnya efektivitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	3,6		0	0	90%	90%	100%	90%	Organisasi	
13	Meningkatnya layanan administrasibidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	100%	100%	29%	14%	75%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan dan Keuangan	
14	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	25%	0	0	100%	100%	100%	100%	Perencanaan dan Keuangan	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	100%	83	0	0	84.2	0	101.44%	85	119%	Perencanaan dan Keuangan	Masih Proses Penilaian
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	0	3,6	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih dalam tahap Baseline SPIP	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	3.7	-	Perencanaan dan Keuangan	Masih dalam tahap Baseline SPIP
16	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	-	100%	100%	100%	74%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan dan Keuangan	
17	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	30%	70%	110	110.0%	100%	100%	100%	Pengadaan Barang/Jasa	
18	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan	57.5%	85%	21.3%	25%	87.50%	100.0%	133%	100%	133%	Pengadaan Barang/Jasa	

	barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE											
19	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	25%	35.7%	92.00%	100.0%	100%	100%	100%	Pengadaan Barang/Jasa	
20	Meningkatnya Efisiensi pagu Pengadaan Barang jasa	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	75%	5%	25%	4.22%	179%	179.00%	400%	100%	400%	Pengadaan Barang/Jasa	
21	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum	
22	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum	
23	Tingkat penanganan kasus/perkara hokum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum	
24	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM	0	75	-	-	-	-	104,5%	Nilai 76	137%	Hukum	
25	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotolan dan dokumentasi	Persentase penyebaran informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	20.6%	30%	49,4%	100.0%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	18%	35%	47%	100%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	18%	50%	32%	100%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	

		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	26.2%	45%	28,8%	100%	0%	100%	0%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	0	0	0	0	0	100%	0	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
26	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase Peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	96,40%	100%	25%	27%	99.14%	100%	99.64%	100%	99.64%	Kesejahteraan Rakyat	
27	Meningkatnya layanan bantuan social keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	99,22%	100%	30%	35%	97.39%	100%	98.04%	100%	98.04%	Kesejahteraan Rakyat	
28	Meningkatnya peran serta Organisasi/lembaga keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	16.7%	58%	70.0%	100%	89.65%	100%	89.65%	Kesejahteraan Rakyat	
29	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	25%	42%	65%	100%	100%	100%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
30	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	75%	20%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
31	Meningkatnya pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	75%	20%	40%	60%	75%	100%	100%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
32	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	80%	80%	25%	40%	60%	80%	100%	85%	117%	Perekonomian Administrasi Pembangunan	

	pembangunan yang proporsional											dan Sumber Daya Alam	
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

CAPAIAN IKU ESELON IV

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	Capaian 2022 terhadap target akhir Renstra (%)	Bagian	Hasil Evaluasi
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan dikelola dengan baik	100%	614 Jenis	150 Jenis	300 Jenis	500 Jenis	614 Jenis	100%	614 Jenis	100%	Umum	
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	98.8%	70.822 Ok	17705 OK	17705 Ok	50000 Ok	70822 Ok	100%	70.822 Ok	100%	Umum	
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	90%	100	25%	50%	75%	100%	100%	100	100%	Umum	
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	100%	91 Jenis	25 Jenis	44 Jenis	66 Jenis	91 Jenis	100%	91 Jenis	100%	Umum	

5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang dikelola dan tercatat dengan baik	100%	2.468 Jenis	617 Jenis	1234 Jenis	1851	2000 Jenis	81%	2.468 Jenis	100%	Umum	
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	100%	9 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	100%	Umum	
7	Memberikan pelayanan Surat Menyurat lingkup Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	100%	54	0	0	0	54 SKPD	100%	54	100%	Umum	
8	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	104%	250 Kali	0	10 Kali	10 Kali	260 Kali	104%	250 Kali	100%	Umum	
9	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/ Sekda)	104.4%	250 Kali	0	0%	0%	270 Kali	108%	250 Kali	100%	Umum	
10	Pengelolaan dan penyimpanan arsip lingkup Setda	Jumlah arsip yang dikelola sesuai SOP	100.51%	3.500 Surat	0	0	0	3.407 Surat	97%	3.500 Surat	100%	Umum	
11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	91.26%	126 Dokumen	0	0	0	130 Dokumen	103%	126 Dokumen	100%	Umum	
12	Melaksanakan Zona Integritas di lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	93.75%	96 Dokumen	0	0	0	112 Dokumen	116%	96 Dokumen	100%	Umum	

13	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	165.3%	150 Paket	18 Paket	87 Paket	60 Paket	165 Paket	110%	150 Paket	165 Paket	Pengadaan Barang/Jasa	
14	Memfasilitasi pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	100%	40 SKPD	20 SKPD	20 SKPD	20 SKPD	40 SKPD	100%	40 SKPD	40 SKPD	Pengadaan Barang/Jasa	
15	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	100%	430 Kali	83 Kali	200 Kali	117 Kali	30 Kali	100%	430 Kali	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
16	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	100%	28 Kali	5 Kali	10 Kali	13 Kali	-	100%	28 Kali	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	

6. Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2022

Dalam rangka pemantauan Rencana Aksi yang dilaksanakan untuk mengendalikan kinerja, maka dilakukan perbaikan dan pemantauan atas Rencana Aksi dari Triwulan I s.d Triwulan IV. (Tabel Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2022 terlampir)

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 76.807.742.632**

Tabel Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal dan Realisasi APBD
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	1.630.548.804	1.241.748.772	76%
2	Hukum	1.483.907.058	1.038.558.036	70%
3	Organisasi	357.827.454	272.899.875	76%
4	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	609.115.558	553.292.900	91%
5	Pengadaan Barang dan Jasa	1.027.842.586	902.460.388	88%
6	Kesejahteraan Rakyat	30.780.351.961	30.009.265.192	97%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.056.615.974	986.485.397	93%
8	Umum	17.340.073.924	16.196.351.636	93%
9	Perencanaan dan Keuangan	22.521.459.313	20.487.725.146	91%
	JUMLAH	76.807.742.632	71.688.787.342	93%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

Anggaran Belanja Tahun 2022 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Tupoksi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN	100.000.000,00		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000,00	107.329.0000	107.3%
	Pendapatan Restribusi Daerah	100.000.000,00	107.329.0000	107.3%
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	-	-
2	BELANJA			
	BELANJA OPERASI	75.508.519.798		
	Belanja Pegawai	22.492.070.496	20.463.497.946	90.98%
	Belanja Barang dan Jasa	46.081.449.302	43.056.473.401	93.44%
	Belanja Hibah	6.935.000.000	6.934.019.700	100%
3	BELANJA MODAL	1.299.222.834		
	Belanja Peralatan dan Mesin	648.933.464	601.075.295	92.63%
	Belanja Bangunan dan Gedung	617.909.610	610.971.000	98.88%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	32.379.760	22.750.000	70.26%
	Jumlah Belanja	76.807.742.632	71.688.787.342	93.34%
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(76.707.742.632)	(71.581.458.342)	93.32%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

Untuk Anggaran Pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 dari target **Rp 100.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp 107.329.000,00**.

2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Untuk anggaran belanja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 78.265.490.458,00,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 68.772.133.014,00,- (87.87%)**, sedangkan untuk anggaran belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 76.807.742.632,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 71.688.787.342,- (93.32%)**, terjadi kenaikan capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar **5.45%**. Perbandingan anggaran dan realisasi tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan Tahun 2021	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bagian Pemerintahan						
	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	2.436.321.322	1.137.238.122	49.72	75%
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	2.038.691.846	712.494.262	44.85	68%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	260.090.606	264.455.080	80.95	91%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	137.538.870	160.288.780	62.73	98%
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	129.908.036	104.510.650	72.42	85%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	129.908.036	104.510.650	72.42	85%
Bagian Organisasi						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Penataan Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Penataan Organisasi	766.844.524	272.899.875	66.35	76%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	276.217.276	78.260.873	58.85	67%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	209.100.976	97.524.800	72.63	83%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	281.526.272	97.114.202	69.04	79%
		-	-		-	
		-	-		-	



		-	-		-	
Bagian Hukum						
	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1.525.510.792	1.038.558.036	70.77	70%
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	711.572.352	688.762.976	72.60	73%
	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	412.043.902	135.148.400	63.64	47%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	401.894.538	214.646.660	74.82	84%
Bagian Pengadaan Barang/Jasa						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.247.423.136	902.460.388	64.59	88%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	566.999.472	323.443.651	50.39	90%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	294.327.192	261.865.500	91.82	93%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	386.096.472	317.151.237	64.69	82%
Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	900.193.652	402.063.900	60.33	90%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	466.142.336	199.106.900	54.21	82%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	52.642.270	-----	323.32	
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	381.409.046	202.957.000	71.54	99%



	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	254.464.786	151.229.000	87.60	93%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	254.464.786	151.229.000	87.60	93%
Bagian Kesejahteraan Rakyat						
	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30.491.169.166	30.010.245.492	94.45	97%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	8.384.349.572	7.016.683.200	45.34	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	19.035.999.762	20.036.513.850	98.81	98%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.070.819.832	2.957.048.442	72.23	90%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.025.753.496	986.485.397	91.50	93%
	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	450.951.254	283.644.476	88.49	95%
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	963.305.306	293.624.956	91.40	92%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	611.496.936	409.215.965	93.87	94%
Bagian Umum						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.000.000		35.90	



	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000		12.00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	855.227.638		45.25	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.829.000		88.95	
	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	0	0,00	0%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	627.398.638	3.850.000	32.93	5%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.439.022.670		85.47	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	113.637.480	111.428.500	81.20	94%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.529.050	136.285.050	85.05	86%
	Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor	263.744.700	274.139.580	91.52	82%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	160.050.990	90.657.000	69.87	94%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Penyedia Bahan/Material	2.970.000	18.000.000	53.54	45%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.742.090.450	17.650.000	85.79	24%
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	-	2.914.160.260	-	99%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.745.160.661	75.491.358	85.97	91%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.745.160.661	75.491.358	85.97	91%



	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.864.693.334	5.385.035.933	84.17	92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.199.740	1.403.273.421	91.46	83%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.103.434.464	441.292.000	72.81	83%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.161.059.130	3.540.470.512	84.92	98%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.488.180.117	3.617.023.828	73.79	99%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.960.000	232.944.765	98.08	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.312.013.961	1.801.801.915	90.25	100%
	Sub Kegiatan Pemelihara Mabel	Sub Kegiatan Pemelihara Mabel	21.250.000	17.910.000	0,00	90%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.560.699.792	1.215.970.648	47.72	99%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.256.364	348.396.500	74.73	93%
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	93.300.000	0,00	30%
		Sub Kegiatan Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		93.300.000		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	-	0,00	
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.194.545.000	2.778.330.127	99.16	99%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	684.835.000	828.412.500	98.70	96%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	509.710.000	655.336.000	99.77	100%



		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah		1.294.581.627		99%
Bagian Perencanaan dan Keuangan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.493.962	16.085.900	35.90	79%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.376.882	7.917.500	86.50	79%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.019.360	8.168.400	6.65	79%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.845.790		26.52	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		9.132.950		23.92	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		7.833.280		29.74	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		27.285.700		45.12	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.650.211.990	19.705.155.610	71.89	91%
	Sub Kegiatan Penyedia Gaji ASN	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	8.546.741.272	19.697.014.310	82.58	%
	Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.973.974.984	8.141.300	94.33	90%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		30.736.326		75.35	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		98.759.408		70.80	



	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.366.176	766.483.636	93.87	93%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.366.176	766.483.636	93.87	93%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

3. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA SKPD Tahun Anggaran 2022, dengan total anggaran sebesar Rp 76.807.742.632,- dengan jumlah Program 3 (Tiga) 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan. Terkait realisasi keuangan atas pelaksanaan sasaran dan program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)	RP (%) REALISASI 2022	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5		4
Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Perencanaan dan Keuangan
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.039.362	79%	
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	21.671.184.320	91%	
Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan		- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	8.999.745	90%	
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
			- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	820.886.176	93%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.349.710	79%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai Komponen	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Penataan Organisasi		76%	Bagian Organisasi



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)	RP (%) REALISASI 2022	PENANGGUNG JAWAB
	Pelaporan Kinerja Minimal 10					
Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	123.274.913	79%	
Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80		Kegiatan Penataan Organisasi		76%	
	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	117.325.689	83%	
Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Analisa dan Evaluasi Jabatan	Persentase Perangkat Daerah dengan Kelembagaan yang efektif		Kegiatan Penataan Organisasi		76%	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	117.226.852	67%	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		75%	Bagian Pemerintahan
	Persentase Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	164.097.124	98%	
Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Tata Batas antar Daerah yang berhasil ditindaklanjuti		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		75%	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	290.131.000	91%	
Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		75%	
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	1.053.422.440	68%	
	Persentase dokumen Kerjasama antar		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		85%	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)	RP (%) REALISASI 2022	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti		Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	122.898.240	85%	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan barang dan jasa Lingkup Kabupaten Tanah Laut secara Elektronik	Persentase Paket Pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		88%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui system LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui system LPSE		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	360.007.634	90%	
Meningkatnya Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		88%	
			Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	281.683.800	93%	
Meningkatnya Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		88%	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	386.151.152	82%	
Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum		70%	Bagian Hukum
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	254.519.532	84%	
Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk Hukum yang harmonis		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum		70%	
			Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	939.963.285	73%	
Tingkat Penanganan kasus/perkar hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkar hukum yang tertangani		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum		70%	
Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)		Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	289.424.241	47%	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)	RP (%) REALISASI 2022	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Layanan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Komunikasi Pimpinan, Keprotokolan dan Dokumentasi.	Persentase Penyebarluasan Informasi/Pemberitaan Pembangunan Pemerintah Daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		93%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	319.752.800	92%	
	Persentase Pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti					
	Persentase Kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani		Sub Kegiatan Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan	437.156.830	94%	
	Persentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani Keprotokolannya		Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	299.706.344	95%	
Meningkatnya Kaulitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan Baik	Persentase Layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		94%	Bagian Umum
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.951.250.000	99%	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99%	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1.231.106.436	99%	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.525.200	93%	
Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah secara tertib	Persentase Layanan pada Bagian-bagian lingkup Setda sarana prasarana/asset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan Baik		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		94%	
			Sub Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.123.795	94%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336.037.877	82%	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)	RP (%) REALISASI 2022	PENANGGUNG JAWAB
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92%	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.879.941	83%	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.460.400	98%	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99%	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.930.347	100%	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.806.241.019	100%	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	90%	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1.231.106.436	99%	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.525.200	93%	
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		30%	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian		Sub Kegiatan <i>Medical Check-Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000	0	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.486.500	99%	
			Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah		4%	
			Sub Kegiat Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	0	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)	RP (%) REALISASI 2022	PENANGGUNG JAWAB
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.999.745	5%	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.951.250.000	99%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.879.941	86%	
Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		94%	
	Nilai Komponen Area Perubahan Zona Integritas Lingkup Sekretariat		Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	96.363.037.877	94%	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	828.019.412	91%	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.687.079.048	83%	
			Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		99%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	860.375.000	96%	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	657.555.000	100%	



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)	RP (%) REALISASI 2022	PENANGGUNG JAWAB
			Sub Kegiatan Penyedia Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	1.302.160.000	99%	
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		97%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	20.439.843.565	98%	
Meningkatnya Layanan Bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.042.116.816	100%	
Meningkatnya peran serta Organisasi /Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.298.391.580	90%	
Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		90%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	204.436.326	99%	
Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja Positif		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	241.839.150	82%	
Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi Permodalan	Persentase UMKM yang Terfasilitasi Permodalan		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		93%	
Meningkatnya Kualitas Manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Progres Pembangunan fisik		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	162.840.082	93%	

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

4. Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah telah melaksanakan efisiensi sasaran strategis dan keuangan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Realisasi Persentase Keuangan, Realisasi Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis

Sekretariat Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.51	92.98	0	Sekretaris Daerah dan Bagian Umum
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	83.12	10	-	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	97.68	Nilai dari KEMENDAGRI belum terbit	-	Sekretaris Daerah dan Bagian Pemerintahan
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	78.78	100%	21.22	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	78.78	100	21.22	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	78.92	84.2	5.28	Sekretaris Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah		Masih Tahap <i>Baseline</i> SPIP Terintegrasi	-	
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	94.35	92.59	-	Sekretaris Daerah dan Bagian Umum
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	94.08	87.74	-	



8	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	91.64	100%	0.72	Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	67.63	76%	8.37	Bagian Pemerintahan
		Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		100%	32.37	
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	91.15	-	-	Bagian Pemerintahan
11	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	97.68	95%	-	Bagian Pemerintahan
12	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	85.04	416%	-	Bagian Pemerintahan
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	78.78	97.5%	18.72	Bagian Organisasi
14	Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	78.78	100%	21.22	Bagian Organisasi
15	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	83.12	100%	16.88	Bagian Organisasi



	dan Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		95%	11.88	Bagian Organisasi
16	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	66.76	90%	23.24	Bagian Organisasi
17	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	78.86	100%	21.14	Bagian Perencanaan dan Keuangan
18	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	90.89	100%	9.11	Bagian Perencanaan dan Keuangan
19	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	78.92	84.2	5.28	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah		Masih Tahap <i>Baseline SPIP</i> Terintegrasi	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	91.91	100%	8.09	Bagian Perencanaan dan Keuangan
20	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	96.51	100%	3.49	Bagian Umum
21	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik	95.13	100%	4.87	Bagian Umum



	Daerah Secara Tertib	Sekretariat Daerah terkelola dengan baik				
22	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	74.25	100%	25.75	Bagian Umum
23	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	94.35	92.59	0	Bagian Umum
		Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	94.08	87.74	0	Bagian Umum
24	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	89.84	100%	10.16	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
25	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	89.84	100%	10.16	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
26	Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	92.88	100%	7.12	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
27	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	82.13	100%	17.87	Bagian Pengadaan Barang/Jasa



28	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	84.33	100%	15.67	Bagian Hukum
29	Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	73.28	100%	26.72	Bagian Hukum
30	Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	46.70	100%	53.3	Bagian Hukum
31	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	46.70	78,4	31.7	Bagian Hukum
32	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolannya dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	92	100%	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan dokumentasi KDHW/KDWH yang terlayani	93.60	100%	6.4	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan KDHW/KDWH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	94.64	100%	5.36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	92	0%	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	92	0%	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
33	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	99.64	99.64%	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat



34	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	98.04	98.04%	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
35	Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	89.65	89.65%	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
36	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	99.28	100 %	0.72	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
37	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	82.33	75%	-	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
38	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi	93.31	75%	-	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
39	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	93.31	80%	-	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKj bagi Sekretariat Daerah mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan dikuatkan dengan data dukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian Tahun 2022, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA secara umum.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang telah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2021, yang mencakup penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran telah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, namun masih terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu untuk indikator sasaran Eselon III yang belum tercapai 5 (Lima) indikator kemudian indikator sasaran Eselon IV yang belum tercapai 8 (Delapan) indikator, hal ini dikarenakan program dan kegiatan sebagai penunjang indikator sasaran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan masih adanya pandemi *COVID-19*.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dari hasil analisa pencapaian sasaran dan IKU terhadap unit kerja lingkup Sekretariat Daerah teridentifikasi beberapa kendala antara lain :

NO	KENDALA	BAGIAN
1	Banyaknya jumlah asset yang tidak ditemukan	Bagian Umum
2	Pencatatan asset yang belum tertib	
3	Kurang tertibnya usulan RKBK dari Bagian-Bagian sehingga mengakibatkan kurang terakomodir kebutuhan di setiap Bagian.	
4	Penentuan jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (<i>Coffee Morning</i>) yang menyesuaikan jadwal pimpinan.	Bagian Pemerintahan
5	Kehadiran Kepala SKPD yang diwakilkan oleh Sekretaris atau Kepala Bidang atau bahkan Kepala Seksi / Sub coordinator.	
6	Adanya permasalahan dilapangan diantaranya perbedaan persepsi penentuan titik batas desa pemekaran kecamatan.	
7	Pengumpulan data dukung pemekaran kecamatan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan	
8	Capaian IKK masing-masing urusan masih rendah dan bahkan nihil karena realisasi kegiatan untuk memenuhi Capaian IKK dari SKPD belum memenuhi target atau bahkan kegiatannya belum/tidak dilaksanakan	
9	Kurangnya koordinasi SKPD terkait mengenai rencana awal penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah	Bagian Organisasi
10	Kurangnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pejabat struktural dalam kegiatan Akuntabilitas Kinerja.	
11	Belum optimalnya internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah	
12	Belum optimalnya peran agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.	
13	Masih ada beberapa SKPD yang kualitas pelayanannya kurang baik	Bagian Perencanaan dan Keuangan
14	Kurangnya kemampuan melakukan proyeksi kegiatan secara efektif	
15	Belum optimal melakukan revaluasi kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.	
16	Beberapa Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah tidak menyampaikan data capaian kinerja secara tepat waktu	
17	Proses upload data pada aplikasi SAKUNTALA belum sepenuhnya optimal	
18	Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami sepenuhnya Sistem AKIP	
19	Anggota Tim Penyusunan SAKIP dari Bagian-Bagian dalam menyampaikan data tidak tepat waktu	
20	Asesor belum sepenuhnya memahami untuk menentukan pengisian Grade dalam Kertas Kerja Maturitas SPIP Terintegrasi	
21	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan tidak sepenuhnya mengerti mekanisme penginputan aplikasi SIPD secara tepat	
22	Kurangnya fitur pada aplikasi SIPD khususnya terkait fitur Penatausahaan Keuangan Daerah	
23	Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami maksud unsur-unsur SPIP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
24	Kurangnya pemahaman para PA/KPA dan PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	
25	Sulitnya kerjasama SKPD untuk dievaluasi dalam proses pengadaan barang/jasa	

26	Sulitnya membina hubungan dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras	
27	Masih kurangnya pemahaman dan kecakapan pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa melalui SPSE (terutama untuk e-PL, Pencatatan non Tender dan E-Kontrak);	
28	Pelaksanaan pemanfaatan sistem pengadaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik (manual) terutama untuk metode pengadaan langsung secara elektronik (e-PL). Hal tersebut terjadi karena pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, masih memperbolehkan pelaksanaan secara manual.	
29	Terbatasnya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);	
30	Sulitnya persyaratan kompetensi yang dilaksanakan oleh LKPP untuk lulus menjadi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);	
31	Proses penginputan atau pengunggahan data produk hukum daerah belum terjadwal dengan baik dikarenakan padatnya kegiatan pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum karena sejak Tahun 2021 juga melakukan pencetakan terhadap produk hukum penetapan	Bagian Hukum
32	File atau dokumen Peraturan Daerah Tahun 2005 kebawah yang masih belum ditemukan arsipnya karena proses pengarsipan waktu itu masih belum sebagus saat ini. kebawah dan Peraturan Bupati Tahun 2013 ke bawah tidak tersedia karena terkendala tidak adanya file atau dokumen karena ditahun-tahun tersebut Perbup langsung dicetak oleh SKPD masing-masing	
33	Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama terutama rancangan peraturan daerah yang terkadang terkendala dalam proses di DPRD	
34	Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama	
35	kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, dan hadir pada saat mediasi dan sidang pemeriksaan setempat.	
36	Masih terdapat beberapa nilai capaian dibawah 60 untuk beberapa kelompok hak pada penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM, hal tersebut dikarenakan kurangnya data dukung yang diberikan oleh SKPD/Lembaga terkait.	
37	Penyebarluasan informasi / pemberitaan melalui web dan media sosial, SDM-nya kurang tanggap terhadap informasi yang harus dipublikasikan.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
38	Kualitas sarana penyimpanan Dokumentasi kegiatan KDH / WKDH yang masih kurang memadai.	
39	Kurangnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan Sub Bagian Fasilitasi Keprotokolan.	
40	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur penyampaian aduan.	

41	Bagi pengurus organisasi/kelembagaan keagamaan yang memohon bantuan hibah kebanyakan tidak atau belum memahami tata cara dan kelengkapan administrasi Proposal yang diajukan.	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
42	Lambatnya dalam hal pencairan dana hibah dikarenakan pengurus lembaga/ organisasi cenderung lambat dalam pengajuan kelengkapan administrasi pencairan dana hibah kepada Tim verifikasi di Bagian Kesra.	
43	Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah serta supervisor dan Koordinator Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.	
44	Dewan Pengurus Kabupaten BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus menginformasikan kepada kepala sekolah, Koordinator Kecamatan untuk mendata ulang TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang benar benar bersedia menjadi Tenaga Pengajar di lingkungan Pemerintah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.	
45	Kegiatan yang bersifat even tahunan tidak dapat terjadwal sesuai rencana awal sehingga ada kegiatan yang tidak dapat terfasilitasi dengan maksimal karena jadwal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain.	
46	Beberapa rumusan kebijakan telah disusun dan direkomendasikan untuk dilaksanakan guna menunjang peningkatan perekonomian daerah namun dalam perjalanannya ada permasalahan - permasalahan yang muncul menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sempurna.	Bagian Perekonomia, Adm Pembangunan dan SDA
47	Koordinasi dengan SKPD teknis terkait penerapan kebijakan masih kurang optimal.	
48	Masih belum selesainya pembahasan Raperda penyertaan modal untuk BUMD pada tingkat Legislatif yaitu Penyertaan Modal kepada BUMD PT. BPR Tanah Laut dan Penyertaan Modal kepada BUMD PDAM Tanah Laut.	
49	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen BUMD belum dilaksanakan secara maksimal oleh BUMD.	
50	Hasil kajian analisis investasi penyertaan modal Pemerintah kepada BUMD perlu dilakukan update data karena tahun penyusunan yang sudah lama.	
51	Dana investasi untuk Tahun 2022 terlambat di cairkan kepada PT. BPR Tanah Laut, sehingga terlambat juga untuk disalurkan kepada calon debitur Gapura Karomah;	
52	Daftar pemohon program Gapura Karomah baik yang berasal dari tahun sebelumnya dan yang baru mendaftar pada Tahun 2022 sangat banyak sehingga dana investasi yang dianggarkan diperkirakan tidak cukup untuk memenuhi permintaan tersebut.	

Beberapa hambatan yang terjadi, akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan Lkj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun mendatang antara lain :

NO	STRATEGI PENINGKATAN	BAGIAN
1	Membuat berita acara penelusuran asset yang tidak ditemukan dan diusulkan untuk dihapus atau hibah.	Bagian Umum
2	Membuat berita acara serah terima barang.	
3	Membuat surat edaran mengenai batasan usulan RKBU.	
4	Mensinkronkan jadwal kegiatan rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Coffee Morning) agar tidak berbentur dengan jadwal agenda pimpinan.	Bagian Pemerintahan
5	Meningkatkan koordinasi dengan Tim Batas Desa untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemekaran kecamatan	
6	Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.	
7	engadakan sosialisasi penyusunan LPPD dengan narasumber dari Tim EPPD Provinsi dan Pusat	
8	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait rencana kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang akan direalisasikan di tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.	Bagian Organisasi
9	Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.	
10	Optimalisasi internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah	
11	Optimalisasi agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.	
12	Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat oleh pihak eksternal;	Bagian Perencanaan dan Keuangan
13	Selalu melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai dengan SOP	
14	Meningkatkan kompetensi para petugas penyusun perencanaan	
15	Bimtek tentang teknik pembuatan perencanaan	
16	Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan	
17	Menyampaikan surat permintaan data kinerja dengan mencantumkan batas waktu	
18	Agar lebih mengoptimalkan aplikasi SAKUNTALA sehingga tidak terjadi lagi kendala upload data	

19	Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja	
20	Melaksanakan Monev terkait capaian kinerja secara berkala	Bagian Perencanaan dan Keuangan
21	Koordinasi lebih intens dengan Pembina SAKIP Kabupaten	
22	Melaksanakan Bimtek terkait Manajemen Risiko	
23	Agar dilakukan FGD	
24	<i>Sharing Knowledge</i> antara Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan dengan admin SiPD	
25	Melaksanakan Monev terkait Rencana Tindak Lanjut Risiko	
26	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
27	Melaksanakan pelatihan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik	
28	Mengagendakan rapat dengan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa	
29	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir dalam pemanfaatan sistem LPSE	
30	Melaksanakan koordinasi dengan stake holder lain (Bappeda, BPKAD dan Inspektorat) untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan SPSE	
31	Melaksanakan koordinasi dengan LKPP terkait pemenuhan kebutuhan pelatihan dan bimbingan teknis SDM JF PPBJ	
32	Penyusunan jadwal kegiatan pembinaan pelaku pengadaan yang lebih terarah, efektif dan efisien dan perlu kunjungan ke SKPD untuk melaksanakan FGD terkait regulasi dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD	
33	membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut	Bagian Hukum
34	melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik di ruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap	
35	Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom "tanggal berkas kembali/diterima" setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.	
36	Penambahan anggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah serta honorarium narasumber	
37	Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan sampai dalam penanganan perkara sampai dengan selesai	

38	Karena pemilik data adalah SKPD/Lembaga terkait (pihak eksternal) maka tugas Bagian Hukum selaku koordinator dalam kegiatan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM hanyalah terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD/Lembaga terkait terkait pengisian form/data-data yang diperlukan.	
39	Meningkatkan kualitas SDM melalui bimtek agar lebih tanggap dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah melalui web dan media sosial yang dikelola pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
40	Meningkatkan kualitas pendokumentasian dan sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan pimpinan	
41	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan.	
42	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tindak lanjut jika ditemukan laporan yang masuk	
43	Melaksanakan sosialisasi kepada penerima pencairan hibah secara langsung dan sosialisasi bagaimana membuat laporan keuangan bantuan hibah	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
44	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.	
45	Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH se Kabupaten Tanah Laut.	
46	Seluruh Kepala Sekolah maupun tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan menyusun target yang ingin dicapai pada setiap tingkatan pembelajaran baik di TKA/TPA, Madin, dan Ponpes agar kualitas hasil yang diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai.	
47	Meningkatkan dan menjalin koordinasi dengan semua pihak terkait serta menyusun rencana kegiatan dengan baik.	
48	Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
49	Identifikasi permasalahan yang telah muncul dan kemungkinan yang akan muncul	
50	Membuka komunikasi yang intens dengan anggota ponse yang mengurus investasi daerah	
51	Menyusun jadwal rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi untuk membahas kinerja BUMD serta origress pemasangan RT, 009	
52	Rapat koordinasi setiap akhir triwulan	
53	Menyusun time schedule untuk monitoring proses pencairan dana investasi sampai kepada waktu peyaluran dana investasi kepada pelaku usaha mikro	
54	Melaksanakan rakor tim investasi daerah untuk mengumpulkan data dan analisa untuk pengajuan tambahan dana investasi pada tahun perubahan anggaran Tahun 2022.	

C. Penghargaan dan Inovasi

Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Tanah Laut 2022 dengan (Predikat BAIK) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

NO	NILAI ITKP		PENINGKATAN
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	73,94	77,9	3,99

- 2) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Tanah Laut Mendapatkan Indeks 4,52 Kategori (A) .

No	SPK/PTSP KAS/SDTS	Indeks	Kategori
01	Bina Keluarga	4,52	A
02	Bina Masyarakat	4,52	A
03	Bina Pemuda	4,52	A
04	Bina Wanita	4,52	A
05	Bina Pemuda	4,52	A
06	Bina Pemuda	4,52	A
07	Bina Pemuda	4,52	A
08	Bina Pemuda	4,52	A
09	Bina Pemuda	4,52	A
10	Bina Pemuda	4,52	A
11	Bina Pemuda	4,52	A
12	Bina Pemuda	4,52	A
13	Bina Pemuda	4,52	A
14	Bina Pemuda	4,52	A
15	Bina Pemuda	4,52	A
16	Bina Pemuda	4,52	A
17	Bina Pemuda	4,52	A
18	Bina Pemuda	4,52	A
19	Bina Pemuda	4,52	A
20	Bina Pemuda	4,52	A
21	Bina Pemuda	4,52	A
22	Bina Pemuda	4,52	A
23	Bina Pemuda	4,52	A
24	Bina Pemuda	4,52	A
25	Bina Pemuda	4,52	A
26	Bina Pemuda	4,52	A
27	Bina Pemuda	4,52	A
28	Bina Pemuda	4,52	A
29	Bina Pemuda	4,52	A
30	Bina Pemuda	4,52	A
31	Bina Pemuda	4,52	A
32	Bina Pemuda	4,52	A
33	Bina Pemuda	4,52	A
34	Bina Pemuda	4,52	A
35	Bina Pemuda	4,52	A
36	Bina Pemuda	4,52	A
37	Bina Pemuda	4,52	A
38	Bina Pemuda	4,52	A
39	Bina Pemuda	4,52	A
40	Bina Pemuda	4,52	A
41	Bina Pemuda	4,52	A
42	Bina Pemuda	4,52	A
43	Bina Pemuda	4,52	A
44	Bina Pemuda	4,52	A
45	Bina Pemuda	4,52	A
46	Bina Pemuda	4,52	A
47	Bina Pemuda	4,52	A
48	Bina Pemuda	4,52	A
49	Bina Pemuda	4,52	A
50	Bina Pemuda	4,52	A
51	Bina Pemuda	4,52	A
52	Bina Pemuda	4,52	A
53	Bina Pemuda	4,52	A
54	Bina Pemuda	4,52	A
55	Bina Pemuda	4,52	A
56	Bina Pemuda	4,52	A
57	Bina Pemuda	4,52	A
58	Bina Pemuda	4,52	A
59	Bina Pemuda	4,52	A
60	Bina Pemuda	4,52	A
61	Bina Pemuda	4,52	A
62	Bina Pemuda	4,52	A
63	Bina Pemuda	4,52	A
64	Bina Pemuda	4,52	A
65	Bina Pemuda	4,52	A
66	Bina Pemuda	4,52	A
67	Bina Pemuda	4,52	A
68	Bina Pemuda	4,52	A
69	Bina Pemuda	4,52	A
70	Bina Pemuda	4,52	A

- 3) Penghargaan sebagai UKPBJ Kabupaten/Kota Pertama yang mencapai Level 3 dari Provinsi Kalimantan Selatan.
- 4) Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2022 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar



Pelayanan Publik Tahun 2022 Tanah Laut berada pada Zonasi Hijau Nilai Kepatuhan **86.61** Kategori **A**

No	Kabupaten	Nilai Kepatuhan	Revisi	Kategori	Uraian
42	Cimang Kidal	86.47	Ngata	A	Kualitas Terunggul
43	Jepara	86.79	Ngata	A	Kualitas Terunggul
44	Sukoh	86.73	Ngata	A	Kualitas Terunggul
45	Cheraweng	86.87	Ngata	A	Kualitas Terunggul
46	Kuhle Pengi	86.81	Ngata	A	Kualitas Terunggul
47	Tongereng	86.74	Ngata	A	Kualitas Terunggul
48	Cigen Se	86.40	Ngata	A	Kualitas Terunggul
49	Belawang	86.27	Ngata	A	Kualitas Terunggul
50	Ngapenggan	86.20	Ngata	A	Kualitas Terunggul
51	Tanah Laut	86.11	Ngata	A	Kualitas Terunggul
52	Langkat	86.02	Ngata	A	Kualitas Terunggul
53	Arak Selatan	87.86	Ngata	B	Kualitas Tinggi
54	Tanjung Jaling, Lase	87.74	Ngata	B	Kualitas Tinggi
55	Burau	87.42	Ngata	B	Kualitas Tinggi
56	Langkat	87.21	Ngata	B	Kualitas Tinggi
57	Langkat	87.27	Ngata	B	Kualitas Tinggi
58	Tuparek Selatan	87.20	Ngata	B	Kualitas Tinggi
59	Batu Bara	86.63	Ngata	B	Kualitas Tinggi
60	Tanah Laut	86.61	Ngata	B	Kualitas Tinggi
61	Penggan	86.11	Ngata	B	Kualitas Tinggi
62	Ngapeng	85.98	Ngata	B	Kualitas Tinggi
63	Ngapeng	85.97	Ngata	B	Kualitas Tinggi
64	Arak Barat Daya	85.85	Ngata	B	Kualitas Tinggi
65	Makara Tengah	85.73	Ngata	B	Kualitas Tinggi
66	Ngapeng	85.72	Ngata	B	Kualitas Tinggi
67	Arak	85.51	Ngata	B	Kualitas Tinggi
68	Arak Tengah	85.27	Ngata	B	Kualitas Tinggi
69	Ngata	85.38	Ngata	B	Kualitas Tinggi
70	Nan	85.53	Ngata	B	Kualitas Tinggi
71	Klaron	85.50	Ngata	B	Kualitas Tinggi

Demikian laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Pelaihari, 20 Januari 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. DAHNIAL KIFLI,MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012